



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012

Buku IV
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
(Buku ke-4 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB 1	Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1
BAB 2	Resume Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2012	3
BAB 3	Pengelolaan Pendapatan	21
BAB 4	Pelaksanaan Belanja	57
BAB 5	Manajemen Aset	97
BAB 6	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	115
BAB 7	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	129
BAB 8	Operasional Badan Usaha Milik Negara	135
BAB 9	Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya	149
BAB 10	Operasional Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya	157
BAB 11	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	177

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

- 2.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- 2.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- 2.4. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat
- 2.5. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah
- 2.6. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan KKKS
- 2.7. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMD
- 2.8. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BLU dan Badan Lainnya
- 3.1. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai

- 3.6. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.7. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.8. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.9. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangn atas PNBPN
- 3.10. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas PNBPN
- 3.11. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.12. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.13. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3.14. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.15. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.16. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.17. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

- 3.18. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.19. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.20. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.1. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Belanja Pemerintah Pusat
- 4.2. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara atas Belanja Pemerintah Pusat
- 4.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Belanja Pemerintah Pusat
- 4.4. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Belanja Pemerintah Pusat
- 4.5. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Belanja Pemerintah Pusat
- 4.6. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.7. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.8. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.9. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

- 4.10. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.11. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.12. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.13. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Daerah atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.14. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.15. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.16. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 5.1. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

- 5.6. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.7. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.8. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.9. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.10. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.11. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 6.1. Anggaran dan Realisasi Program Jamkesmas TA 2010, 2011 dan Semester I TA 2012
- 6.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda
- 7.1. Koreksi *Cost Recovery* Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
- 8.1. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BUMN
- 8.2. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Perusahaan atas Operasional BUMN
- 8.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Operasional BUMN

- 8.4. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Operasional BUMN
- 8.5. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Operasional BUMN
- 8.6. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Operasional BUMN
- 8.7. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Operasional BUMN
- 9.1. Cakupan Pemeriksaan Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya
- 9.2. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya
- 9.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Pemeriksaan atas Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya
- 10.1. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pendapatan Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.6. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya Berdasarkan Pengelompokan BLU dan Badan Lainnya
- 10.7. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.8. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.9. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

- 10.10. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.11. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Operasional BLU dan Badan lainnya
- 10.12. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 11.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
- 11.2. Perbandingan antara Kebutuhan Impor dan Realisasi Daging Sapi (Tidak Termasuk Bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012
- 11.3. Kelompok Temuan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 11.4. Kelompok Temuan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah
- 11.5. Kelompok Temuan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada BUMN

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Persentase Kasus Kerugian
- 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDTT Semester II Tahun 2012
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester II Tahun 2012
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDTT Semester II Tahun 2012
4. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
6. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
8. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
9. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
11. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
12. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

15. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah
17. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah
18. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah
19. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu atas Manajemen Aset
20. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset
21. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset
22. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
23. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
24. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
25. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
26. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
27. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
28. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya
29. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya

30. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya
31. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya
32. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya
33. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya
34. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
35. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
36. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
37. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2012

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengertian PDTT

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Tujuan dan Sifat PDTT

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

- Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*) ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Cara Penentuan Sifat PDTT

Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna. Jika prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat *agreed upon procedures*. Jika tidak, pemeriksa dapat melakukan reviu atau eksaminasi.

Penentuan pemilihan PDTT reviu atau eksaminasi ditentukan oleh tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu. Jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan yang tinggi, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat eksaminasi. Sebaliknya, jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan menengah, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat reviu.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2012

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan PDDT atas 450 objek pemeriksaan. PDDT tersebut meliputi 83 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 220 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 38 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), 34 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD), 17 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum (BLU), dan 10 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 450 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp352,07 triliun atau sekitar 44,2% dari realisasi anggaran. Rincian cakupan PDDT di entitas pusat, daerah, BUMN/BUMD, serta BLU dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Cakupan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

(nilai dalam miliar rupiah)

Entitas	Jumlah Objek Pemeriksaan	Nilai Anggaran	Nilai Realisasi	Nilai Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	83	385.481,38	346.505,54	23.708,02	6,8
Provinsi	48	89.575,76	56.983,91	32.599,70	57,2
Kabupaten/Kota	220	112.122,01	76.933,60	32.400,03	42,1
BUMN dan KKKS	38	261.923,82	251.254,00	235.002,63	93,5
BUMD	34	17.203,63	40.783,37	14.750,36	36,1
BLU	17	10.011,39	7.318,56	2.908,61	39,7
Badan Lainnya	10	15.670,47	16.593,83	10.704,76	64,5
Total	450	891.988,46	796.372,81	352.074,11	44,2

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam sembilan tema sebagai berikut

- pengelolaan pendapatan;
- pelaksanaan belanja;
- manajemen aset;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);

- pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
- operasional BUMN;
- operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- operasional BLU dan badan lainnya; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

PDTT dalam IHPS II Tahun 2012 menunjukkan adanya 1.977 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	381
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	955
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	641
	Jumlah	1.977

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil PDTT Semester II Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 4.665 kasus senilai Rp6,72 triliun. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

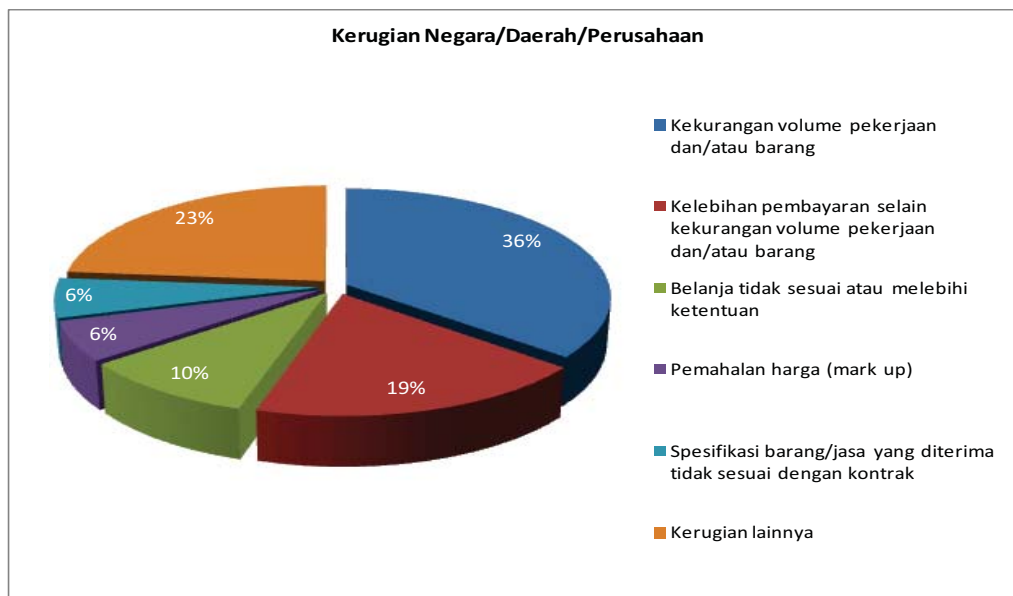
(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	1.505	809.915,36
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	488	1.659.927,29
3	Kekurangan Penerimaan	951	2.143.036,78
Sub Total I		2.944	4.612.879,43
4	Administrasi	1.166	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	222	232.144,61
6	Ketidakefisienan	2	4.392,08
7	Ketidakefektifan	331	1.875.129,58
Sub Total II		1.721	2.111.666,27
Total		4.665	6.724.545,70

Berdasarkan Tabel 2.3, hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 menemukan sebanyak 4.665 kasus senilai Rp6,72 triliun. Sub total I menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 2.944 kasus senilai Rp4,61 triliun. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan. Sub total II menunjukkan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang tidak berdampak finansial sebanyak 1.721 kasus senilai Rp2,11 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Rincian kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 1.505 kasus senilai Rp809,91 miliar (disajikan dalam Lampiran 1), di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/ perusahaan sebanyak 633 kasus senilai Rp370,69 miliar. Kasus kerugian negara/daerah/ perusahaan meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemahalan harga (*mark up*), spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan kasus kerugian lainnya. Persentase kasus kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian



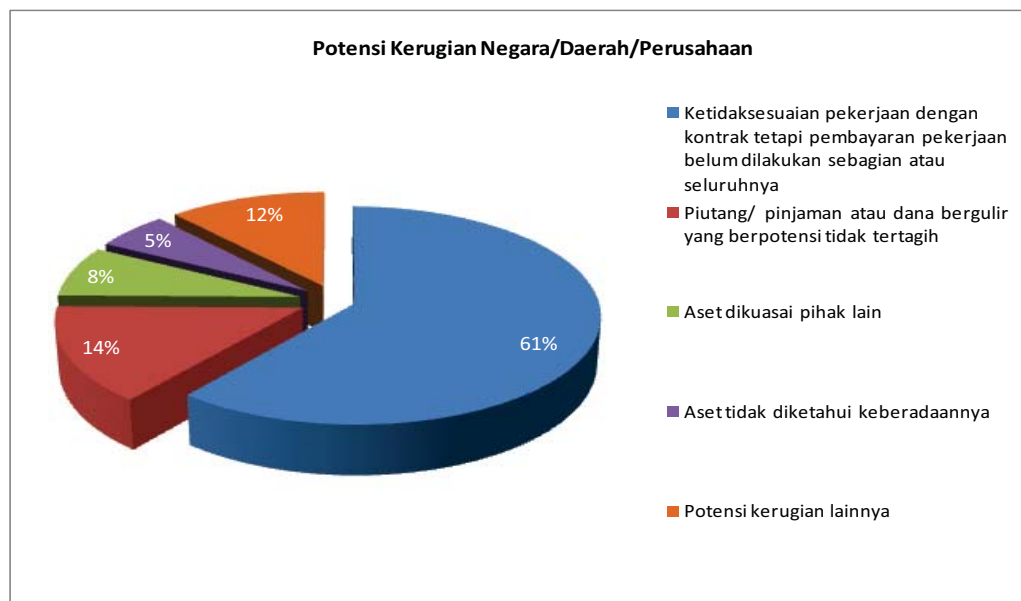
Grafik 2.1 menyajikan kasus-kasus kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 540 kasus (36% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp155,886 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 284 kasus (19% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp74,833 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 147 kasus (10% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp126,033 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- kasus pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 90 kasus (6% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp73,131 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 89 kasus (6% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp74,332 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya; dan

- kasus kerugian lainnya sebanyak 355 kasus (23% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp305,698 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan Badan Lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya.

Rincian kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 488 kasus senilai Rp1,65 triliun disajikan dalam Lampiran 2. Kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, dan kasus potensi kerugian lainnya. Persentase kasus potensi kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian



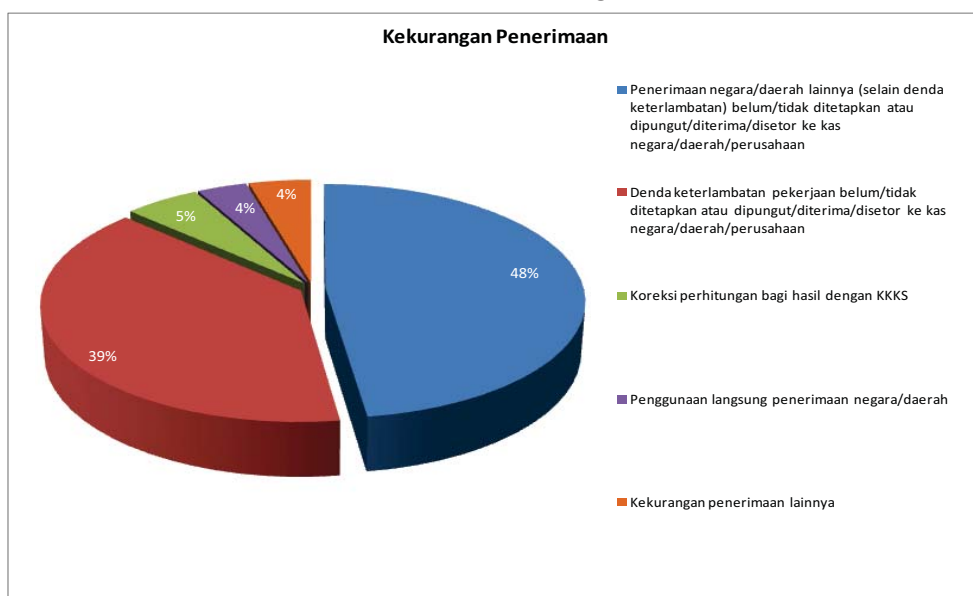
Grafik 2.2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 297 kasus (61% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp223,509 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BUMN, serta operasional BLU dan badan lainnya;
- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 70 kasus (14% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp878,085 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya, operasional BUMN, serta pengelolaan pendapatan;

- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 37 kasus (8% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp96,665 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan manajemen aset, operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya serta operasional BLU dan badan lainnya;
- kasus aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 27 kasus (5% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp51,172 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan manajemen aset, operasional BLU dan badan lainnya serta pelaksanaan belanja; dan
- kasus potensi kerugian lainnya sebanyak 57 kasus (12% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp410,494 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan Badan Lainnya, serta pengelolaan pendapatan.

Rincian kasus kekurangan penerimaan sebanyak 951 kasus senilai Rp2,14 triliun disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan meliputi kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan kasus kekurangan penerimaan lainnya. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/ perusahaan sebanyak 458 kasus (48% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp1,453 triliun. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya, serta operasional BLU dan badan lainnya;
- kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 370 kasus (39% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp72,751 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- kasus koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 50 kasus (5% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp372,489 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan KKKS;
- kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 33 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp226,240 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan, operasional BLU dan badan lainnya, serta pelaksanaan belanja; dan
- kasus kekurangan lainnya sebanyak 40 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp18,195 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan Badan Lainnya, serta pengelolaan pendapatan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp4,61 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp109,676 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp38,433 miliar, potensi kerugian senilai Rp55,929 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp15,314 miliar.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Rincian hasil PDTT selama Semester II Tahun 2012 berupa temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta kasus-kasus yang sering terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta BLU dan badan lainnya antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 83 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat menemukan 367 kasus kelemahan SPI dan 663 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,29 triliun. Dari total temuan PDTT di pusat tersebut, sebanyak 354 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp450,14 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	230	44.262,05
2	Potensi Kerugian Negara	31	151.911,20
3	Kekurangan Penerimaan	93	253.967,98
Sub Total I		354	450.141,23
4	Administrasi	228	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	26	13.572,63
6	Ketidakefisienan	1	32,97
7	Ketidakefektifan	54	830.938,18
Sub Total II		309	844.543,78
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
8	SPI	367	-
Total		1.030	1.294.685,01

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara karena kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 59 kasus senilai Rp5,44 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 58 kasus senilai Rp9,26 miliar, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 32 kasus senilai Rp2,94 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai kondisi senyatanya, dan pejabat terkait tidak cermat dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian negara karena pekerjaan yang tidak sesuai kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 12 kasus senilai Rp29,20 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan konsultan perencanaan, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/ memperhitungkan dalam termin pembayaran atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 48 kasus senilai Rp81,67 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 29 kasus senilai Rp17,73 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp450,14 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp7,40 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp4,083 miliar, potensi kerugian senilai Rp87,69 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3,233 miliar.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi menemukan 158 kasus kelemahan SPI dan 508 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp499,20 miliar. Dari total temuan PDTT

di pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 328 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp280,93 miliar.

Sementara itu, hasil PDTT atas 220 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menemukan 651 kasus kelemahan SPI dan 2.469 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,09 triliun. Dari total temuan PDTT di kabupaten/kota tersebut, sebanyak 1.740 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp611,55 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5 Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
pada Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah	190	188.023,35	909	309.460,77
2	Potensi Kerugian Daerah	48	50.089,93	313	179.201,98
3	Kekurangan Penerimaan	90	42.821,17	518	122.890,27
Sub Total I		328	280.934,45	1.740	611.553,02
4	Administrasi	114	-	470	-
5	Ketidakhematan	25	93.923,52	122	82.788,16
6	Ketidakefisienan	-	-	1	4.359,11
7	Ketidakefektifan	41	124.344,75	136	396.609,23
Sub Total II		180	218.268,27	729	483.756,50
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
8	SPI	158	-	651	-
Total		666	499.202,72	3.120	1.095.309,52

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah karena kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 450 kasus senilai Rp136,00 miliar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 202 kasus senilai Rp52,90 miliar, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 80 kasus senilai Rp113,72 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian daerah karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 278 kasus senilai Rp126,87 miliar dan aset dikuasai pihak lain sebanyak 24 kasus senilai Rp15,06 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja dan manajemen aset, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, pengelola dan pengguna barang kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dan tidak melakukan pengamanan aset secara fisik dan administrasi, serta para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, memberi sanksi kepada pelaksana dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya. Selain itu menginstruksikan inspektorat melakukan pemeriksaan khusus atas aset tetap dalam penguasaan pihak lain, mengintensifkan penarikan aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain, dan meningkatkan penatausahaan barang milik daerah (BMD).

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 309 kasus senilai Rp45,47 miliar dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak/ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 261 kasus senilai Rp101,60 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja dan pengelolaan pendapatan, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp892,48 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp51,63 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp33,153 miliar, potensi kerugian senilai Rp9,010 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp9,469 miliar.

3. BUMN dan KKKS

Hasil PDTT pada 31 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN dan 7 objek pemeriksaan KKKS menemukan 357 kasus kelemahan SPI dan 388 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,64 triliun. Dari total temuan PDTT di BUMN dan KKKS tersebut, sebanyak 166 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp1,50 triliun. Rincian temuan PDTT pada BUMN dan KKKS disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan KKKS Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMN dan KKKS	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	15	25.137,38
2	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	24	736.291,04
3	Kekurangan Penerimaan	127	742.487,94
Sub Total I		166	1.503.916,36
4	Administrasi	168	--
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	10	9.812,77
6	Ketidakefektifan	44	130.843,37
Sub Total II		222	140.656,14
7	SPI	357	--
Total		745	1.644.572,50

Hasil PDTT di lingkungan BUMN dan KKKS menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara/perusahaan karena kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 6 kasus senilai Rp3,57 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 3 kasus senilai Rp2,52 miliar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp11,58 miliar. Kasus-kasus tersebut terjadi pada tema operasional BUMN dan PDTT lainnya, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, pengelola BUMN lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pengelola BUMN yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian negara/perusahaan karena piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 18 kasus senilai Rp329,41 miliar dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 3 kasus senilai Rp39,62 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BUMN dan PDTT lainnya, yang pada umumnya disebabkan pengelola BUMN kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, membuat SOP penagihan piutang dan tindak lanjut terhadap piutang-piutang yang tidak tertagih dan meninjau kembali peraturan yang ditetapkan serta memberikan sanksi kepada pengelola BUMN yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa kekurangan penerimaan negara yang berasal koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 50 kasus senilai Rp372,48 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan KKKS, yang pada umumnya disebabkan KKKS tidak mengakomodir perubahan lingkup kerja (PLK) dalam suatu amandemen kontrak yang mendapat persetujuan BPMIGAS terlebih dulu, dan KKKS kurang cermat dalam melakukan perhitungan *home office overhead* (HOO).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan dari KKKS tersebut, BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi dan mengeluarkan PLK yang tidak didukung *change order* dari *cost recovery*, dan mengeluarkan biaya HOO dari perhitungan *cost recovery* serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan sebanyak 62 kasus senilai Rp312,01 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pengelolaan pendapatan dan operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dan pengelola BUMN serta bendaharawan kurang cermat dan kurang memahami peraturan terkait perpajakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pengelola BUMN yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan. Selain itu agar segera melakukan penelitian ulang atas potensi penerimaan yang kurang dipungut dari kesalahan penetapan tarif bea masuk, dan melakukan koreksi fiskal dan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011 sesuai ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan penanganan perpajakan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,50 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/perusahaan senilai Rp401,42 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp66,27 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp335,15 juta.

4. BUMD

Hasil PDTT pada 34 BUMD menemukan 293 kasus kelemahan SPI dan 305 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,17 triliun. Dari total temuan PDTT di BUMD tersebut, sebanyak 174 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp794,33 miliar. Rincian temuan PDTT pada BUMD disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMD Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMD	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	66	173.281,84
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	51	464.193,49
3	Kekurangan Penerimaan	57	156.858,13
Sub Total I		174	794.333,46
4	Administrasi	89	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	21	27.277,90
6	Ketidakefektifan	21	348.819,98
Sub Total II		131	376.097,88
7	SPI	293	-
Total		598	1.170.431,34

Hasil PDTT atas 34 BUMD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah/perusahaan karena pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet sebanyak 17 kasus senilai Rp163,05 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 15 kasus senilai Rp4,00 miliar, dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 7 kasus senilai Rp456,97 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya, yang pada umumnya disebabkan para pengelola BUMD yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, lalai dalam menjalankan tugasnya, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan serta belum optimalnya penagihan penyelesaian atas pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pengelola BUMD yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah/perusahaan serta mengoptimalkan penagihan/penyelesaian atas pinjaman piutang atau dana bergulir macet.

- Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan karena piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 38 kasus senilai Rp461,71 miliar dan pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 kasus senilai Rp1,70 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya, yang pada umumnya disebabkan pengelola BUMD kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, membuat SOP penagihan piutang dan tindak lanjut terhadap piutang-piutang yang tidak tertagih dan meninjau kembali peraturan yang ditetapkan serta memberikan sanksi kepada pengelola BUMD yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan sebanyak 45 kasus senilai Rp155,57 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 8 kasus senilai Rp1,13 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya, yang pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dan pengelola BUMD kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pengelola BUMD yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp794,33 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp48,54 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp768,43 juta, potensi kerugian senilai Rp46,83 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp949,47 juta.

5. BLU dan Badan Lainnya

Hasil PDDT pada 17 objek pemeriksaan di lingkungan BLU menemukan 75 kasus kelemahan SPI dan 173 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp160,49 miliar. Dari total temuan PDDT di BLU tersebut, sebanyak 106 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp119,32 miliar.

Hasil pemeriksaan PDDT pada 10 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan 76 kasus kelemahan SPI dan 159 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp859,84 miliar. Dari total temuan PDDT di badan lainnya tersebut, sebanyak 76 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp852,67 miliar. Rincian temuan PDDT pada BLU dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BLU dan Badan Lainnya Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BLU		Badan Lainnya	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Negara/Daerah	55	64.496,32	40	5.253,65
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	12	35.338,01	9	42.901,64
3	Kekurangan Penerimaan	39	19.489,22	27	804.522,06
Sub Total I		106	119.323,55	76	852.677,35
4	Administrasi	37	-	60	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	5	489,28	13	4.280,35
6	Ketidakefektifan	25	40.686,28	10	2.887,79
Sub Total II		67	41.175,56	83	7.168,14
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
7	SPI	75	-	76	-
Total		248	160.499,11	235	859.845,49

Hasil PDDT di lingkungan BLU dan badan lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara/daerah karena kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 20 kasus senilai Rp6,74 miliar, pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 17 kasus senilai Rp35,94 miliar, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 17 kasus senilai Rp2,83 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BLU dan badan lainnya, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian negara/daerah karena piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 5 kasus senilai Rp42,41 miliar dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 2 kasus senilai Rp27,71 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BLU dan badan lainnya, yang pada umumnya disebabkan entitas tidak mempunyai SOP untuk mengamankan penerimaan negara di seluruh satker tentang kerja sama dengan mitra kerja untuk siaran dan non siaran serta tidak mengintensifkan penagihan piutang, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam kontrak, serta pejabat terkait tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Agar pimpinan entitas menyusun dan memberlakukan SOP untuk mengamankan penerimaan negara dan mengoptimalkan penagihan piutang usaha serta pengembalian aset negara. Selain itu, juga memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 42 kasus senilai Rp802,48 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 16 kasus senilai Rp5,12 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BLU dan badan lainnya, yang pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola penerimaan negara/daerah, kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan dan menyetorkannya ke kas negara/ daerah.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp972,00 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp1,68 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp361,92 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,327 miliar.

Hasil Pemeriksaan Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum

Pada temuan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 2.944 kasus senilai Rp4,61 triliun yang terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, BLU dan badan lainnya di atas, di antaranya terdapat temuan yang terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 1.224 kasus senilai Rp577,36 miliar. Kasus-kasus tersebut merupakan kompilasi dari kasus-kasus yang terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BLU dan badan lainnya. Rincian temuan yang terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri dari.

- 710 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp369,32 miliar di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 177 kasus senilai Rp103,31 miliar;
- 270 kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp159,67 miliar; dan
- 244 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp48,37 miliar.

Dari temuan terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum di atas, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp36,64 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp23,76 miliar, potensi kerugian senilai Rp9,07 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3,81 miliar.

BAB 3

Pengelolaan Pendapatan

- 3.1 Pendapatan meliputi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan (termasuk kepabeanan dan cukai) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD).
- 3.2 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan TA 2010 s.d. 2012 atas 93 objek pemeriksaan, terdiri atas 38 objek pemeriksaan di kementerian/lembaga (KL), 16 objek pemeriksaan di pemerintah provinsi, 32 objek pemeriksaan di pemerintah kabupaten/kota, dan 7 objek pemeriksaan kepatuhan perpajakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3.3 Pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan terdiri dari 3 sub tema, yaitu sebagai berikut.
- Penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
 - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan
 - Pengelolaan pendapatan daerah.
- 3.4 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub tema pemeriksaan pengelolaan pendapatan dapat dilihat pada uraian berikut.

Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai

- 3.5 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada 13 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas kepatuhan kewajiban perpajakan BUMN Perkebunan pada 7 BUMN dan Ditjen Pajak KPP Wajib Pajak Besar Tiga, serta pengelolaan pajak bendahara pengeluaran pada 3 pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas 1 objek pemeriksaan penerimaan kepabeanan dan cukai, dan 1 objek pemeriksaan bea masuk anti *dumping*.
- 3.6 Cakupan pemeriksaan penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai adalah senilai Rp1,19 triliun dari realisasi anggaran penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai senilai Rp195,17 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp196,87 miliar merupakan temuan kerugian, kekurangan penerimaan, dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.7 Secara umum tujuan pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 3.8 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 3.9 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.10 Hasil evaluasi atas SPI penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 3.11 Hasil evaluasi SPI terhadap penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan terdapat 52 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 3 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 36 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja, serta 13 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 4.

Tabel 3.1. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2	1	-	3
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	11	12	13	36
3	Struktur pengendalian intern	11	2	-	13
	Jumlah	24	15	13	52

- 3.12 Terdapat 3 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan					
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	-	1	-	1
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-	-	1
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	-	-	1
	Jumlah	2	1	-	3

- 3.13 Kasus-kasus tersebut terjadi di 2 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.
- 3.14 Terdapat 36 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja					
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/ daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	-	10	9	19
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan /pendapatan	11	2	-	13
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	-	4	4
	Jumlah	11	12	13	36

3.15 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.

3.16 Terdapat 13 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern					
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	2	-	6
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	-	-	5
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi memadai	2	-	-	2
	Jumlah	11	2	-	13

3.17 Kasus-kasus tersebut terjadi di 5 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.

3.18 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat proses penagihan piutang tidak dilakukan sesuai Keputusan Menteri

Keuangan (KMK) Nomor 147/KMK.04/1998 dan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2004 sehingga penerimaan negara senilai Rp68,89 miliar belum dapat terealisasi.

- Di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat kasus PPN jasa giling tebu pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (Persero) dan PTPN X (Persero) yang penyelesaiannya berlarut-larut sehingga PTPN VII (Persero) dan PTPN X (Persero) masih terutang PPN Jasa Giling masing-masing senilai Rp9,64 miliar dan Rp72,25 miliar.
- Di Kementerian Keuangan, DJP, terdapat hasil penjualan gula milik Petani Tebu Rakyat (PTR) yang memiliki omzet penjualan di atas Rp600,00 juta belum dikenakan PPN oleh DJP sehingga potensi penerimaan negara senilai Rp79,70 miliar belum terealisasi.

Penyebab

- 3.19 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta belum adanya persamaan persepsi antara PTPN dan DJP dalam melihat objek pajak PPN Jasa Giling khususnya pada pola kemitraan. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan DJP belum mensosialisasikan ketentuan perpajakan kepada PTR dan belum mengukuhkan PTR sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Rekomendasi

- 3.20 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan entitas memberikan sanksi kepada pengelola yang lalai dalam melaksanakan tugas, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Dirjen Pajak meninjau kembali peraturan terkait PPN terhadap jasa giling tebu pola kemitraan dan menyinkronkan dengan peraturan yang lebih tinggi serta mengukuhkan PTR sebagai PKP.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.21 Hasil pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 3.5. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 5 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Tabel 3.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	1	34,68
2	Kekurangan Penerimaan	60	196.840,09
3	Administrasi	38	-
4	Ketidakefektifan	2	-
Jumlah		101	196.874,77

3.22 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 101 kasus senilai Rp196,87 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

3.23 Rincian temuan pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai berdasarkan tingkat pemerintahan dan BUMN disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									
1	Kerugian Daerah	-	-	1	34,68	-	-	1	34,68
2	Kekurangan Penerimaan	6	54.909,17	4	445,30	50	141.485,62	60	196.840,09
3	Administrasi	7	-	8	-	23	-	38	-
4	Ketidakefektifan	2	-	-	-	-	-	2	-
	Jumlah	15	54.909,17	13	479,98	73	141.485,62	101	196.874,77

Kerugian Daerah (1 kasus senilai Rp34,68 juta)

3.24 Kerugian daerah adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- 3.25 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.26 Hasil pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang di pemerintah kabupaten/kota senilai Rp34,68 juta.
- 3.27 Kasus tersebut terjadi di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan atas kewajiban pajak tiga pekerjaan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran yang seharusnya ditanggung oleh rekanan sehingga merugikan keuangan daerah senilai Rp34,68 juta.

Penyebab

- 3.28 Kasus kerugian daerah terjadi karena kelalaian kepala dinas selaku pejabat penatausahaan keuangan dan pengguna anggaran yang membayar pajak yang seharusnya menjadi beban rekanan.

Rekomendasi

- 3.29 Terhadap kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan instansi memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah.

Kekurangan Penerimaan (60 kasus senilai Rp196,84 miliar)

- 3.30 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.31 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara dan pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan.
- 3.32 Hasil pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan terdapat 60 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp196,84 miliar, yang disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan									
1	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara	6	54.909,17	3	337,43	47	141.241,70	56	196.488,30
2	Pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan	-	-	1	107,87	3	243,92	4	351,79
	Jumlah	6	54.909,17	4	445,30	50	141.485,62	60	196.840,09

3.33 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.

3.34 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PPFD) tidak cermat melakukan penelitian dokumen pengujian dan identifikasi barang beserta kelengkapan sehingga penerimaan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor kurang dipungut senilai Rp26,91 miliar.
- Di PTPN III (Persero), terdapat pembebanan biaya pengobatan senilai Rp62,93 miliar dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan Tahun 2011 sehingga perhitungan penghasilan kena pajak PTPN III (Persero) harus dikoreksi positif senilai Rp62,93 miliar yang berpotensi menambah penerimaan negara senilai Rp15,73 miliar.
- Di PTPN VI (Persero), terdapat koreksi fiskal positif atas biaya di luar usaha senilai Rp43,56 miliar yang tidak dilakukan sehingga mengakibatkan kurang bayar PPh Badan Tahun 2011 senilai Rp10,89 miliar.
- Di PTPN VIII (Persero), terdapat koreksi fiskal positif atas biaya penyusutan aktiva tetap dan amortisasi hak guna usaha senilai Rp106,35 miliar yang belum dilakukan mengakibatkan perhitungan penghasilan kena pajak PTPN VIII (Persero) Tahun 2011 harus dikoreksi positif senilai Rp106,35 miliar yang berpotensi menambah penerimaan negara senilai Rp26,58 miliar.

- Di PTPN XII (Persero), terdapat koreksi fiskal PPh Badan Tahun Pajak 2011 senilai Rp27,14 miliar yang belum dilakukan mengakibatkan perhitungan Penghasilan Kena Pajak PTPN XII (Persero) harus dikoreksi positif senilai Rp27,14 miliar yang berpotensi menambah penerimaan negara senilai Rp6,78 miliar.

Penyebab

- 3.35 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dan kurang memahami peraturan terkait perpajakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan langsung.

Rekomendasi

- 3.36 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar segera melakukan penelitian ulang atas potensi penerimaan yang kurang dipungut dari kesalahan penetapan tarif bea masuk, dan melakukan koreksi fiskal dan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011 sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu BPK merekomendasikan agar entitas meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan penanganan perpajakan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Administrasi (38 kasus)

- 3.37 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.38 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.39 Hasil pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan terdapat 38 kasus penyimpangan administrasi, yang disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMN	Total
Penyimpangan Administrasi					
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik Negara	1	-	-	1
2	Penyimpangan terhadap Peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6	5	20	31
3	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	-	3	3	6
	Jumlah	7	8	23	38

3.40 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.

3.41 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PTPN VIII (Persero), terdapat biaya terkait gaji/upah tanaman belum menghasilkan senilai Rp72,43 miliar belum dikoreksi fiskal negatif sehingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak PTPN VIII (Persero) Tahun 2011 harus dikoreksi negatif senilai Rp72,43 miliar yang berpotensi mengurangi penerimaan negara senilai Rp18,10 miliar.
- Di Kementerian Perdagangan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terdapat kesalahan penetapan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dalam PMK Nomor 150/PMK.011/2012 sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara atas BMAD yang berasal dari tarif BMAD yang ditetapkan lebih rendah dari seharusnya.
- Di Kementerian Keuangan, DJP, pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 3 terdapat polemik yang berlarut-larut terkait pengkreditan PPN Masukan TBS (PM TBS) pada Tahun Pajak 2011 di empat PTPN berjumlah minimal senilai Rp134,55 miliar sehingga mengakibatkan perlakuan atas pengkreditan PM TBS Tahun 2011 pada empat PTPN minimal senilai Rp134,55 miliar menjadi tidak jelas.

Penyebab

3.42 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak cermat dalam menyusun SPT Tahunan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2011, serta kekurangcermatan BKF dalam menyusun

rancangan PMK tentang BMAD. Selain itu terdapat indikasi ketidaksesuaian aturan yang lebih tinggi dengan aturan pelaksanaannya yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009 dengan PP Nomor 12 Tahun 2001 jo. PP No.31 Tahun 2007.

Rekomendasi

- 3.43 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar entitas melakukan pembetulan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011, serta memerintahkan Kepala BKF segera melakukan revisi atas PMK Nomor 150/PMK.011/20112. Selain itu BPK juga merekomendasikan agar Ditjen Pajak meninjau kembali peraturan terkait pengkreditan PM TBS pada usaha terintegrasi kelapa sawit dan menyinkronkan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ketidakefektifan (2 kasus)

- 3.44 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.45 Hasil pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 3.46 Kasus-kasus tersebut terjadi di 1 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.
- 3.47 Kasus-kasus tersebut terjadi di Kementerian Perdagangan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Permasalahan yang terjadi adalah
- Kementerian Perdagangan pada Tahun 2012 belum membentuk unit organisasi yang bertanggung jawab membahas *national interest* dan struktur organisasi KADI belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pengambilan keputusan/rekomendasi akhir KADI yang dilaporkan kepada Menteri Perdagangan dan rekomendasi Menteri Perdagangan kepada Menteri Keuangan.
 - Proses penetapan kebijakan BMAD dan tidak ditetapkannya Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dalam penyelesaian kasus anti dumping memerlukan waktu relatif lama sehingga berpotensi terjadinya kerugian industri dalam negeri.

Penyebab

- 3.48 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas belum membentuk unit organisasi yang bertanggung jawab membahas kepentingan nasional dan perencanaan pelaksanaan penelitian permohonan dan penyelidikan kasus anti dumping tidak disusun dengan baik.

Rekomendasi

- 3.49 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar entitas membentuk dan mengefektifkan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pembahasan pertimbangan *national interest*, memperbaiki perencanaan penyelesaian kasus anti dumping dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- 3.50 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PNBP pada 35 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas 6 kementerian/lembaga (KL)
- 3.51 Cakupan pemeriksaan PNBP adalah senilai Rp721,06 miliar dari realisasi anggaran PNBP senilai Rp1,04 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp13,07 miliar merupakan temuan kerugian, kekurangan penerimaan, dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.52 Secara umum tujuan pemeriksaan atas PNBP adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait PNBP telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran PNBP telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 3.53 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

- 3.54 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.55 Hasil evaluasi atas SPI PNBPN menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 3.56 Hasil evaluasi SPI terhadap PNBPN menunjukkan terdapat 79 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 13 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 43 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 23 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.57 Terdapat 13 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.
- 3.58 Kasus-kasus tersebut terjadi di 8 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.59 Terdapat 43 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, sebagai berikut
- sebanyak 2 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 11 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 7 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 22 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

- 3.60 Kasus-kasus tersebut terjadi di 15 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.61 Terdapat 23 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, sebagai berikut
- sebanyak 13 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 10 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 3.62 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.63 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kepolisian RI, Polda Jambi, terdapat dana pengamanan bersama Polda Jambi dengan perwakilan BPMIGAS Sumbagsel dikelola tanpa melalui mekanisme APBN dan belum diungkap dalam laporan keuangan sehingga mengakibatkan potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dana pengamanan bersama Polda Jambi - Dinas Perwakilan BPMIGAS Sumbagsel Tahun 2009 s.d. 30 September 2011 senilai Rp4,23 miliar.
 - Di Kementerian Perhubungan, pada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan di Jakarta, terdapat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) mendahului pembayaran PNPB Uang Rambu Tahun 2009 - Mei 2011 pada Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok, Adpel Sunda Kelapa, dan Adpel Kepulauan Seribu. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan kewenangan penerbitan SPB dalam hal agen/pemilik kapal belum melunasi kewajibannya.
 - Di Kementerian Hukum dan HAM, pada Kanwil Kemenkumham Jambi, terdapat penatausahaan buku kas umum bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada beberapa satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi Tahun 2010 dan 2011 tidak sesuai PMK Nomor 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 sehingga mengakibatkan laporan bendahara penerimaan maupun pengeluaran pada satker-satker di lingkungan Kanwil Jambi tidak menyajikan informasi yang lengkap dan akurat serta adanya potensi penyalahgunaan kas yang tinggi.

Penyebab

- 3.64 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan mekanisme pembayaran PNPB pada malam hari atau hari libur dan SOP mengenai pengelolaan dana pengamanan objek vital (pamobvit) belum ada serta Polri belum mengajukan penggunaan langsung atas sebagian pendapatan kepada Menteri Keuangan.

Rekomendasi

- 3.65 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas memberikan sanksi kepada pengelola yang lalai dalam melaksanakan tugas, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar entitas menyusun mekanisme pembayaran PNPB Uang Rambu pada malam hari atau hari libur dan SOP mengenai pengelolaan dana pamobvit serta Polri mengajukan penggunaan langsung atas sebagian pendapatan kepada Menteri Keuangan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.66 Hasil pemeriksaan atas PNPB mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 3.9. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 8 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 9.

Tabel 3.9. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PNPB

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	3	1.215,98
2	Kekurangan Penerimaan	26	11.863,14
3	Administrasi	23	-
4	Ketidakefektifan	4	-
Jumlah		56	13.079,12

- 3.67 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 56 kasus senilai Rp13,07 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan PNPB.

Kerugian Negara (3 kasus senilai Rp1,21 miliar)

- 3.68 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3.69 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.70 Hasil pemeriksaan atas PNPB menunjukkan adanya 3 kasus kerugian negara, yaitu penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,21 miliar.

- 3.71 Kasus-kasus tersebut terjadi di 2 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.72 Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:
- Di Kementerian Perhubungan, Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, yaitu terdapat setoran PNBП Tahun 2010 pada Adpel Kepulauan Seribu senilai Rp507,32 juta yang tidak disetorkan ke Kas Negara karena digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara Penerimaan Tahun 2010. Selain itu terdapat penyalahgunaan PNBП yang dikelola Bendahara Penerimaan Tahun 2009 s.d. Februari 2011 senilai Rp146,57 juta. Hal tersebut mengakibatkan negara kehilangan PNBП senilai Rp653,89 juta.
 - Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas terdapat penggelapan kas pendapatan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN) selama Tahun 2011 sehingga mengakibatkan kas tekor di BBPLKLN senilai Rp562,09 juta berpotensi disalahgunakan dan merugikan negara.
- 3.73 Dari kasus-kasus kerugian negara atas pengelolaan PNBП senilai Rp1,21 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp246,56 juta, yaitu pada Kementerian Perhubungan.

Penyebab

- 3.74 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas serta keinginan bendahara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari penggunaan uang negara.

Rekomendasi

- 3.75 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan entitas memberikan sanksi kepada bendahara yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian negara yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kekurangan Penerimaan (26 kasus senilai Rp11,86 miliar)

- 3.76 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.77 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara. Selain

itu terdapat kasus kekurangan penerimaan berupa penggunaan langsung penerimaan negara, penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.

- 3.78 Hasil pemeriksaan atas PNBP menunjukkan terdapat 26 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp11,86 miliar, yang disajikan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas PNBP

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan			
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	1	1.165,80
2	penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	20	9.905,95
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	2	272,70
4	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	40,00
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	5,15
6	Lain-lain	1	473,54
	Jumlah	26	11.863,14

- 3.79 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.

- 3.80 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Perhubungan, Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan di Jakarta, terdapat kekurangan penerimaan kontribusi jasa pemanduan dan penundaan kapal serta denda keterlambatan selama Tahun 2009 s.d. 2011 dari PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok dan PT Pertamina Tongkang sehingga mengakibatkan penerimaan kontribusi PNBP belum diterima kas negara senilai Rp540,97 juta dan USD681.55 ribu.
- Di Kementerian Luar Negeri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Cape Town Afrika Selatan, terdapat penggantian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah Afrika Selatan atas pelaksanaan belanja barang dan jasa periode Maret 2011 – Oktober 2012 senilai Rp510,98 juta yang belum

diterima sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan PNBPNon Fungsional dari restitusi PPN atas transaksi belanja pengadaan barang dan jasa KJRI Cape Town Afslenilai Rp510,98 juta.

- Di Kementerian Luar Negeri, KJRI Hongkong di Republik Rakyat Tiongkok, terdapat PNBPNon Fungsional dan PNBPNon Fungsional KJRI Hongkong yang belum ditransfer ke rekening PNBPNon Fungsional Kementerian Luar Negeri sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan negara yang berasal dari PNBPNon Fungsional KJRI Hongkong senilai Rp428,30 juta.
- Di Kementerian Luar Negeri, KBRI Amman di Yordania, terdapat PNBPNon Fungsional Tahun 2011 dan 2012 senilai USD36.63 ribu eq. Rp351,64 juta pada KBRI Amman belum disetor ke kas negara sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan negara yang berasal dari PNBPNon Fungsional KBRI Amman senilai Rp351,64 juta.

- 3.81 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan PNBPNon Fungsional senilai Rp11,86 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp361,10 juta, yaitu oleh Kementerian Luar Negeri senilai Rp351,64 juta dan Kementerian Perhubungan senilai Rp9,46 juta.

Penyebab

- 3.82 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja. Selain itu permasalahan tersebut disebabkan perbedaan pendapat mengenai terminologi jasa pemanduan dan jasa penundaan antara Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo II.

Rekomendasi

- 3.83 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu BPK juga merekomendasikan agar Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan PT Pelindo II terkait kekurangan pembayaran.

Administrasi (23 kasus)

- 3.84 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 3.85 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll serta penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.86 Hasil pemeriksaan atas PNBП menunjukkan terdapat 23 kasus penyimpangan administrasi, sebagai berikut
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
 - sebanyak 9 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain; dan
 - sebanyak 12 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.87 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.88 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, terdapat PNBП Tahun 2010 dan 2011 pada beberapa satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi terlambat disetor sehingga mengakibatkan negara terlambat menerima PNBП Tahun 2010 dan 2011 dari Lapas Jambi dan Kanim Kuala Tungkal.
 - Di Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi Banten dan Sumatera Utara, terdapat barang rampasan dan uang rampasan Tahun 2011 s.d. 31 Mei 2012 yang sudah lama memperoleh kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya mengakibatkan penerimaan negara yang berasal dari hasil lelang barang rampasan dan uang rampasan senilai Rp2,86 miliar terlambat diterima oleh negara dan barang rampasan berisiko rusak serta turun nilai ekonomisnya.
 - Di Kementerian Perhubungan, Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan di Jakarta, terdapat PNBП jasa kenavigasian selama Tahun 2011 yang tidak langsung disetorkan ke kas negara atau mengalami keterlambatan antara 2 s.d. 27 hari sehingga mengakibatkan PNBП Jasa Kenavigasian senilai Rp3,14 miliar tidak diterima negara tepat waktu.

Penyebab

- 3.89 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan dan tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, anggaran yang tersedia untuk proses pelelangan kurang memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.90 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai, memerintahkan penyetoran PNPB ke kas negara sesuai ketentuan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan di unit kerjanya masing-masing.

Ketidakefektifan (4 kasus)

- 3.91 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.92 Hasil pemeriksaan atas PNPB menunjukkan adanya 4 kasus ketidakefektifan, berupa fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.93 Kasus-kasus tersebut terjadi di 2 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.94 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi Banten, penyelesaian uang pengganti per 31 Mei 2012 senilai Rp129,07 miliar dan denda senilai Rp1,35 miliar pada empat Kejari yaitu Tangerang, Tigaraksa, Cilegon dan Serang belum optimal sehingga mengakibatkan potensi penerimaan negara senilai Rp130,42 miliar belum dapat diterima dan dimanfaatkan oleh negara.
 - Di Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi Banten, terdapat pelaksanaan pengelolaan pelanggaran lalu lintas/tilang belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981, Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI dan Bank Rakyat Indonesia Nomor B-319/E/VII/1993, Nomor Pol.Kep/09/VII/1993, B-299/E/7/1993, dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-404/E/6/1994. Hal-hal yang belum sesuai ketentuan tersebut seperti Kejari tidak memiliki rekening giro I dan giro III, tidak menerima tembusan surat pengantar tilang dari kepolisian, dan

jaksa tidak selalu hadir dalam sidang perkara tilang serta tembusan bukti perkara tilang tidak didistribusikan secara tertib setelah perkara lelang dieksekusi. Hal tersebut mengakibatkan perkara pelanggaran lalu lintas tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh pihak kejaksaan.

Penyebab

- 3.95 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, kurang optimal dalam melakukan upaya penyitaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan, serta kurangnya koordinasi antar instansi dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing.

Rekomendasi

- 3.96 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian. Selain itu entitas agar lebih optimal dalam melaksanakan eksekusi uang pengganti dan meningkatkan koordinasi antar instansi yang lebih intensif.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 3.97 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan daerah pada 45 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas 16 pemerintah provinsi dan 29 pemerintah kabupaten/kota.
- 3.98 Cakupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah adalah senilai Rp20,86 triliun dari realisasi anggaran pengelolaan pendapatan daerah senilai Rp28,93 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp103,55 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.99 Secara umum tujuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait pengelolaan pendapatan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran pengelolaan pendapatan daerah telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 3.100 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 3.101 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.102 Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 3.103 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan terdapat 362 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 25 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 270 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 67 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.11. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 10.

Tabel 3.11. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	16	9	25
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	71	199	270
3	Struktur Pengendalian Intern	15	52	67
	Jumlah	102	260	362

- 3.104 Terdapat 25 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan				
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	7	9
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	1	2
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	11	1	12
4	Sistem informasi akuntasi dan pelaporan belum didukung SDM memadai	2	-	2
	Jumlah	16	9	25

- 3.105 Kasus-kasus tersebut terjadi di 15 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.
- 3.106 Terdapat 270 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	7	9
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	19	49	68
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5	15	20
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	3	3	6
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	42	124	166
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	1	1
	Jumlah	71	199	270

- 3.107 Kasus-kasus tersebut terjadi di 43 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.
- 3.108 Terdapat 67 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern				
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9	42	51
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	9	13
3	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	1	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	-	2
	Jumlah	15	52	67

- 3.109 Kasus-kasus tersebut terjadi di 28 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.
- 3.110 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Sulawesi Utara, pada Dinas Pendapatan Daerah terdapat kelemahan pengendalian atas prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pengelolaan aplikasi Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat). Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya antar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat di wilayah Sulawesi Utara tidak terkoneksi dalam jaringan, tidak terdapat *file history* pada aplikasi Samsat dan tidak dilakukan *backup* data, pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor belum diimplementasikan secara optimal, serta tidak seluruh transaksi penetapan PKB dan BBNKB terekam dalam *database*. Hal tersebut mengakibatkan akurasi dan validitas *database* aplikasi Samsat kurang dapat diandalkan, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak mengetahui/tidak memperoleh data mutakhir tentang jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak serta tidak dapat secara persis berapa potensi penerimaan PKB dan BBNKB.
 - Di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat tunggakan pembayaran sewa toko/kios, bak dan los dan tunggakan biaya tebusan pasar selama Tahun 2009 s.d. Semester I 2012 masing-masing senilai Rp4,94 miliar dan Rp1,72 miliar yang telah melebihi umur kadaluarsa penagihan. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak diterimanya pendapatan/penerimaan dari tunggakan yang melebihi batas umur kadaluarsa.

- Di Provinsi Bali, pada Dinas Pendapatan (Dispenda) belum sepenuhnya mengenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pendaftaran dan pembayaran PKB dan BBNKB oleh Wajib Pajak (WP) Tahun 2012 (s.d. Agustus 2012) sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan daerah senilai Rp4,38 miliar dari sanksi denda keterlambatan pembayaran PKB dan bunga keterlambatan pembayaran BBNKB.
- Di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, uang jaminan pembongkaran reklame insidentil (bebas pajak) Tahun 2012 (s.d Oktober) senilai Rp2,09 miliar tidak pernah dipungut karena tidak pernah ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sedangkan dasar pengenaan uang jaminan bongkar untuk reklame insidentil adalah SKPD. Permasalahan tersebut berpotensi membebani pemerintah daerah jika reklame tersebut tidak dibongkar oleh pemasang reklame.
- Di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, terdapat keterlambatan sosialisasi dan pemberitahuan kenaikan tarif PPJ oleh pihak Pemerintah Kabupaten Ciamis, kepada masyarakat dan PT PLN, mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Ciamis kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan sejak bulan Maret s.d. Mei 2012 senilai Rp1,09 miliar.
- Di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, terdapat reklame yang sudah terpasang, namun tidak memiliki ijin pemasangan dan belum memiliki ketetapan pajak serta belum dilakukan penertiban/pembongkaran sehingga terdapat potensi pendapatan pajak reklame yang belum dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten minimal senilai Rp226,89 juta.

Penyebab

- 3.111 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan serta berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan entitas terlambat melakukan sosialisasi kenaikan tarif serta kurang optimal dalam merancang dan menerapkan pengendalian atas sistem informasi, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Rekomendasi

- 3.112 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas memberikan sanksi kepada pengelola yang lalai dalam melaksanakan tugas, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan koordinasi dengan pihak yang terkait. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar melakukan sosialisasi kenaikan tarif sejak dini dan melakukan pembenahan secara menyeluruh atas aplikasi sistem informasi Samsat dan melakukan rekonsiliasi data secara periodik dengan pihak Kepolisian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.113 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 3.15. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 11 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 12.

Tabel 3.15. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/ Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah	3	332,98	5	950,72	8	1.283,70
2	Potensi Kerugian Daerah	1	1.611,82	7	9.801,24	8	11.413,06
3	Kekurangan Penerimaan	23	21.735,89	198	69.060,39	221	90.796,28
4	Administrasi	20	-	43	--	63	--
5	Ketidakefektifan	9	-	5	60,91	14	60,91
	Jumlah	56	23.680,69	258	79.873,26	314	103.553,95

- 3.114 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 314 kasus senilai Rp103,55 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah.

Kerugian Daerah (8 kasus senilai Rp1,28 miliar)

- 3.115 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3.116 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.117 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain kasus kerugian daerah.
- 3.118 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 8 kasus senilai Rp1,28 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp128,97 juta. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah disajikan dalam Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Daerah							
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	204,01	5	950,72	7	1.154,73
2	Lain-lain	1	128,97	-	-	1	128,97
	Jumlah	3	332,98	5	950,72	8	1.283,70

3.119 Kasus-kasus tersebut terjadi di 7 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.

3.120 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terdapat penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2007 dan 2010 yang tidak disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp436,50 juta.
- Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, terdapat penyalahgunaan setoran pajak daerah Tahun 2011 dan 2012 yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak dapat segera memanfaatkan pajak yang terlambat disetorkan dan terdapat penerimaan pajak yang digunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp361,18 juta.
- Di Provinsi Maluku Utara, terdapat penerimaan pajak alat berat Tahun 2011 dan 2012 yang telah diterima oleh pemungut pajak tetapi tidak dicatat dan disetorkan ke Kas Daerah melainkan digunakan secara pribadi dan untuk keperluan operasional kantor sehingga mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp141,43 juta.
- Di Provinsi Sulawesi Utara, pada kantor Samsat Tahuna terdapat perbedaan antara jumlah yang disetorkan sesuai data Surat Tanda Setoran dengan jumlah yang diterima dalam rekening kas daerah pada Bank Sulut selama 1 Januari s.d. 31 Agustus 2012 sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp128,97 juta karena digunakan untuk kepentingan bendahara.

3.121 Dari kasus-kasus kerugian daerah atas pengelolaan pendapatan daerah senilai Rp1,28 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp880,50 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran tersebut di antaranya Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara senilai Rp436,50 juta, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat senilai Rp361,18 juta, dan Provinsi NTB senilai Rp62,58 juta.

Penyebab

- 3.122 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 3.123 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya, mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada bendahara.

Potensi Kerugian Daerah (8 kasus senilai Rp11,41 miliar)

- 3.124 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.125 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.
- 3.126 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan terdapat 8 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp11,41 miliar, yang disajikan dalam Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Daerah							
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	-	-	7	9.801,24	7	9.801,24
2	Lain-lain	1	1.611,82	-	-	1	1.611,82
	Jumlah	1	1.611,82	7	9.801,24	8	11.413,06

- 3.127 Kasus-kasus tersebut terjadi di 6 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.

3.128 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, terdapat piutang angsuran biaya konstruksi kios pada 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) per 30 September 2012 senilai Rp8,13 miliar yang penyelesaiannya berlarut-larut sehingga mengakibatkan pendapatan angsuran biaya konstruksi kios/los pasar senilai Rp8,13 miliar tertunda pemanfaatannya.
- Di Provinsi DKI Jakarta, pada UP Perparkiran Dinas Perhubungan, terdapat pekerjaan pembangunan jaringan sistem *gate* lingkungan Pasar Baru Tahun 2012 yang telah dinyatakan selesai dengan persentase bobot pekerjaan 72,26021% dan telah dibayarkan senilai Rp1,83 miliar. Pekerjaan dihentikan karena penolakan warga atas pemasangan pos *gate* parkir di lingkungan pemukiman warga. Atas pembayaran tersebut, rekanan telah mengembalikan ke kas daerah senilai Rp225 juta, sehingga sisa pembayaran senilai Rp1,61 miliar berpotensi merugikan keuangan daerah karena pekerjaan belum terintegrasi menjadi sistem jaringan yang dapat difungsikan.
- Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, terdapat piutang pajak daerah Tahun 2007 s.d. Tahun 2012 (s.d. 10 Agustus) masih belum tertagih senilai Rp878,11 juta sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan pendapatan dari piutang pajak daerah minimal senilai Rp878,11 juta.
- Di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat pemberian pinjaman pada Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok nelayan sejak Tahun 2007 yang pembayaran angsuran/cicilan tidak sesuai kontrak sehingga mengakibatkan pendapatan daerah yang berasal dari cicilan alat bantu belum diterima dan berpotensi tidak tertagih senilai Rp609,69 juta.

Penyebab

- 3.129 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena para pelaksana belum optimal dalam melakukan penagihan, pelampauan wewenang Kepala UP Perparkiran untuk menggunakan dana swadana sebagai belanja modal, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

- 3.130 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar memberi sanksi kepada pelaksana dan memerintahkan pimpinan entitas untuk lebih tegas dan intensif dalam upaya penagihan piutang daerah. Selain itu, BPK merekomendasikan agar pimpinan entitas meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Kepala UP Perparkiran mempertanggungjawabkan pembayaran kegiatan pekerjaan sistem *gate*.

Kekurangan Penerimaan (221 kasus senilai Rp90,79 miliar)

- 3.131 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.132 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, dan penggunaan langsung penerimaan daerah. Kekurangan penerimaan juga meliputi pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 3.133 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan terdapat 221 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp90,79 miliar, yang disajikan dalam Tabel 3.18.

Tabel 3.18. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan							
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas daerah	--	-	1	8,39	1	8,39
2	Penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas daerah	20	15.007,54	168	62.396,57	188	77.404,11
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	-	-	18	1.266,31	18	1.266,31
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3	6.728,35	9	5.136,78	12	11.865,13
5	Lain-lain	-	-	2	252,34	2	252,34
	Jumlah	23	21.735,89	198	69.060,39	221	90.796,28

- 3.134 Kasus-kasus tersebut terjadi di 35 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.
- 3.135 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan terdapat tunggakan pajak restoran dan tunggakan pajak mineral bukan logam

dan batuan Tahun 2011 – 2012 dan belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sehingga mengakibatkan pendapatan daerah senilai Rp11,64 miliar belum dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

- Di Provinsi Maluku Utara, terdapat Pajak Air Permukaan dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) Tahun 2010 dan 2011 kurang ditetapkan dan diterima sehingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara kehilangan potensi pendapatan Pajak Air Permukaan dari PT NHM senilai Rp6,72 miliar.
- Di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Tahun 2011 dan 2012 kurang ditetapkan senilai Rp6,14 miliar serta sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp6,14 miliar.
- Di Provinsi Gorontalo, terdapat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012 (s.d. Agustus) senilai Rp5,25 miliar pada Unit Pelaksana Teknis Badan di wilayah Provinsi Gorontalo sehingga mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor belum dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Dinas Perpajakan Daerah terdapat pajak yang belum disetor Januari - Agustus 2012 sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp3,30 miliar.

- 3.136 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan daerah senilai Rp90,79 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp4,32 miliar. Entitas yang telah melakukan penyetoran tersebut di antaranya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat senilai Rp3,53 miliar; Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat senilai Rp240,69 juta; dan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY senilai Rp229,31 juta.

Penyebab

- 3.137 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu disebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

- 3.138 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pelaksana kegiatan dan bendaharawan.

Administrasi (63 kasus)

- 3.139 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.140 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah. Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, serta penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.141 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan terdapat 63 kasus penyimpangan administrasi, yang disajikan dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Total
Penyimpangan Administrasi				
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah	2	-	2
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	-	2	2
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	13	13	26
4	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5	28	33
	Jumlah	20	43	63

- 3.142 Kasus-kasus tersebut terjadi di 35 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.
- 3.143 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 terlambat disetor ke kas daerah berkisar antara 1 s.d. 60 hari kerja, yang mengakibatkan penerimaan senilai Rp3,87 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

- Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat penyetoran penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2011 ke kas daerah oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengalami keterlambatan antara 1 – 3 bulan dari ketentuan sehingga mengakibatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PPJ senilai Rp2,27 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk pembangunan daerah.
- Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, terdapat keterlambatan penyetoran penerimaan retribusi Tahun 2011 – 2012 senilai Rp1,66 miliar ke kas daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkisar antara 2 – 30 hari sejak tanggal penerimaan sehingga menimbulkan risiko kehilangan dan penyalahgunaan penerimaan daerah.

Penyebab

- 3.144 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, para pelaksana lalai dalam pelaksanaan tugas dan kurang mematuhi ketentuan dalam melakukan penyetoran pendapatan daerah serta belum memiliki peraturan pelaksanaan atau SOP dari peraturan daerah.

Rekomendasi

- 3.145 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar memberi teguran/sanksi kepada pejabat pelaksana yang lalai, memerintahkan penyetoran penerimaan sesuai ketentuan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan menyusun peraturan pelaksanaan atau SOP dari peraturan daerah.

Ketidakefektifan (14 kasus senilai Rp60,91 juta)

- 3.146 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.147 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi pelayanan kepada masyarakat tidak optimal dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.148 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan terdapat 14 kasus ketidakefektifan senilai Rp60,91 juta yang disajikan dalam Tabel 3.20.

Tabel 3.20. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan							
1	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5	-	-	-	5	-
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.	4	-	5	60,91	9	60,91
	Jumlah	9	-	5	60,91	14	60,91

3.149 Kasus-kasus tersebut terjadi di 7 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.

3.150 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terdapat proses hibah 20 bus milik Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Pemerintah Provinsi DIY yang belum selesai sampai dengan Tahun 2012 sehingga mengakibatkan potensi bus-bus milik Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat beroperasi sehingga pelayanan angkutan umum tidak dapat berlangsung optimal. Selain itu terdapat 20 bus milik Pemerintah Provinsi DIY yang dijadikan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT AMI tetapi belum dioperasikan sehingga terjadi penurunan kualitas bus-bus tersebut karena tidak segera dioperasikan.
- Di Provinsi Gorontalo, terdapat potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat Tahun 2012 yang belum dilakukan penetapan karena kesulitan dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, pendataan dan penetapan pajak. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pendapatan daerah yang diperoleh dari PKB dan BBN KB Alat Berat

Penyebab

3.151 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan, pimpinan entitas belum menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan melakukan pembahasan dokumen pengajuan hibah dengan DPRD, serta sosialisasi peraturan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan kepada wajib pajak.

Rekomendasi

- 3.152 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar segera mempercepat proses hibah bus, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan sosialisasi peraturan kepada wajib pajak serta meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 3.153 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 4

Pelaksanaan Belanja

- 4.1 Pelaksanaan belanja meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat/daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
- 4.2 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan belanja TA 2010 s.d. 2012 atas 248 objek pemeriksaan, terdiri atas 63 objek pemeriksaan kementerian/lembaga (KL), 27 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 158 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota. Pemeriksaan meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah.
- 4.3 Pemeriksaan terhadap pelaksanaan belanja terdiri dari 2 sub tema, yaitu sebagai berikut.
- Belanja pemerintah pusat; dan
 - Belanja pemerintah daerah.
- 4.4 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub tema pemeriksaan pelaksanaan belanja disajikan pada uraian berikut.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

- 4.5 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah memeriksa belanja pemerintah pusat TA 2009 s.d. 2012. Pemeriksaan dilakukan pada 20 kementerian/lembaga yang meliputi 63 objek pemeriksaan.
- 4.6 Cakupan pemeriksaan belanja pemerintah pusat pada 20 KL adalah senilai Rp8,92 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp21,79 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp103,07 miliar merupakan temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.7 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan

- pelaksanaan kegiatan yang terkait pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 4.8 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 4.9 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.10 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja adalah untuk menilai apakah SPI atas pelaksanaan anggaran belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 4.11 Hasil evaluasi atas SPI belanja menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta SOP yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 4.12 Hasil evaluasi SPI terhadap pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat 154 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 31 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 76 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 47 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 13.

- 4.13 Terdapat 31 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebagai berikut
- sebanyak 18 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 12 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
- 4.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di 23 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.
- 4.15 Terdapat 76 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, sebagai berikut
- sebanyak 33 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 3 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan
 - sebanyak 20 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 9 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan;
 - sebanyak 10 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
- 4.16 Kasus-kasus tersebut terjadi di 37 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.
- 4.17 Terdapat 47 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, sebagai berikut
- sebanyak 32 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 13 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
 - sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
 - sebanyak 1 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

4.18 Kasus-kasus tersebut terjadi di 25 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.

4.19 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kepolisian RI, pada Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, terdapat tunggakan/utang langganan listrik Tahun 2010 senilai Rp1,20 miliar dan Tahun 2011 senilai Rp1,51 miliar tidak diungkapkan dalam akun kewajiban jangka pendek pada Laporan Keuangan Polda Jambi sehingga utang biaya langganan listrik kepada PT PLN akan mempengaruhi pembebanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berikutnya.
- Di TNI AD, pada pengembangan fasilitas dan pemeliharaan bangunan TNI AD terdapat perencanaan yang tidak maksimal atas pembangunan Yonkav Bengkayang Kodam XII/Tpr dan Yonkav Bulungan Kodam VI/MLw Tahun 2012 sehingga pelaksanaan pekerjaan senilai Rp22,07 miliar belum dapat terlaksana yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan Yonkav Bengkayang Kodam XII/Tpr dan Yonkav Bulungan Kodam VI/MLw terlambat sehingga pemanfaatan hasil pekerjaan pembangunan sesuai dengan program menjadi tertunda.
- Di Kementerian Luar Negeri, pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman di Yordania terdapat pengadaan aset senilai Rp458,14 juta belum dicatat dalam laporan barang milik negara (BMN) KBRI Amman sehingga mengakibatkan Laporan BMN dan Laporan Keuangan KBRI Amman belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan terdapat kurang saji nilai aset dalam Laporan BMN KBRI Amman per 30 Juni 2012 senilai Rp458,14 juta.
- Di Badan Pertanahan Nasional, terdapat pelaporan realisasi keuangan dan realisasi fisik bidang kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) TA 2010 dan 2011 dalam Aplikasi Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan (SKMPP) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur belum berdasarkan data yang memadai mengakibatkan pelaporan kegiatan Prona dalam aplikasi SKMPP berupa realisasi fisik (bidang) dan realisasi keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (tidak akurat).

Penyebab

4.20 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

4.21 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan perencanaan

dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP. Selain itu, BPK merekomendasikan agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.22 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 4.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 14 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 15.

Tabel 4.1. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	212	41.071,81
2	Potensi Kerugian Negara	14	28.574,43
3	Kekurangan Penerimaan	49	19.734,46
4	Administrasi	131	-
5	Ketidakhematan	25	9.106,73
6	Ketidakefisienan	1	32,97
7	Ketidakefektifan	26	4.557,43
	Jumlah	458	103.077,83

- 4.23 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 458 kasus senilai Rp103,07 miliar, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 20 kementerian/lembaga (KL).

Kerugian Negara (212 kasus senilai Rp41,07 miliar)

- 4.24 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 4.25 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4.26 Kasus-kasus kerugian negara yaitu belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang,

dan pemahalan harga (*mark up*). Kerugian negara juga meliputi penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan lain-lain kasus kerugian negara.

- 4.27 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 212 kasus senilai Rp41,07 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 65 kasus senilai Rp12,41 miliar. Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Negara			
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	10	8.135,44
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	14	4.989,40
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	48,08
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	55	8.842,91
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume dan/atau barang	55	4.446,93
6	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	10	7.400,88
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	94,12
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	13	1.046,65
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	10	1.766,46
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	12	1.403,84
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	29	2.863,63
12	Lain-lain	1	33,47
	Jumlah	212	41.071,81

- 4.28 Kasus-kasus tersebut terjadi di 53 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.

- 4.29 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Agama, pada Ditjen Bimas Islam terdapat pemahalan harga kontrak (*mark up*) atas pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun 2011 sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara dari pemahalan harga kontrak penggandaan Kitab Suci senilai Rp6,92 miliar, terdiri atas penggandaan Kitab Suci APBN TA 2011 senilai Rp1,10 miliar dan APBN-P TA 2011 senilai Rp5,82 miliar.

- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat bantuan langsung kegiatan pengembangan pusat pelatihan pemuda dan mahasiswa (P3M) dan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan TA 2011 senilai Rp1,50 miliar tidak dilaksanakan oleh penerima serta senilai Rp500,00 juta tidak dapat diyakini keberadaannya sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara minimal senilai Rp2,00 miliar.
 - Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas selama Semester I Tahun 2012 yang diragukan kebenarannya dan berindikasi adanya kerugian negara senilai Rp1,90 miliar sehingga mengakibatkan negara telah mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya senilai Rp1,90 miliar.
 - Di TNI AU, pada Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI AU terdapat kekurangan volume pekerjaan atas paket pekerjaan pengembangan fasilitas konstruksi (bangfas) belanja modal terpusat Tahun 2011 senilai Rp1,117 miliar dan pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp43,80 juta sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan senilai Rp1,16 miliar.
 - Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Kapal Purse Seine 10-30 GT Tahun 2012 pada Kabupaten Halmahera Timur diindikasikan fiktif sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp795,22 juta.
 - Di TNI AD, pada Kodam IX Udayana terdapat pembayaran *fee management* Tahun 2011 dan 2012 kepada pengelola Rumah Sakit Tk. III Denpasar yang melebihi ketentuan Surat Telegram Direktur Kesehatan Angkatan Darat Nomor ST/138/2010 yang menyatakan besarnya *fee management* maksimal 3% dari penerimaan bruto sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran *fee management* senilai Rp259,12 juta kepada Pengelola Rumah Sakit Tk. III Denpasar.
- 4.30 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 72 kasus senilai Rp10,05 miliar dari seluruh kasus kerugian negara pada belanja pemerintah pusat pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum tersebut di antaranya merupakan 40 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp7,435 miliar, sebanyak 22 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp2,082 miliar, dan sebanyak 5 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp207,03 juta. Dari temuan belanja modal untuk fasilitas umum senilai Rp10,05 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp1,47 miliar.
- 4.31 Dari kasus-kasus kerugian negara atas belanja pemerintah pusat senilai Rp41,07 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp3,77 miliar, di antaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM senilai Rp1,68 miliar, Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp508,07 juta, dan TNI AU senilai Rp429,27 juta.

Penyebab

- 4.32 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, dan penerima barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang yang diterima. Selain itu, pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai kondisi senyatanya, lalai dalam pelaksanaan tugas dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.33 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (14 kasus senilai Rp28,57 miliar)

- 4.34 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 4.35 Kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset tidak diketahui keberadaannya, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara.
- 4.36 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp28,57 miliar yang disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Negara			
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	11	28.567,03
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	--
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	7,40
4	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1	--
Jumlah		14	28.574,43

4.37 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.

4.38 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Agama, pada Ditjen Bimas Islam terdapat pemahalan harga kontrak (*mark up*) atas pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun 2012, tetapi pemahalan harga tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian Negara dari pemahalan harga atas penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku-buku Keagamaan APBN TA 2012 senilai Rp21,23 miliar.
- Di Kementerian Keuangan, terdapat penetapan pencairan uang muka kepada rekanan atas pekerjaan pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran uang muka senilai Rp4,07 miliar, tetapi pembayaran tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya.
- Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan kapal perikanan Inka Mina Tahun 2012 tetapi kekurangan volume kontrak tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp849,10 juta.
- Di Kementerian Perhubungan, pada Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat terdapat kelebihan perhitungan pekerjaan rehabilitasi terminal Tipe A Pakupatan Serang Tahun 2012, tetapi kelebihan perhitungan tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp532,49 juta.
- Di Kementerian Perhubungan, pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat pengadaan tiang pancang baja yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Pantoloan Tahun 2012 sehingga mengakibatkan potensi kerusakan struktur atas dermaga (*upper structure*). Selain itu terdapat tiang pancang yang tidak dapat digunakan senilai Rp828,94 juta serta potensi kelebihan pembayaran atas selisih berat pengadaan tiang pancang baja senilai Rp3,24 juta.
- Di TNI Angkatan Udara (AU), pada Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI AU terdapat pelaksanaan fisik pekerjaan pengembangan fasilitas konstruksi (bangfas) belanja modal terpusat Tahun 2012 yang tidak sesuai kontrak, tetapi kekurangan fisik pekerjaan tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran proyek Tahun 2012 kepada rekanan atas kekurangan volume pekerjaan minimal senilai Rp312,75 juta.

- 4.39 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 10 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp7,70 miliar dari seluruh kasus potensi kerugian negara pada belanja pemerintah pusat pada Semester II Tahun 2012. Dari temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum senilai Rp7,70 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp87,69 juta.
- 4.40 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara atas belanja pemerintah pusat senilai Rp28,57 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp87,69 juta, yaitu di Kejaksaan RI senilai Rp66,39 juta, dan TNI AU senilai Rp21,30 juta.

Penyebab

- 4.41 Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.42 Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan.

Kekurangan Penerimaan (49 kasus senilai Rp19,73 miliar)

- 4.43 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.44 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 4.45 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 49 kasus senilai Rp19,73 miliar, yang disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan			
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	26	15.560,86
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	16	3.406,12
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	2	183,27
4	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	2	152,64
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3	431,57
Jumlah		49	19.734,46

4.46 Kasus-kasus tersebut terjadi di 23 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.

4.47 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kapal perikanan Inka Mina >30 *gross ton* TA 2010 s.d. 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan di delapan provinsi belum dikenakan denda sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp1,03 miliar.
- Di Kementerian Agama, pada Ditjen Bimas Islam terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas tiga item pekerjaan penggandaan kitab suci dan buku-buku keagamaan APBN TA 2012 yang belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp848,98 juta.
- Di Kementerian Kesehatan, pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Kementerian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan alat kesehatan yang belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara Tahun 2012 senilai Rp668,13 juta.
- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat pajak yang belum dipungut dan disetor ke kas negara oleh *Indonesia SEA Games Organizing Committee* (INASOC) sehingga mengakibatkan penerimaan negara dari pajak untuk kegiatan pelaksanaan SEA Games XXVI kurang diterima senilai Rp423,90 juta.

- Di TNI AD, pada pengembangan fasilitas dan pemeliharaan bangunan terdapat kekurangan pemungutan pajak atas kegiatan pembangunan yang dilakukan Tahun 2011 dan 2012 oleh Kodam VII/Wrb dan Kopassus sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan yang diterima oleh negara untuk TA 2011 melalui PPh Pasal 4 ayat (2) senilai Rp313,37 juta. Selain itu terdapat sanksi denda keterlambatan yang belum ditarik atas pekerjaan pembangunan fasilitas dan bangunan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan senilai Rp77,14 juta.
 - Di TNI AD, pada Kodam IX Udayana terdapat kontribusi pengelolaan apotik, laboratorium dan praktek dokter pada Detasemen Kesehatan Wilayah (Denkesyah) 09.04.01 Kupang Tahun 2011 dan 2012 yang tidak disetor ke kas negara melainkan dikelola Bintara Administrasi Logistik (Baminlog) Denkesyah Kupang sehingga mengakibatkan Dana Yanmasum yang digunakan Denkesyah 09.04.01 Kupang senilai Rp112,64 juta rawan terjadi penyimpangan dan pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 4.48 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 8 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas negara senilai Rp377,10 juta dari seluruh kasus kekurangan penerimaan pada belanja pemerintah pusat pada Semester II Tahun 2012. Dari temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum senilai Rp377,10 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp35,46 juta.
- 4.49 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas belanja pemerintah pusat senilai Rp19,73 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp2,87 miliar, di antaranya adalah TNI AU senilai Rp1,68 miliar, Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp600,19 juta, dan TNI AD senilai Rp419,12 juta.

Penyebab

- 4.50 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.51 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Administrasi (131 kasus)

- 4.52 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 4.53 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara.
- 4.54 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 4.55 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 131 kasus, sebagai berikut
- sebanyak 12 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 56 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
 - sebanyak 5 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 25 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 3 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
 - sebanyak 4 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 13 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;

- sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
 - sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 3 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara;
 - sebanyak 2 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan administrasi lainnya.
- 4.56 Kasus-kasus tersebut terjadi di 46 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.
- 4.57 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Keuangan, terdapat pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari Tahun 2012 yang dilaksanakan mendahului kontrak perjanjian pekerjaan maupun revisi DIPA/Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) sehingga mengakibatkan ketidakpastian mekanisme, spesifikasi pekerjaan, hak maupun kewajiban, waktu pelaksanaan, dan besaran biaya yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa.
 - Di Kementerian Perumahan Rakyat, terdapat pembangunan rusunawa *multi years* 2010 - 2011, fungsionalisasi rusunawa Tahun 2011, pembangunan rusun Tahun 2011, dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Tahun 2011 yang masih belum didukung *Final Hand Over* sehingga mengakibatkan kepemilikan aset rusunawa, rumah khusus dan PSU menjadi tidak jelas serta terancam terbengkalai.
 - Di TNI AD, pada Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD terdapat pengeluaran BBM intensitas berupa MT-88 dan HSD Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Juni) tidak didukung dengan bukti yang valid sehingga mengakibatkan pengeluaran biaya bahan bakar minyak senilai Rp2,67 miliar belum dapat dipertanggungjawabkan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/15/M/XI/2000.

Penyebab

- 4.58 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan anggaran, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan langsung.

Rekomendasi

- 4.59 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan (25 kasus senilai Rp9,10 miliar)

- 4.60 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 4.61 Kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 4.62 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa terdapat 25 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp9,10 miliar yang sebagai berikut
- sebanyak 1 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan; dan
 - sebanyak 24 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp9,10 miliar.
- 4.63 Kasus-kasus tersebut terjadi di 17 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.
- 4.64 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat biaya untuk penyewaan *personal computer* (PC), laptop, dan *walkie talkie* yang terlalu mahal dibandingkan dengan harga beli alat tersebut pada pekerjaan pendukung *timing* dan *scoring* Sea Games XXVI di Jakarta dan Palembang Tahun 2011 sehingga mengakibatkan ketidakhematan penggunaan anggaran pemerintah dalam penyewaan alat-alat untuk menunjang pelaksanaan *timing* dan *scoring* senilai Rp3,60 miliar.
 - Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada Sekretariat Jenderal terdapat pembayaran honor untuk pejabat penanggung jawab pengelola keuangan, tim SAI dan tim pelaksana kegiatan yang melebihi ketentuan SBU TA 2011 dan TA 2012 sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas kelebihan pembayaran honor senilai Rp925,75 juta.
 - Di Kementerian Agama, pada Ditjen Bimas Islam terdapat penyusunan HPS yang tidak dikalkulasikan secara keahlian sehingga terdapat selisih yang signifikan antara RAB kontrak dengan harga yang dibayarkan rekanan

kepada TVRI sesuai *media order* Tahun 2010 dan 2011 yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp642,00 juta.

- Di Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat pembayaran honorarium penyelenggaraan sidang umum *Asean Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) ke-33 Tahun 2012 senilai Rp269,11 juta yang tidak sesuai dengan indeks honor kegiatan DPR RI yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan standar biaya 2012 sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp269,11 juta.
- Di TNI AD, pada Kodiklat TNI AD terdapat realisasi belanja barang untuk mendukung operasional pendidikan Tahun 2011 dan 2012 di lingkungan Pusat Pendidikan Ajunan Jenderal (Pusdikajen) dan Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran sehingga mengakibatkan beban anggaran bertambah senilai Rp360,97 juta.

Penyebab

- 4.65 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana dalam menyusun HPS dan melaksanakan kegiatan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, entitas kurang cermat merencanakan kegiatan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.66 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefisienan (1 kasus senilai Rp32,97 juta)

- 4.67 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 4.68 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat satu kasus ketidakefisienan, yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp32,97 juta.
- 4.69 Kasus tersebut terjadi di TNI AL, pada Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) terdapat pemesanan beras Tahun 2011 pada Kobangdikal melebihi standar kebutuhan senilai Rp32,97 juta mengakibatkan pengeluaran atas biaya pembelian beras Tahun 2011 senilai Rp32,97 juta belum dipertanggungjawabkan.

Penyebab

- 4.70 Kasus ketidakefisienan tersebut terjadi karena pelaksana kurang cermat dalam membeli kuantitas beras sesuai standar kebutuhan sesungguhnya.

Rekomendasi

- 4.71 Terhadap kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar pejabat terkait bekerja lebih cermat dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan bahan makanan yang dibeli.

Ketidakefektifan (26 kasus senilai Rp4,55 miliar)

- 4.72 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 4.73 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, serta fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 4.74 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan 26 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp4,55 miliar, yang disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan			
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3	111,68
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	140,00
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	14	3.293,78
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	392,15
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4	619,82
	Jumlah	26	4.557,43

4.75 Kasus-kasus tersebut terjadi di 21 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.

4.76 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Agama, pada Ditjen Bimas Islam terdapat 22.151 eksemplar Kitab Suci Al Qur'an senilai Rp697,75 juta hasil penggandaan Tahun 2011 dan 2012 belum tersalurkan dan masih tersimpan di 13 Kanwil Kemenag Provinsi sehingga mengakibatkan hasil penggandaan Kitab Suci APBN-P TA 2011 dan TA 2012 belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaannya.
- Di TNI AL, pada Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan terdapat perbedaan jumlah orang pada bukti pembayaran uang lauk pauk (ULP) tahanan Tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan data pada laporan yang disusun Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Lantamal I Belawan. Selain itu realisasi harga satuan ULP yang dibayarkan lebih kecil dari indeks yang digunakan dalam bukti pembayaran. Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat realisasi keuangan yang tidak sesuai peruntukan senilai Rp107,15 juta.
- Di Kementerian Perumahan Rakyat, pemberian bantuan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) kepada lembaga perguruan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama Tahun 2010 s.d. 2011 tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenpera dan tidak sesuai dengan tujuan, visi dan misi pembangunan rusunawa sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak huni melalui program bantuan pembangunan rusunawa.
- Di Kementerian Luar Negeri, pada KJRI Guangzhou terdapat pelaksanaan dan pembayaran biaya representasi tidak sesuai ketentuan dan laporan kegiatan representasi yang dibuat tidak digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KJRI Guangzhou. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pelaksanaan penggantian biaya representasi yang telah dikeluarkan dalam Tahun 2011 senilai Rp363,88 juta dan Tahun 2012 (s.d. Mei 2012) senilai Rp129,18 juta serta pemanfaatan dari hasil pelaksanaan kegiatan representasi dalam mendukung tugas dan fungsi diplomasi secara optimal belum tercapai.

Penyebab

4.77 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas membuat perencanaan yang kurang memadai serta kurang memperhatikan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu pelaksana kegiatan kurang mempedomani keputusan Menlu RI tentang penggantian biaya representasi dan belum menyusun SOP perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan representasi serta pengawasan dan pengendalian belum optimal.

Rekomendasi

- 4.78 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat serta memperhatikan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan, menyusun SOP perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan representasi, dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 4.79 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2009 s.d. 2012, atas 185 objek pemeriksaan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yang terdiri 27 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 158 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 4.80 Cakupan pemeriksaan belanja daerah pada 185 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp42,42 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp102,68 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp1,17 triliun merupakan temuan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.81 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 4.82 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 4.83 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.84 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 4.85 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 4.86 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya 196 kasus kelemahan SPI, yaitu 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 143 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 44 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.6. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 16.

Tabel 4.6. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1	8	9
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	20	123	143
3	Struktur Pengendalian Intern	7	37	44
	Jumlah	28	168	196

- 4.87 Terdapat 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan				
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	6	7
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	-	2	2
	Jumlah	1	8	9

4.88 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

4.89 Terdapat 143 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	8	57	65
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	-	4	4
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8	41	49
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	-	4	4
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	-	7	7
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	10	14
	Jumlah	20	123	143

- 4.90 Kasus-kasus tersebut terjadi di 81 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.
- 4.91 Terdapat 44 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern				
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	3	8	11
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	22	26
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	2	2
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	-	5	5
	Jumlah	7	37	44

- 4.92 Kasus-kasus tersebut terjadi di 32 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.
- 4.93 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat penganggaran belanja hibah yang tidak memenuhi kriteria penerima hibah yaitu kepada pemerintah desa dengan total anggaran senilai Rp1,07 miliar, yang seharusnya bantuan tersebut dianggarkan dalam belanja bantuan keuangan. Selain itu terdapat penganggaran belanja hibah kepada penerima yang telah memperoleh bantuan pada Tahun 2011 senilai Rp12,98 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan para penerima hibah lainnya yang lebih berhak memperoleh dana hibah senilai Rp14,05 miliar.
 - Di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dan telah direalisasikan namun belum memiliki peraturan daerah tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Selain itu, terdapat bantuan yang

diberikan secara tunai dikarenakan penerima tidak memiliki rekening, serta pemberian bantuan diberikan berdasarkan proposal Tahun 2008. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerima terlambat menerima dan memanfaatkan bantuan serta lemahnya pengendalian atas dana bantuan yang tidak langsung ditransfer ke penerima bantuan.

- Di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat perangkapan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun 2012 yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sehingga mengakibatkan pengendalian pada ULP tidak memadai.

Penyebab

- 4.94 Kasus-kasus kelemahan SPI pada belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku, kurang cermat dalam proses perencanaan penganggaran, dan pegawai yang bersertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa kurang diberdayakan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

- 4.95 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI pada belanja pemerintah daerah, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada pelaksana yang belum memperhatikan ketentuan dan pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, BPK merekomendasikan agar perangkapan jabatan dihilangkan dengan cara memberdayakan pegawai yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.96 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya 2.222 kasus ketidakpatuhan senilai Rp1,17 triliun yang merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.10. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 17 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 18.

Tabel 4.10. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah	165	146.363,05	878	298.778,88	1.043	445.141,93
2	Potensi Kerugian Daerah	35	31.519,25	273	120.130,01	308	151.649,26
3	Kekurangan Penerimaan	56	11.711,95	300	45.172,30	356	56.884,25
4	Administrasi	38	--	205	--	243	--
5	Ketidakhematan	21	92.987,43	118	82.369,00	139	175.356,43
6	Ketidakefisienan	--	--	1	4.359,11	1	4.359,11
7	Ketidakefektifan	26	98.185,53	106	244.432,03	132	342.617,56
	Jumlah	341	380.767,21	1.881	795.241,33	2.222	1.176.008,54

Kerugian Daerah (1.043 kasus senilai Rp445,14 miliar)

- 4.97 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 4.98 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4.99 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan.
- 4.100 Kerugian daerah juga meliputi pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah, serta lain-lain kasus kerugian negara.
- 4.101 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1.043 kasus senilai Rp445,14 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 491 kasus senilai Rp253,97 miliar. Hasil pemeriksaan atas belanja daerah disajikan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Daerah							
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	3	1.056,42	34	9.341,01	37	10.397,43
2	Belanja atau pengadaan barang/ jasa fiktif lainnya	5	520,95	31	15.233,48	36	15.754,43
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	2.285,16	18	14.333,48	19	16.618,64
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	92	23.995,02	354	111.709,14	446	135.704,16
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang	29	6.177,94	168	46.361,14	197	52.539,08
6	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	6	17.681,30	55	11.524,25	61	29.205,55
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	143,67	15	5.232,26	16	5.375,93
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	7	1.307,75	45	5.965,49	52	7.273,24
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	300,76	15	1.146,07	16	1.446,83
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	9	1.138,07	57	51.322,78	66	52.460,85
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	8	91.368,03	66	22.132,96	74	113.500,99
12	Penjualan/pertukaran/ penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	-	-	1	232,36	1	232,36
13	Lain-lain	3	387,98	19	4.244,46	22	4.632,44
	Jumlah	165	146.363,05	878	298.778,88	1.043	445.141,93

4.102 Kasus-kasus tersebut terjadi di 182 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

4.103 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Papua Barat, pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat pengeluaran belanja daerah TA 2012 untuk kekurangan bayar pekerjaan pembangunan jalan Ayawasi – Kebar TA 2008 senilai Rp78,90 miliar. Pengeluaran tersebut tanpa dasar hukum karena anggaran untuk membayar pekerjaan tersebut belum ada serta menurut hasil konfirmasi diketahui tidak pernah terjadi kekurangan bayar pekerjaan karena telah dilakukan pembayaran 100% seluruhnya pada TA 2008. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian daerah senilai Rp78,90 miliar.
- Di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat hasil pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wajo TA 2011 dan 2012 pada 12 kontrak yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerjasama sehingga hasil pekerjaan tidak dapat diterima seluruhnya senilai Rp23,39 miliar.
- Di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan perhitungan harga satuan pekerjaan dalam pelaksanaan 30 paket pekerjaan Tahun 2009 s.d. 2011 di Dinas Pekerjaan Umum sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah senilai Rp12,86 miliar.
- Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Perhubungan terdapat pembayaran remunerasi kepada Pegawai Unit Pengelola Perpajakan TA 2011 dan 2012 yang melebihi Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2010 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp10,18 miliar.
- Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, terdapat mekanisme verifikasi atas pembayaran tunjangan sertifikasi guru TA 2012 tidak optimal sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara/daerah atas keterlanjuran pembayaran tunjangan sertifikasi guru kepada 874 orang guru yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi terakhir minimal senilai Rp9,13 miliar.
- Di Provinsi Bali, terdapat pemahalan harga atas beberapa item pekerjaan pengadaan alat-alat berat, alat-alat studio, *closed circuit television*, instalasi listrik dan telepon pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2011 dan 2012 sehingga mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah minimal senilai Rp6,26 miliar.

4.104 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 606 kasus senilai Rp326,82 miliar dari seluruh kasus kerugian daerah pada belanja pemerintah daerah pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri dari temuan pada tingkat provinsi sebanyak 94 kasus senilai Rp108,028 miliar di antaranya sebanyak 71 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp22,78 miliar, sebanyak 15 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp4,08 miliar, dan sebanyak 4

kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp833,85 juta. Dari temuan pada tingkat provinsi sebanyak 94 kasus senilai Rp108,028 miliar tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp11,15 miliar.

- 4.105 Selain itu temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum juga terjadi pada tingkat pemerintah kabupaten/kota pada Semester II Tahun 2012 sebanyak 512 kasus senilai Rp218,795 miliar, di antaranya 298 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp100,27 miliar, sebanyak 105 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp35,74 miliar, dan 43 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp48,35 miliar. Dari temuan pada tingkat pemerintah kabupaten/kota sebanyak 512 kasus senilai Rp218,795 miliar tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp11,11 miliar.
- 4.106 Dari kasus-kasus kerugian daerah atas belanja pemerintah daerah senilai Rp445,14 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp28,21 miliar, di antaranya di Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp4,43 miliar, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp3,25 miliar, Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,63 miliar, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua senilai Rp1,44 miliar, dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,30 miliar.

Penyebab

- 4.107 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 4.108 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah (308 kasus senilai Rp151,64 miliar)

- 4.109 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 4.110 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, dan pembelian aset yang berstatus sengketa.
- 4.111 Potensi kerugian daerah juga meliputi aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah serta lain-lain kasus potensi kerugian daerah.
- 4.112 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 308 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp151,64 miliar, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Daerah							
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	31	20.238,12	246	106.517,34	277	126.755,46
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2	2.120,74	2	63,97	4	2.184,71
3	Aset dikuasai pihak lain	-	-	2	250,45	2	250,45
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	1	82,40	1	82,40
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	1	73,00	1	73,00
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	4	603,80	4	603,80
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	-	-	2	644,50	2	644,50
8	Lain – lain	2	9.160,39	15	11.894,55	17	21.054,94
	Jumlah	35	31.519,25	273	120.130,01	308	151.649,26

- 4.113 Kasus-kasus tersebut terjadi di 118 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.
- 4.114 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 terdapat kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Lobang Klatak-Pantai Harapan, tetapi kekurangan volume bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp10,07 miliar.
 - Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdapat pembayaran kontrak pekerjaan pengadaan kapal operasional dan patroli Tahun 2011 dan 2012 yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp9,95 miliar karena anggaran belum tersedia dan kapal tersebut belum diserahkan.
 - Di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdapat material yang tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp7,78 miliar untuk pekerjaan penyiapan lahan, galian, dan timbunan tanah pembangunan Bandar Udara Nabire Tahun 2011, tetapi ketidaksesuaian spesifikasi kontrak tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp7,78 miliar.
 - Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak atas pekerjaan pembangunan jalan dan gedung Tahun 2012, tetapi ketidaksesuaian spesifikasi kontrak tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp6,12 miliar.
 - Di Provinsi Kalimantan Selatan, pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi atas 11 paket pekerjaan jalan dan jembatan Tahun 2012, tetapi kekurangan volume dan spesifikasi tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp4,11 miliar.
 - Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun 2012 terdapat pekerjaan pengadaan mobil pompa 4000 liter (*medium pressure*) tidak sesuai spesifikasi kontrak yaitu pada selang pemadam kebakaran, tetapi ketidaksesuaian spesifikasi kontrak tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp1,95 miliar.
- 4.115 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 254 kasus senilai Rp120,24 miliar dari seluruh kasus potensi kerugian daerah pada belanja pemerintah daerah pada Semester II Tahun 2012. Rincian

temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri dari temuan pada pemerintah provinsi sebanyak 31 kasus senilai Rp20,269 miliar dan pada pemerintah kabupaten/kota sebanyak 223 kasus senilai Rp99,973 miliar. Dari temuan tersebut, selama proses pemeriksaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah masing-masing senilai Rp7,69 miliar dan Rp1,28 miliar.

- 4.116 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah atas belanja pemerintah daerah senilai Rp151,64 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp9,01 miliar, di antaranya di Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp5,89 miliar, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,46 miliar, dan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur senilai Rp532,26 juta.

Penyebab

- 4.117 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

- 4.118 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, memberi sanksi kepada pelaksana dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

Kekurangan Penerimaan (356 kasus senilai Rp56,88 miliar)

- 4.119 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.120 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 4.121 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan terdapat 356 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp56,88 miliar, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan							
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas daerah	48	7.760,56	257	37.381,12	305	45.141,68
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/daerah	8	3.951,39	39	7.495,92	47	11.447,31
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	-	-	2	25,41	2	25,41
4	Lain – lain	-	-	2	269,85	2	269,85
	Jumlah	56	11.711,95	300	45.172,30	356	56.884,25

4.122 Kasus-kasus tersebut terjadi di 145 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

4.123 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun 2012 pada RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan Dinas Pekerjaan Umum yang belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp4,35 miliar.
- Di Provinsi DKI Jakarta, pada UP Transjakarta Busway Dinas Perhubungan terdapat pengenaan denda (sanksi) atas pelanggaran kontrak oleh operator pada Transjakarta Busway Koridor 1 s.d. 10 selama Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 yang belum diterima sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah dari denda senilai Rp2,48 miliar.
- Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase Tahun 2011 yang belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp2,40 miliar.

- Di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, terdapat sisa uang muka dan jaminan pelaksanaan dengan total senilai Rp2,09 miliar pada pekerjaan pembangunan gedung parkir Tahun 2012 yang putus kontrak belum diterima sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp2,09 miliar.
 - Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdapat jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas 6 paket pekerjaan Tahun 2012 yang telah putus kontrak sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp1,42 miliar.
 - Di Provinsi Jambi, terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada 7 paket pekerjaan Tahun 2012 di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan yang belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp452,85 juta.
- 4.124 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 229 kasus senilai Rp44,13 miliar dari seluruh kasus kekurangan penerimaan pada belanja pemerintah daerah pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri dari temuan pada pemerintah provinsi sebanyak 35 kasus senilai Rp6,72 miliar dan temuan pada pemerintah kabupaten/kota sebanyak 194 kasus senilai Rp37,41 miliar. Dari temuan tersebut, selama proses pemeriksaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah masing-masing senilai Rp857,32 juta dan Rp2,91 miliar.
- 4.125 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas belanja pemerintah daerah senilai Rp56,88 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp4,75 miliar, di antaranya di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara senilai Rp1,03 miliar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali senilai Rp469,68 juta, dan Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp420,07 juta.

Penyebab

- 4.126 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

- 4.127 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Administrasi (243 kasus)

- 4.128 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 4.129 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah, dan pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan serta pelaksanaan lelang secara proforma.
- 4.130 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetorkan ke kas daerah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan pengalihan anggaran antar MAK tidak sah.
- 4.131 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 243 kasus penyimpangan administrasi, yang disajikan dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Jenis Temuan	Jumlah kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Administrasi				
1	pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	21	21
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	15	74	89
3	pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;	-	10	10
4	proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah	16	65	81
5	pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	3	8	11
6	pelaksanaan lelang secara proforma	2	3	5
7	penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	-	4	4
8	penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	2	12	14
9	penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	1	1
10	sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	-	1	1
11	kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-	3	3
12	pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-	3	3
	Jumlah	38	205	243

4.132 Kasus-kasus tersebut terjadi di 106 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

4.133 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Gorontalo, terdapat realisasi bantuan sosial Tahun 2011 yang belum sepenuhnya dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial senilai Rp5,00 miliar sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh penerima bantuan.
- Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat kelebihan pekerjaan yang telah dikerjakan rekanan pada pembangunan lanjutan gedung Kantor Bupati Konawe Utara Tahun 2011. Kelebihan pekerjaan Tahun 2011 tersebut belum terikat kontrak dan belum memiliki anggaran serta baru dianggarkan dan dibuat kontrak pada Tahun 2012 senilai Rp2,90 miliar, mengakibatkan gedung kantor bupati belum sepenuhnya dapat diakui menjadi aset Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

- Di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas Tahun 2012 (s.d. Oktober) pada satuan kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sehingga mengakibatkan belanja perjalanan dinas yang dilaporkan senilai Rp2,09 miliar belum memenuhi syarat sahnya pengeluaran.
- Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat pajak-pajak yang dipungut dari realisasi belanja modal Tahun 2012 terlambat disetorkan ke kas negara selama 27 s.d. 66 hari sehingga mengakibatkan keterlambatan penerimaan negara senilai Rp882,46 juta.

Penyebab

- 4.134 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan dan tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.135 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di unit kerjanya masing-masing.

Ketidakhematan (139 kasus senilai Rp175,35 miliar)

- 4.136 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 4.137 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan pada umumnya meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 4.138 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 139 kasus ketidakhematan senilai Rp175,35 miliar, yang disajikan dalam Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakhematan							
1	pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	4	9.010,43	3	104,36	7	9.114,79
2	penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	11	835,97	11	835,97
3	pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	17	83.977,00	104	81.428,67	121	165.405,67
	Jumlah	21	92.987,43	118	82.369,00	139	175.356,43

4.139 Kasus-kasus tersebut terjadi di 80 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

4.140 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Bali, terdapat pengadaan media pembelajaran terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2010-2012 tidak dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang memadai yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp69,02 miliar.
- Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat kemahalan harga pengadaan pipa *High Density Polyethylene* (HDPE) pada pembangunan sarana air bersih PDAM Kota Tanjung Redeb lanjutan tahap II TA 2008 sehingga mengakibatkan indikasi pemahalan harga pengadaan pipa HDPE senilai Rp35,16 miliar.
- Di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, terdapat harga material 9 (sembilan) kontrak pekerjaan peningkatan ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 melebihi standar harga Kabupaten dan kemahalan harga satuan pekerjaan sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp4,46 miliar.
- Di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada Sekretariat DPRD terdapat kegiatan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Tahun 2012 yang tumpang tindih dilaksanakan pada dua kegiatan yaitu kegiatan pembahasan raperda dan kegiatan rapat paripurna sehingga memboroskan keuangan daerah minimal senilai Rp1,33 miliar.

Penyebab

- 4.141 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, panitia pengadaan kurang cermat dalam merencanakan kegiatan dan menyusun HPS, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 4.142 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefisienan (1 kasus senilai Rp4,35 miliar)

- 4.143 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 4.144 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan terdapat satu kasus ketidakefisienan, yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp4,35 miliar.
- 4.145 Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat ketidakcermatan perencanaan pembangunan Pasar Semi Modern Tamiang Layang yaitu pada kedalaman dan ukuran tiang pancang, pekerjaan pembesian poer, dan pekerjaan pembesian balok/kolom sehingga terjadi kenaikan RAB yang mengakibatkan biaya pembangunan yang tidak efisien senilai Rp4,35 miliar.

Penyebab

- 4.146 Kasus ketidakefisienan tersebut terjadi karena konsultan perencana kurang cermat dalam melakukan perhitungan perencanaan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh kepala dinas terkait.

Rekomendasi

- 4.147 Terhadap kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar mengenakan sanksi kepada pejabat terkait sesuai ketentuan berlaku.

Ketidakefektifan (132 kasus senilai Rp342,61 miliar)

- 4.148 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

- 4.149 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 4.150 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 132 kasus ketidakefektifan senilai Rp342,61 miliar yang disajikan dalam Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan ketidakefektifan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan							
1	penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	8	3.229,90	42	28.808,16	50	32.038,06
2	pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	657,82	5	34,50	6	692,32
3	barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	15	25.380,03	30	99.287,18	45	124.667,21
4	pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	189,58	1	189,58
5	pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	68.917,78	27	116.112,61	29	185.030,39
6	fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	1	-	1	-
	Jumlah	26	98.185,53	106	244.432,03	132	342.617,56

- 4.151 Kasus-kasus tersebut terjadi di 88 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

- 4.152 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdapat 14 Paket Pekerjaan Tahun 2012 senilai Rp72,81 miliar pada Dinas Bina Marga dan Pengairan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak dapat memanfaatkan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

- Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat pekerjaan pembangunan gedung RSUD Bangkinang dan seluruh peralatan pendukungnya Tahun 2011 yang belum dapat dimanfaatkan sehingga mengakibatkan gedung RSUD Bangkinang beserta seluruh peralatan yang ada di dalamnya senilai Rp69,03 miliar menjadi tidak efektif dan berpotensi mengalami kerusakan.
- Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat kerusakan konstruksi pada pekerjaan penurapan Jalan Marsma Iswahyudi (depan Bandara Kalimarau) TA 2010 minimal senilai Rp14,28 miliar sehingga mengakibatkan belanja infrastruktur belum memberikan manfaat dan menimbulkan potensi kerusakan pada ruas jalan alternatif atas pengalihan rute jalan.
- Di Provinsi Kepulauan Riau, pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdapat pengadaan alat-alat kesehatan dan alat-alat kedokteran umum Tahun 2012 belum dimanfaatkan senilai Rp6,97 miliar sehingga mengakibatkan barang hasil pengadaan tidak efektif dan barang yang tidak digunakan dapat menjadi rusak sebelum dimanfaatkan.
- Di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, terdapat belanja subsidi dan belanja tidak terduga Tahun 2011 senilai Rp5,93 miliar tidak sesuai peruntukan karena digunakan untuk belanja bantuan sosial kepada masyarakat sehingga mengakibatkan tujuan penganggaran belanja subsidi dan belanja tidak terduga tidak tercapai dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Penyebab

- 4.153 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan, tidak segera memanfaatkan dana yang sudah tersedia, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi

- 4.154 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 4.155 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Bab 5

Manajemen Aset

- 5.1 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 7).
- 5.2 Aset tetap negara/daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern (SPI) atas manajemen/pengelolaan aset tetap negara/daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
- 5.3 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK melakukan pemeriksaan atas manajemen aset termasuk penyertaan modal dan pengelolaan kas pada 43 objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada 8 pemerintah pusat, 5 pemerintah provinsi, 27 pemerintah kabupaten/kota, dan 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuan Pemeriksaan

- 5.4 Tujuan pemeriksaan atas manajemen aset adalah untuk
- menilai efektivitas SPI terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap;
 - menguji keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian, serta kewajaran dan kecukupan pengungkapan atas pelaporan aset tetap; dan
 - menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap.

Hasil Pemeriksaan

- 5.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian

negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

- 5.6 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 5.7 Pemeriksaan atas manajemen aset bertujuan antara lain menilai apakah SPI atas pelaksanaan manajemen aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai. Selain itu untuk menguji keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian, serta kewajaran dan kecukupan pengungkapan atas pelaporan aset.
- 5.8 Hasil evaluasi SPI pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan adanya kelemahan yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 5.9 Hasil evaluasi SPI menunjukkan adanya 311 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 173 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 82 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 56 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus				
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						
1	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	29	13	124	7	173
2	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	29	3	39	11	82
3	Struktur Pengendalian Intern	8	4	36	8	56
Jumlah		66	20	199	26	311

- 5.10 Terdapat 173 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus				
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan						
1	Pencatatan Tidak/Belum Dilakukan atau Tidak Akurat	22	7	108	5	142
2	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	2	3	10	-	15
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Tidak Memadai	2	3	3	2	10
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Belum didukung SDM yang Memadai	3	-	3	-	6
Jumlah		29	13	124	7	173

- 5.11 Kasus-kasus tersebut terjadi di 42 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

- 5.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pertahanan, penatausahaan tanah, gedung dan bangunan Tahun 2012 di lingkungan unit organisasi kementerian pertahanan belum sesuai ketentuan mengakibatkan nilai aset tersebut pada laporan barang milik negara (LBMN) dan Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan tidak akurat.
- Di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, realisasi belanja modal TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 senilai Rp21,251 miliar pada 4 SKPD tidak tercatat dalam laporan barang milik daerah (LBMD) yaitu RSUD Kabupaten Landak senilai Rp3,308 miliar, Sekretaris Daerah senilai Rp6,512 miliar, Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) senilai Rp89,00 juta, dan Dinas Pendidikan senilai Rp11,342 miliar. Hal ini mengakibatkan pengadaan barang milik daerah berpotensi tidak termonitor dan disalahgunakan pihak yang tidak berhak.
- Di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, penatausahaan barang milik daerah Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2012 belum tertib, yaitu pencatatan ganda atas satu jenis aset di beberapa SKPD, hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB), rumah dinas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga belum tercatat, dan hasil inventarisasi barang belum menyajikan aset tetap yang dimiliki sesuai kondisi yang sebenarnya.

- Di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, KIB pada Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Sekretariat Daerah, dan Dinas Pertanian dengan total nilai Rp4,21 miliar disajikan secara global. Hal ini mengakibatkan saldo aset tetap per 31 Desember 2012 tidak disajikan secara wajar.

5.13 Terdapat 82 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus				
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja						
1	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	2	-	4	-	6
2	Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Serta Penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah Tidak Sesuai Ketentuan	5	-	-	-	5
3	Penyimpangan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Teknis Tertentu atau Ketentuan Intern Organisasi yang Diperiksa tentang Pendapatan dan Belanja	3	-	4	-	7
4	Penetapan/Pelaksanaan Kebijakan Tidak Tepat atau Belum Dilakukan Berakibat Hilangnya Potensi Penerimaan/Pendapatan	18	3	27	5	53
5	Penetapan/Pelaksanaan Kebijakan Tidak Tepat atau Belum Dilakukan Berakibat Peningkatan Biaya/ Belanja	-	-	2	6	8
6	Lain-lain	1	-	2	-	3
Jumlah		29	3	39	11	82

5.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di 27 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

5.15 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di TNI AU, nilai pembayaran kontribusi tetap dan bagi hasil oleh PT Angkasa Pura (Persero) atas pemanfaatan pangkalan udara belum ditetapkan sesuai kesepakatan bersama pada Januari 2011 yang mengakibatkan negara kehilangan penerimaan.

- Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terdapat penghapusan aset tetap dalam TA 2011 atas 43 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua tidak sesuai prosedur dan tidak mencantumkan harga perolehan dan harga wajarnya. Hal ini mengakibatkan penerimaan daerah senilai Rp3,97 miliar tertunda.
- Di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdapat bangunan ruko dan plasa yang berasal dari bangun guna serah yang berakhir Tahun 2012 belum bisa dimanfaatkan mengakibatkan pendapatan atas pemanfaatan aset daerah belum dapat diperoleh.
- Di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) untuk TA 2012 yang mengakibatkan jumlah kebutuhan barang daerah dan pemeliharaan barang daerah setiap tahun tidak dapat diketahui secara pasti.
- Di PT Pertamina (Persero), pelaksanaan perjanjian pengelolaan perwismaan dan balai-balai hiburan oleh koperasi karyawan Patra dan koperasi wanita Petra dengan sistem *reimbursement* membebani PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III senilai Rp1,17 miliar untuk periode Januari 2011 – Juni 2012, sehingga PT Pertamina (Persero) tidak mendapatkan kompensasi dari pengelolaan perwismaan dan balai-balai tersebut.

5.16 Terdapat 56 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus				
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern						
1	Entitas Tidak Memiliki SOP yang Formal untuk Suatu Prosedur atau Keseluruhan Prosedur	6	4	28	4	42
2	SOP yang Ada pada Entitas tidak Berjalan Secara Optimal atau Tidak Ditaati	1	-	8	4	13
3	Satuan Pengawas Intern yang Ada Tidak Memadai atau Tidak Berjalan Optimal	1	-	-	-	1
	Jumlah	8	4	36	8	56

- 5.17 Kasus-kasus tersebut terjadi di 26 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.
- 5.18 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Keuangan, KEP-185/PB/2010 tentang Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, belum mengatur prosedur pelaporan hasil penerimaan negara dari pembayaran angsuran sewa beli rumah negara golongan III kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan sehingga tidak mendukung asersi keberadaan, hak, dan kewajiban.
 - Di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum dimiliki yang mengakibatkan lemahnya penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah.
 - Di Provinsi Sulawesi Utara, mekanisme/prosedur pengelolaan barang milik daerah yang mengacu pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 masih berupa *draft* sehingga penyusunan buku inventaris barang daerah terlambat dan tidak akurat dan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengguna barang dan pengelola barang tidak optimal.
 - Di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Surat Keputusan penghapusan/penggabungan SD Negeri tidak diikuti dengan penyerahan aset hasil penghapusan/penggabungan kepada Bupati. Hal ini mengakibatkan penyajian aset gedung dan bangunan Tahun 2011 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - Di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, penghapusan atas aset yang rusak belum dilakukan mengakibatkan nilai aset tetap Tahun 2012 tidak memberikan informasi yang memadai dan akurat.

Penyebab

- 5.19 Kasus-kasus kelemahan SPI terjadi karena pengelola barang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan inventarisasi aset tetap yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangannya, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan, lemahnya koordinasi antar pihak yang terkait mengenai pengelolaan dan penatausahaan aset tetap, dan entitas belum memiliki SOP.

Rekomendasi

- 5.20 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan penertiban penatausahaan atas aset tetap, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan aset tetap. BPK juga merekomendasikan kepada entitas agar melakukan peningkatan koordinasi antar pihak yang terkait dalam penatausahaan aset tetap serta menyusun SOP.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 5.21 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/ Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
1	Kerugian Negara/ Daerah	7	374,56	4	40.582,33	20	9.535,45	3	11.542,63	34	62.034,97
2	Potensi Kerugian Negara/ Daerah	12	114.732,00	11	16.818,03	33	49.270,73	-	-	56	180.820,76
3	Kekurangan Penerimaan	3	6.880,38	1	12,50	15	8.162,37	6	9.265,09	25	24.320,34
4	Administrasi	36	-	40	-	203	-	11		290	-
5	Ketidakhematan	-	-	1	-	3	415,25	1	2.473,31	5	2.888,56
6	Ketidakefektifan	2	1.383,33	5	3.952,97	21	129.042,77	-	-	28	134.379,07
Jumlah		60	123.370,27	62	61.365,83	295	196.426,57	21	23.281,03	438	404.443,70

- 5.22 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 438 kasus senilai Rp404,44 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 40 pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota dan 3 BUMN.

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan (34 kasus senilai Rp62,03 miliar)

- 5.23 Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 5.24 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 5.25 Kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan pada pemeriksaan atas manajemen aset yaitu kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah/perusahaan tidak sesuai ketentuan dan lain-lain kasus kerugian negara/daerah/perusahaan.

- 5.26 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan adanya kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 34 kasus senilai Rp62,03 miliar, yang terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

(nilai dalam juta Rupiah)											
No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Kerugian Negara/Daerah											
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	151,33	-	-	-	-	-	-	2	151,33
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	3,08	-	-	1	269,39	1	9.324,68	4	9.597,15
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	67,75	-	-	-	-	2	2.217,95	3	2.285,70
5	Penjualan/pertukaran/ penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan	-	-	2	11.877,98	5	4.411,97	-	-	7	16.289,95
6	lain-lain	2	152,40	2	28.704,35	13	4.854,09	-	-	17	33.710,84
Jumlah		7	374,56	4	40.582,33	20	9.535,45	3	11.542,63	34	62.034,97

- 5.27 Kasus-kasus tersebut terjadi di 22 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

- 5.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Mahkamah Agung, terdapat kekurangan volume dan perbedaan harga atas pekerjaan pembangunan gedung kantor, rumah dinas dan prasarana kantor di 13 satuan kerja TA 2011 dan Semester I TA 2012 senilai Rp141,05 Juta.
- Di Provinsi Maluku, pelaksanaan kuasi reorganisasi pada PT BPD Maluku Tahun 2008 tidak sesuai standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan mengakibatkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp28,53 miliar atas penurunan nilai penyertaan modal.
- Di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat penghapusan/penjualan rumah dinas dan 508 unit kendaraan dinas operasional pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sehingga berindikasi merugikan daerah masing-masing minimal senilai Rp7,32 miliar dan Rp4,54 miliar.
- Di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, terdapat panjar Tahun 2012 yang belum disetorkan ke Kas Daerah mengakibatkan kerugian daerah minimal senilai Rp4,22 miliar.

- Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, penghapusan sebagian lahan Kawasan Industri Tenayan Raya (KIT) yang telah dijual kepada PT PLN (Persero) pada Tahun 2012 tidak sesuai ketentuan karena PT PLN (Persero) belum melakukan pembayaran, sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah senilai Rp4,00 miliar.
 - Di PT Timah (Persero) Tbk, terdapat penagihan biaya sewa atas kapal keruk dan kapal isap produksi milik anak perusahaan (PT Tambang Timah) selama Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2012 yang tidak digunakan oleh PT Timah sehingga perusahaan terbebani biaya sewa yang tidak seharusnya senilai Rp9,32 miliar.
- 5.29 Dari kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan atas manajemen aset senilai Rp62,03 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp4,05 miliar, di antaranya adalah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau senilai Rp4,00 miliar dan Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan senilai Rp50,44 juta.

Penyebab

- 5.30 Kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan disebabkan kepala daerah lalai mengendalikan pengelolaan aset, PPK kurang cermat dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat pengelola aset tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak optimal dalam menjalankan tugas pengamanan aset, serta perusahaan tidak menyampaikan daftar aset yang tidak dipakai dalam kegiatan.

Rekomendasi

- 5.31 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat entitas yang diperiksa antara lain agar menyelesaikan kekurangan volume atau menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke negara/daerah/perusahaan, mengkaji kembali revaluasi aset dan menyelesaikan kewajiban perpajakan, meninjau kembali keputusan penghapusan/penjualan aset tetap, merealisasikan pengeluaran kas mematuhi ketentuan yang berlaku, dan lebih tertib mengadministrasikan uang yang dikelolanya, meningkatkan pengamanan terhadap aset, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pihak yang terkait.

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan (56 kasus senilai Rp180,82 miliar)

- 5.32 Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 5.33 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan pada pemeriksaan atas manajemen aset meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, piutang/pinjaman dan atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih dan lain-lain potensi kerugian negara/daerah/perusahaan.
- 5.34 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan adanya potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 56 kasus senilai Rp180,82 miliar yang terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Negara/Daerah											
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	-	-	1	115,21	-	-	1	115,21
2	Aset dikuasai pihak lain	8	80.266,09	7	5.805,40	15	9.008,27	-	-	30	95.079,76
3	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	-	-	1	163,15	-	-	1	163,15
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	3	-	3	10.586,94	14	39.455,95	-	-	20	50.042,89
5	Piutang/pinjaman dan/atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	34.465,91	-	-	1	275,77	-	-	2	34.741,68
6	Lain-lain	-	-	1	425,69	1	252,38	-	-	2	678,07
Jumlah		12	114.732,00	11	16.818,03	33	49.270,73	-	-	56	180.820,76

- 5.35 Kasus-kasus tersebut terjadi di 25 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.
- 5.36 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNI AD, Ditjen Bina Marga sampai dengan Tahun 2011 belum menyerahkan aset pengganti kepada Kodam Jaya atas proses *ruijslag* tanah dan bangunan di Jalan Tongkol Nomor 2 dan Jalan Kakap Nomor 25 Jakarta Utara senilai Rp80,26 miliar sehingga berpotensi merugikan negara.
 - Di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum Tahun 2010 minimal senilai Rp15,87 miliar tidak dapat ditelusuri keberadaannya.

- Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terjadi potensi kerugian daerah senilai Rp14,23 miliar pada Tahun 2012 yaitu tanah dan bangunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dikuasai pihak lain senilai Rp312,615 juta, dimanfaatkan oleh pegawai yang telah pindah ke pemerintah daerah lainnya senilai Rp249,296 juta, dan tidak diketahui keberadaannya senilai Rp13,672 miliar.
- Di Provinsi Sulawesi Barat, dalam Tahun 2011 terdapat aset yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak jelas kondisinya minimal senilai Rp8,21 miliar.

Penyebab

- 5.37 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan disebabkan pejabat entitas yang diperiksa, pengelola dan pengguna barang belum optimal melaksanakan tupoksinya, kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD, dan tidak melakukan pengamanan aset secara fisik dan administrasi, serta lalai melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib.

Rekomendasi

- 5.38 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat entitas yang diperiksa antara lain agar menyelesaikan permasalahan *ruijslag*, menginstruksikan inspektorat melakukan pemeriksaan khusus atas aset tetap dalam penguasaan pihak lain, mengintensifkan penarikan aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain, menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya, meningkatkan penatausahaan BMD, dan memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan kepada pihak yang terkait.

Kekurangan Penerimaan (25 kasus senilai Rp24,32 miliar)

- 5.39 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah/perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 5.40 Kasus kekurangan penerimaan pada pemeriksaan atas manajemen aset meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, dan penenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 5.41 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan terdapat 25 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp24,32 miliar yang terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan											
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah	1	79,50	-	-	2	40,39	2	1.414,68	5	1.534,57
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah	2	6.800,88	1	12,50	13	8.121,98	2	7.718,51	18	22.653,87
3	Pengenaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan	-	-	-	-	-	-	2	131,90	2	131,90
Jumlah		3	6.880,38	1	12,50	15	8.162,37	6	9.265,09	25	24.320,34

5.42 Kasus-kasus tersebut terjadi di 18 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

5.43 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di TNI AD, PT Kartika Jaya Abadi tidak melakukan pembayaran sewa periode 31 Januari 2008 - 31 Januari 2011 senilai Rp6,77 miliar atas pemanfaatan tanah eks Gudang Pusat Zeni (Gudpuszi) di jalan Yos Sudarso Jakarta Utara.
- Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, terdapat tunggakan sewa kios dan los Pasar Rumbai sampai dengan September 2012 sehingga pendapatan daerah dari sewa kios dan los belum diterima senilai Rp4,65 miliar.
- Di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, kelompok tani belum mengembalikan dana kerja sama pemanfaatan *handtractor* hasil pengadaan Tahun 2009 dan Tahun 2010 senilai Rp1,05 miliar.
- Di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, terdapat pengeluaran kas Tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kuasa BUD mengakibatkan kekurangan kas daerah senilai Rp311,15 juta.
- Di PT Pertamina (Persero), terlambat menerima pendapatan dari optimalisasi Aset Penunjang Usaha (APU) selama Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 senilai Rp4,75 miliar, sehingga perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan dana tersebut.

5.44 Dari kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas manajemen aset senilai Rp24,32 miliar telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp371,15 juta, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, senilai Rp311,15 juta, dan Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, senilai Rp60,00 juta.

Penyebab

- 5.45 Kasus-kasus kekurangan penerimaan terjadi karena pejabat yang diperiksa belum sepenuhnya melaksanakan pemanfaatan aset sesuai ketentuan, tidak optimal dalam menagih piutang sewa, dan melakukan penagihan, pengawasan, dan pengendalian kerja sama operasional *handtractor* kepada kelompok tani, serta penggunaan tanah hak pengelolaan (HPL), dan Kuasa BUD lalai mempertanggungjawabkan pengeluaran Kas Daerah, serta SPI masih belum memadai.

Rekomendasi

- 5.46 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat entitas yang diperiksa antara lain menagih hasil penyewaan tanah dan APU sesuai perjanjian, melakukan negosiasi dengan penyewa kios dan los pasar serta menelusuri kembali nilai tunggakan dengan mendata, menetapkan dan melakukan penagihan, menagih uang pemasukan HPL, menyetorkan hasil penagihan ke kas negara/daerah, dan memberikan sanksi administratif kepada mantan Kuasa BUD yang bersangkutan sesuai PP No. 53 Tahun 2010.

Administrasi (290 kasus)

- 5.47 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 5.48 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif pada pemeriksaan atas manajemen aset meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah/perusahaan), dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan. Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 5.49 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 290 kasus terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.9.

**Tabel 5.9. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas
Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN**

No	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
Penyimpangan Administrasi						
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2	-	1	-	3
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	6	2	8
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	3	-	3
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	1	-	2	-	3
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	27	26	151	6	210
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	-	4	2	1	7
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	1	-	1
8	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-	1	-	-	1
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	6	8	37	2	53
10	Lain-lain	-	1	-	-	1
Jumlah		36	40	203	11	290

5.50 Kasus-kasus tersebut terjadi di 43 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

5.51 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Mabes TNI, sampai dengan Agustus 2011 sebanyak 81 bidang tanah seluas 942.628m² senilai Rp2,36 triliun tidak memiliki sertifikat. Hal ini mengakibatkan adanya potensi permasalahan kepemilikan tanah atau hilangnya aset tanah.
- Di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, jaringan sarana air bersih yang telah diserahkan kepada pihak ketiga senilai Rp22,08 miliar belum dihapuskan, dan pemanfaatan aset jaringan air minum milik pemda oleh PDAM Kabupaten Malang senilai Rp1,07 miliar belum ditetapkan statusnya. Hal ini mengakibatkan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada KIB D Tahun 2011 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

- Di Provinsi Maluku, pengelolaan aset dengan PT Dok dan Perkapalan Waime pada Tahun 2010 belum memadai, yaitu penyertaan modal tidak ada sertifikatnya dan kurang diakui minimal senilai Rp8,10 miliar, sumbangan belum ditentukan statusnya senilai Rp4,37 miliar, dan pemakaian generator set senilai Rp495,20 juta belum ditentukan status pemanfaatan dan kepemilikannya.
- Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terdapat pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah, bangunan, dan peralatan dan mesin kepada masyarakat pada Tahun 2011 belum didukung surat keputusan pengelola BMD dan berita acara hibah senilai Rp5,69 miliar.
- PT Timah (Persero) Tbk, pengamanan terhadap aset non-operasional belum memadai dan masa berlaku beberapa bukti kepemilikan tanah telah habis sehingga berpotensi kehilangan kepemilikan atas aset non operasional tersebut senilai Rp39,11 miliar.

Penyebab

- 5.52 Kasus-kasus penyimpangan administrasi terjadi karena upaya pengamanan aset secara fisik maupun administratif belum optimal, pengguna barang masih lemah dalam penatausahaan pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah, pengurus barang lalai melaksanakan tupoksinya, dan kepala daerah belum optimal dalam mengupayakan penyerahan dana dan aset kepada pihak ketiga menjadi penyertaan modal.

Rekomendasi

- 5.53 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat entitas yang diperiksa agar menyusun skala prioritas dalam pensertifikatan tanah dan berkoordinasi dengan BPN, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD, mengupayakan penyerahan dana dan aset kepada PT Dok dan Perkapalan Waime menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku, dan menegur pejabat terkait untuk lebih memperhatikan tupoksinya.

Ketidakhematan (5 kasus senilai Rp2,88 miliar)

- 5.54 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 5.55 Pada umumnya kasus ketidakhematan pada pemeriksaan atas manajemen aset berupa pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga. Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak 5 kasus senilai Rp2,88 miliar yang terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakhematan											
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	-	-	1	-	3	415,25	1	2.473,31	5	2.888,56
Jumlah		-	-	1	-	3	415,25	1	2.473,31	5	2.888,56

5.56 Kasus-kasus tersebut terjadi di 5 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

5.57 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pemberian tunjangan perumahan dalam Tahun 2009-2012 senilai Rp266,00 juta kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah disediakan rumah jabatan memboroskan keuangan daerah.
- Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pembangunan Kantor Dinas Pasar oleh pihak ketiga sejak Tahun 2004-2012 belum terealisasi dan pihak ketiga tidak melaksanakan kewajiban menyewa bangunan untuk Kantor Dinas sehingga Dinas Pasar mengeluarkan biaya sewa kantor senilai Rp130,75 juta yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.
- Di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, terdapat kelebihan perhitungan honorarium dalam APBD-P Tahun 2011 senilai Rp18,50 juta mengakibatkan potensi pemborosan keuangan daerah.
- Di PT Antam (Persero) Tbk, terdapat kemahalan harga atas pengadaan jasa sewa kendaraan Tahun 2009 s.d. 2012 di unit bisnis pertambangan emas Pongkor yang menimbulkan ketidakhematan senilai Rp2,47 miliar.

Penyebab

5.58 Kasus-kasus ketidakhematan terjadi karena pengguna barang kurang cermat dan optimal dalam penerimaan, penggunaan dan penyaluran aset, pejabat pelaksana kurang optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian, dan dalam menyusun Keputusan Bupati belum mempedomani ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 5.59 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mengoptimalkan pemanfaatan rumah jabatan, memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana sesuai ketentuan, dan entitas mengajukan usulan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas aset yang dikuasainya.

Ketidakefektifan (28 kasus senilai Rp134,37 miliar)

- 5.60 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 5.61 Kasus-kasus ketidakefektifan pada pemeriksaan atas manajemen aset meliputi pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 5.62 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan 28 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp134,37 miliar terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

(nilai dalam juta rupiah)											
No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakefektifan											
1	Pemanfaatan barang/ jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-
2	Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan	2	1.383,33	2	3.952,97	15	129.042,77	-	-	19	134.379,07
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Jumlah		2	1.383,33	5	3.952,97	21	129.042,77	-	-	28	134.379,07

- 5.63 Kasus-kasus tersebut terjadi di 22 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.
- 5.64 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Mahkamah Agung, pengadaan 2 buah *dental unit* oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun 2011 untuk ditempatkan di gedung Sekretariat MA senilai Rp1,38 miliar tidak digunakan dan tidak ada penugasan dokter gigi dan penunjang peralatan gigi.
 - Di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, hasil pengadaan tanah, gedung, dan peralatan senilai Rp64,45 miliar dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 belum dimanfaatkan.
 - Di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, aset hasil pengadaan Tahun 2002 pada RSUD dan Tahun 2008 pada Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp42,18 miliar belum dimanfaatkan.
 - Di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, gedung DPRD yang dibangun TA 2008 s.d. 2009 dan alat hemodialisa yang diadakan TA 2010 dengan total nilai Rp9,97 miliar belum digunakan karena sejak diserahkan telah rusak dan ruangan untuk operasi peralatan belum tersedia.
 - Di Provinsi Sumatera Selatan, bangunan Rumah Sakit Umum Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir yang dibangun TA 2009 seluas 1.320,48 m² atau senilai Rp3,46 miliar belum dimanfaatkan dan dalam kondisi rusak berat.

Penyebab

- 5.65 Kasus-kasus ketidakefektifan terjadi karena PPK kurang memperhatikan ketentuan perencanaan pengadaan BMN dan penganggarannya, penetapan kebijakan yang tidak sejalan dengan kebijakan sebelumnya, dan pengguna/kuasa pengguna barang lemah dalam pengawasan dan pengendalian atas pengamanan.

Rekomendasi

- 5.66 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat entitas yang diperiksa antara lain agar menyusun SOP pengadaan barang, mengambil langkah strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengamanan aset negara/daerah.
- 5.67 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 6

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

- 6.1 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan upaya pemerintah dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang pada prinsipnya menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 6.2 Program Jamkesmas dimulai Tahun 2008 merupakan kelanjutan dari program-program yang sudah dijalankan sebelumnya, terakhir melalui program asuransi sosial yang dikenal dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJK MM) (2004-2005) dan Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) (2006-2007).
- 6.3 Perubahan kebijakan dari Program Askeskin menjadi Program Jamkesmas dilakukan karena belum ada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu penyelenggaraan Askeskin kurang terkendali, hal ini terbukti dalam Tahun 2007 terjadi defisit anggaran (hutang klaim) kepada PT Askes (Persero) senilai Rp1,13 triliun. Perubahan kebijakan dari Program Askeskin menjadi Program Jamkesmas menempatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai regulator sekaligus sebagai pengelola, sementara PT Askes (Persero) hanya dilibatkan dalam manajemen kepesertaan.
- 6.4 Pada semester II Tahun 2012, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda pada 33 provinsi. Pemeriksaan dilakukan terhadap entitas-entitas berikut:
 - Kemenkes meliputi Sekretariat Jenderal (d.h.i Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan) dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK) dan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - PT Askes (Persero) meliputi kantor pusat, regional dan cabang;
 - Badan Pusat Statistik (BPS) di provinsi/kabupaten/kota;
 - RSUP, RSUD yang berbentuk badan layanan umum daerah (BLUD), RSUD yang berbentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan rumah sakit (RS) swasta;

- puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan, bidan praktek swasta (yang disampling); dan
- pemerintah daerah (pemda) provinsi/kabupaten/kota (dinas kesehatan dan dinas sosial).

6.5 Pemeriksaan mencakup realisasi anggaran Program Jamkesmas Tahun 2010, 2011 dan Semester I Tahun 2012. Cakupan pemeriksaan tersebut disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1. Anggaran dan Realisasi Program Jamkesmas TA 2010, 2011 dan Semester I TA 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Keterangan	TA 2010		TA 2011		Semester 1 TA 2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Anggaran Kementerian Kesehatan	25.274.803,99	22.428.341,51	30.919.269,94	26.871.294,93	30.636.024,33	14.920.350,66
Anggaran Jamkesmas	4.270.690,50	4.099.486,73	6.348.595,94	6.278.967,95	7.494.900,00	6.686.340,00
% terhadap Anggaran Kementerian Kesehatan	16,90%	18,28%	20,53%	23,37%	24,46%	44,81%
Cakupan Pemeriksaan		1.293.725,19		1.744.473,34		1.584.985,08
% terhadap Anggaran Jamkesmas		31,56%		27,78%		23,70%

Tujuan Pemeriksaan

6.6 Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas dan Jamkesda bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah

- seluruh peserta Jamkesmas telah terlayani program Jamkesmas;
- SPI atas kepesertaan, pelayanan, penyaluran dan penggunaan dana serta pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
- dana Jamkesmas dan Jamkesda telah diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat; dan
- dana Jamkesmas telah dipergunakan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 6.7 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 6.8 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	9	-
2	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	6	-
	Sub Total I	15	-
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kekurangan Penerimaan	2	151.832,07
2	Administrasi	4	-
3	Ketidakefektifan	12	352.419,49
	Sub Total II	18	504.251,56
	Total	33	504.251,56

- 6.9 Pemeriksaan pengelolaan Program Jamkesmas dan Jamkesda meliputi pemeriksaan atas kepesertaan, pelayanan, pendanaan, verifikasi, serta monitoring dan evaluasi program. Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

Jamkesmas

Kepesertaan

- 6.10 Peserta Program Jamkesmas Tahun 2010 s.d. Semester 1 Tahun 2012 adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya ditanggung oleh pemerintah sejumlah 76,4 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan *database* kepesertaan Jamkesmas dari Tahun 2008 s.d 2012 dan data tersebut masih menggunakan data BPS pada Tahun 2005. Jumlah masyarakat miskin tersebut kemudian ditetapkan melalui surat keputusan secara *by name* dan *by address* oleh kepala daerah sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, sebesar 72.049.380 jiwa untuk kabupaten/kota yang berisi nama dan alamat, serta 4.350.620 jiwa bagi gelandangan, pengemis, anak terlantar dan masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas.
- 6.11 Data ini tidak berubah (statis) dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, sementara jumlah masyarakat miskin setiap tahun berubah, untuk mengatasi itu, maka Pemerintah Pusat (Kemenkes) menghimbau daerah untuk membiayai masyarakat dengan mendorong dikembangkannya Jamkesda di daerah.
- 6.12 Hasil pemeriksaan atas kepesertaan Program Jamkesmas menunjukkan adanya 5 kasus kelemahan sistem pengendalian intern berupa 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai, 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja, 1 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan 1 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati serta 3 kasus ketidakefektifan yaitu penggunaan anggaran tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukkan senilai Rp44,68 juta. Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- *Database* kepesertaan Jamkesmas belum mutakhir dan akurat dimana terdapat *database* kepesertaan Jamkesmas ganda, alamat peserta jamkesmas tidak lengkap, peserta Jamkesmas tidak dikenal oleh pihak kelurahan, peserta Jamkesmas yang terdaftar telah meninggal dunia, peserta Jamkesmas yang terdaftar berstatus PNS, TNI, dan pensiunan, serta data jumlah orang miskin pada 2 provinsi dan 13 kabupaten/kota berbeda antar instansi. Hal tersebut mengakibatkan Program Jamkesmas berpotensi tidak tepat sasaran, penganggaran dana Jamkesmas tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang sebenarnya, dan tidak terjaminnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yang tidak terdaftar.

- Terdapat pelayanan Jamkesmas kepada orang yang tidak berhak karena adanya peminjaman kartu Jamkesmas pada RSUD Kabupaten Mamuju senilai Rp4,75 juta dan pada RSUD Ulin Banjarmasin senilai Rp39,92 juta mengakibatkan proses klaim dana Jamkesmas dengan menggunakan dokumen palsu yang tidak sesuai peruntukkan.
- Terdapat penerbitan surat keabsahan peserta (SKP) tidak sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.903 Tahun 2011 yaitu terdapat penerbitan 3.247 SKP tanpa dilengkapi kartu Jamkesmas, dokumen identitas diri atau rujukan, dokumen pendukung yang diserahkan tidak sesuai, dan dokumen pendukung palsu; SKP diterbitkan di luar jam operasional PT Askes (Persero) dan bukan oleh petugas PT Askes (Persero); SKP diterbitkan melebihi batas waktu 2x24 jam sejak pasien masuk RS; SKP tetap diterbitkan meskipun nama pasien yang tertera dalam kartu peserta Jamkesmas berbeda dengan nama yang tertera dalam KK/KTP.
- Terdapat dinas/instansi sosial setempat menerbitkan surat rekomendasi tidak sesuai dengan Peraturan Menkes No.903 Tahun 2011 yaitu untuk masyarakat dengan kategori mampu dan bukan termasuk kategori gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas dan penghuni panti sosial. Selain itu juga terdapat pemalsuan surat rekomendasi yang diperoleh melalui perantara (calo). Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemberian pelayanan Jamkesmas kepada masyarakat miskin tidak tepat sasaran.

Pelayanan

- 6.13 Pelayanan kesehatan dalam Program Jamkesmas menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. Pelayanan rawat jalan tingkat primer diberikan di puskesmas dan jaringannya. Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat (IGD).
- 6.14 RS berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut (rujukan) dan gawat darurat kepada pasien peserta Jamkesmas dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jamkesmas. Salah satu bentuk dukungan atas pelaksanaan Program Jamkesmas adalah kebijakan pimpinan RS untuk memberikan kemudahan pelayanan dan dukungan pendanaan bagi pasien Jamkesmas.
- 6.15 Hasil pemeriksaan atas pelayanan Program Jamkesmas menunjukkan adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern berupa entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan 3 kasus ketidakefektifan yaitu 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/

terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan 2 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Delapan RS mewajibkan pasien Jamkesmas memberikan jaminan uang muka (deposit) dengan kisaran antara Rp50,00 ribu hingga Rp1,00 juta.
- Lima belas RS belum mempunyai prosedur/alur pelayanan yang mengakibatkan pasien mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
- Dua RS membatasi jumlah pasien Jamkesmas (memberikan kuota) per hari, sehingga pasien yang sudah memperoleh SKP namun telah melebihi kuota hari tersebut baru bisa mendapatkan pelayanan pada keesokan harinya.
- Sebanyak 2 RSUP, 6 RSUD Provinsi, 7 RSUD Kabupaten dan 5 RSUD Kota yang belum sepenuhnya memberikan pelayanan kesehatan karena keterbatasan ketersediaan obat sesuai *formularium* dan sarana prasarana antara lain alat medis, bahan habis pakai (BHP), laboratorium, alat cuci darah, alat orthopedi, *CT Scan*, MRI. Selain itu pasien Jamkesmas pada 1 RSUP, 3 RSUD provinsi, 4 RSUD kabupaten dan 5 RSUD kota masih diharuskan membeli obat/alat kesehatan di luar RS. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis pada pasien Jamkesmas belum tercapai.
- Sebanyak minimal 1.900 pasien Jamkesmas pada 4 RSUP, 9 RSUD provinsi, 11 RSUD kabupaten, 7 RSUD kota, 5 puskesmas, 2 klinik bersalin, dan 10 bidan praktek swasta masih dikenakan biaya tambahan (iur biaya) minimal senilai Rp374,54 juta antara lain untuk biaya administrasi, honor, pembelian obat, biaya laboratorium, biaya pengurusan jenazah dan biaya transportasi. Seharusnya pemda bisa berkontribusi dalam menanggung biaya-biaya tersebut antara lain untuk biaya transportasi pasien rujukan dan biaya pemulangan pasien.
- Pemrosesan berkas klaim pasien Jamkesmas pada 78 RS di 33 provinsi lambat mengakibatkan RS terlambat mengajukan berkas klaim ke verifikator independen sehingga RS terlambat memperoleh pencairan dana klaim Jamkesmas.

Pendanaan

- 6.16 Sumber dana Program Jamkesmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenkes. Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah masing-masing meliputi antara lain.

- Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jamkesmas.
 - Biaya transportasi rujukan dari RS yang merujuk ke pelayanan kesehatan lanjutan serta biaya pemulangan pasien menjadi tanggung jawab Pemda asal pasien.
 - Biaya transportasi petugas pendamping pasien yang dirujuk.
 - Dukungan biaya operasional manajemen tim koordinasi dan tim pengelola Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota.
 - Biaya lain-lain diluar pelayanan kesehatan, sesuai dengan spesifik daerah dapat dilakukan oleh daerahnya.
- 6.17 Adapun dana operasional manajemen tim pengelola di provinsi bersumber dari APBN melalui dana dekonsentrasi, sedangkan untuk tim pengelola kabupaten/kota bersumber dari APBN melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 6.18 Pembiayaan program Jamkesmas mengacu kepada tarif Indonesia *Case Base Groups* (INA CBG's) seperti yang disyaratkan dalam pedoman pelaksanaan (Manlak) Program Jamkesmas. INA CBG's merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengajuan klaim pelayanan oleh PPK berupa RS, puskesmas ataupun balai pengobatan kepada masyarakat miskin di Indonesia yang dibuktikan dengan kepesertaan Jamkesmas. Tarif INA CBG's merupakan pembiayaan berdasarkan diagnosa penyakit dengan sistem paket. Dalam software INA CBG's sudah ditentukan tarif dan standar lama hari perawatan rata-rata (*Average Length of Stay/ALOS*) untuk setiap diagnosa penyakit.
- 6.19 Metode penetapan tarif RS untuk RSUP ditetapkan dalam SK Direktur RS dengan mengacu pada Keputusan Menkes berdasar pada pelayanan yang diberikan kepada pasien (*fee for service*) dan selalu diperbaharui setiap tahun mengikuti keputusan Menkes, sedangkan tarif RSUD ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 6.20 Hasil pemeriksaan atas pendanaan Program Jamkesmas menunjukkan adanya
- kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 3 kasus yang terdiri atas 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, serta 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

- kasus kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp151,83 miliar yang terdiri atas 1 kasus penerimaan negara/daerah belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp1,356 miliar dan 1 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah senilai Rp150,476 miliar.
- kasus administrasi sebanyak 2 kasus yang terdiri atas 1 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) dan 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.
- kasus ketidakefektifan sebanyak 3 kasus senilai Rp3,89 miliar yang terdiri atas 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp3,26 miliar dan 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp634,02 juta.

6.21 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Rekening penampungan dana Jamkesmas di Bank BRI belum memperoleh jasa giro serta jasa giro atas dana Jamkesmas di 20 RS untuk Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 senilai Rp931,66 juta dan di 15 dinas kesehatan untuk Semester I Tahun 2012 senilai Rp424,40 juta belum disetor ke kas negara sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan pendapatan negara atas jasa giro senilai Rp1,35 miliar.
- Terdapat penggunaan dana Jamkesmas pada 49 puskesmas di 12 kabupaten/kota senilai Rp862,09 juta tidak sesuai pedoman pelaksanaan Program Jamkesmas antara lain digunakan untuk rehabilitasi bangunan, pengadaan inventaris komputer dan printer, biaya konsumsi petugas jaga rawat inap, dan biaya konsumsi rapat sehingga pemanfaatan anggaran Jamkesmas untuk puskesmas dan jaringannya tidak tepat sasaran.
- Dana Jamkesmas yang dicairkan dari rekening Jamkesmas RS tidak berdasarkan pertanggungjawaban/klaim yang telah disahkan. Hal tersebut terjadi antara lain pada 23 RS di 19 provinsi TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 terdapat selisih pencairan dana kesehatan Jamkesmas yang tidak berdasarkan pertanggungjawaban yang telah disahkan atau ditandatangani oleh verifikator independen dan direktur RS senilai Rp154,46 miliar dan terdapat pencairan dana luncuran Tahun 2011 senilai Rp5,00 miliar yang diinvestasikan dalam bentuk deposito yang terjadi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Sulawesi Selatan, dengan maksud untuk peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan dana *idle*, namun atas dana deposito tersebut telah dikembalikan ke rekening dana luncuran dan bunganya telah disetor ke kas negara. Pencairan dana tersebut tidak

berdasarkan pertanggungjawaban karena lambatnya proses verifikasi pertanggungjawaban, baik itu verifikasi pada RS maupun oleh verifikator independen, sehingga pihak RS menarik dana terlebih dahulu untuk membiayai operasional Program Jamkesmas.

- Terdapat penggunaan langsung hasil klaim dana Jamkesmas Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 pada 200 puskesmas dan 9 RS yang belum berstatus BLUD senilai Rp150,47 miliar. Penggunaan langsung tersebut digunakan untuk pembayaran jasa medis, obat-obatan, bahan habis pakai, pelayanan darah, dan administrasi pendukung lainnya.
- Pada 8 RSUD di 8 kabupaten/kota terdapat pemanfaatan dana dan porsi pembagian jasa layanan senilai Rp2,40 miliar yang tidak sesuai ketentuan penggunaan dana Jamkesmas. Dana tersebut antara lain digunakan untuk pemberian bantuan kepada direktur dan staf RSUD, masyarakat, dan pihak lain, pembelian laptop dan AC, pembayaran kepada verifikator independen, dan pengadaan obat di luar *formularium*. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan dana Jamkesmas untuk RSUD senilai Rp2,40 miliar tidak tepat sasaran.
- Penyelesaian penyetoran sisa dana Jamkesmas TA 2010 dan 2011 ke kas negara senilai Rp7,97 miliar belum seluruhnya dilaksanakan oleh tim pengelola pusat dan terdapat dana Jamkesmas Yandas dan Jampersal TA 2011 yang belum dipertanggungjawabkan di rekening dinas kesehatan kabupaten/kota senilai Rp263,57 miliar.
- Terdapat 11 RS menanggung beban selisih tarif pelayanan kesehatan antara tarif RS dengan tarif INA CBG's dengan nilai keseluruhan senilai Rp167,46 miliar yang disebabkan antara lain karena lama hari perawatan lebih tinggi dibandingkan lama hari perawatan yang telah ditetapkan dalam INA CBG's. Selain itu juga terdapat pelayanan kesehatan Jamkesmas yang tidak dan/atau belum dapat diklaim dengan nilai keseluruhan senilai Rp71,58 miliar antara lain karena dinas sosial (Dinsos) terlambat mengeluarkan surat rekomendasi yang disyaratkan untuk pasien Jamkesmas non peserta, sehingga petugas Askes tidak dapat menerbitkan SKP, adanya perbedaan antara obat yang tercantum dalam resep dengan yang tercantum dalam *formularium* Jamkesmas yang ditetapkan oleh Kemenkes, dan prosedur langkah-langkah verifikasi yang ada pada mekanisme INA DRG/INA CBGs tidak terpenuhi. Hal tersebut mengakibatkan RS menanggung beban atas perbedaan tarif yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan.
- Pencairan klaim Jamkesmas RSAB Harapan Kita senilai Rp634,02 juta pada Tahun 2012 terlambat karena dokumen yang diajukan ke verifikator independen belum lengkap dan terdapat perbedaan penanganan pasien thalassaemia antara RSAB Harapan Kita dengan Kemenkes.

Verifikasi

- 6.22 Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPK. Verifikasi di puskesmas dilaksanakan oleh tim pengelola Jamkesmas kabupaten/kota sedangkan verifikasi di PPK lanjutan dilakukan oleh verifikator independen.
- 6.23 Hasil pemeriksaan atas kegiatan verifikasi pada Program Jamkesmas menunjukkan adanya 2 kasus kelemahan SPI berupa 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja dan 1 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati serta 1 kasus administrasi berupa pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid).
- 6.24 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Persetujuan klaim Jamkesmas pada 21 RS senilai Rp10,02 miliar dan verifikasi pembayaran Jamkesmas pada 29 puskesmas di enam kabupaten minimal senilai Rp228,87 juta tidak didukung dengan dokumen yang memadai serta terdapat persetujuan klaim ganda pada 3 RS senilai Rp109,73 juta. Hal tersebut mengakibatkan administrasi pertanggungjawaban pelayanan sebagai dasar realisasi pembayaran klaim jamkesmas tidak dapat diyakini kebenarannya.
 - Verifikator independen di RS Umum Pemerintah Nasional (RSUPN) sejak tahun 2008 tidak mendokumentasikan hasil verifikasi ke dalam suatu berita acara hasil verifikasi sampai dengan pemeriksaan berakhir. Verifikator independen hanya menerbitkan laporan pertanggungjawaban dana Jamkesmas yang ditandatangani oleh verifikator independen dan disetujui oleh Direktur RSUPN Cipto Mangunkusumo.

Monitoring dan Evaluasi

- 6.25 Untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan Jamkesmas diperlukan kegiatan monitoring (pemantauan) dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jamkesmas, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.
- 6.26 Hasil pemeriksaan atas kegiatan monitoring dan evaluasi pada Program Jamkesmas menunjukkan adanya 1 kasus kelemahan SPI berupa SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, 1 kasus administrasi berupa proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), dan 1 kasus ketidakefektifan berupa fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

6.27 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Laporan pertanggungjawaban atas pelayanan dan pembiayaan belum disampaikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada tim pengelola pusat serta tim pengelola dan tim koordinasi Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- Kemenkes dalam menunjuk pelaksana manajemen kepesertaan dilakukan dengan penunjukan langsung kepada PT Askes (Persero) berdasarkan UU BUMN No 19/2003 pasal 66. Seharusnya menggunakan PP No 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena dana yang akan digunakan oleh Kemenkes dalam membayar jasa yang diberikan oleh PT Askes (Persero) menggunakan dana APBN. Sehingga perjanjian kerja sama yang telah dipergunakan oleh Kemenkes dengan PT Askes (Persero) sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 menjadi cacat hukum dan berpotensi mendapat gugatan hukum.

Jamkesda

6.28 Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan di luar kuota program Jamkesmas, pemerintah daerah yang memiliki kemampuan sumber daya memadai dapat mengelola dan mengembangkan program jaminan kesehatan daerah di daerahnya masing-masing. Program Jamkesda dilaksanakan berdasarkan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di luar kuota Jamkesmas agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

6.29 Hasil pemeriksaan atas Program Jamkesda menunjukkan adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern berupa 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja serta 2 kasus ketidakefektifan yaitu pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp348,47 miliar. Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Hasil pemeriksaan *database* menunjukkan bahwa *database* kepesertaan Jamkesda pada 18 pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak akurat antara lain *database* kepesertaan Jamkesda pada satu provinsi dan dua kabupaten belum mengakomodir 78.845 jiwa masyarakat miskin. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terlayani Jamkesmas berpotensi tidak mendapatkan program pelayanan kesehatan Jamkesda.
- *Database* kepesertaan Jamkesda pada 17 pemerintah provinsi/kabupaten/kota mencantumkan 41.811 data ganda antara lain data peserta Jamkesda tercatat dalam *database* kepesertaan Jamkesmas dan/atau Askes, data dalam *database* peserta Jamkesmasda memiliki nama, alamat, tanggal lahir, dan status dalam keluarga yang sama namun memiliki nomor peserta lebih dari satu, dan data peserta jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (JPK Gakin) tercatat dalam *database* kepesertaan Jamkesmas.

- *Database* kepesertaan Jamkesda pada dua pemerintah kota mencantumkan 479 data yang tidak mutakhir yaitu data peserta Jamkesda yang meninggal, pindah alamat, dan/atau alamat tidak jelas serta tanpa identitas keluarga (nomor kartu keluarga), tanggal lahir, dan hubungan keluarga.
- Terdapat tagihan klaim program Jamkesda yang belum dibayar oleh 120 pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada PPK yaitu RSUD, RSUP, RSUD, balai kesehatan mata masyarakat (BKMM), balai kesehatan paru masyarakat (BKPM), dan puskesmas senilai Rp348,47 miliar. Hal itu mengakibatkan kelancaran arus kas PPK terganggu dan dapat mempengaruhi kinerja PPK yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selanjutnya.
- Mekanisme penerbitan surat pernyataan miskin (SPM) sebagai salah satu persyaratan pelayanan Jamkesda pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tidak sesuai Keputusan Direktur Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Timur No.003 Tahun 2012, antara lain terdapat beberapa pasien yang tidak memenuhi 14 kriteria keluarga miskin antara lain menempati rumah permanen, penghasilan dari pensiun maupun penghasilan sebagai karyawan swasta, memiliki usaha, memiliki kendaraan bermotor yang merupakan harta benda yang bernilai diatas Rp500,00 ribu. Selain itu juga terdapat tiga orang pengguna SPM di Kabupaten Pasuruan memiliki jaminan/asuransi kesehatan dari instansi/ perusahaan antara lain dari BRINGIN Life, Jamsostek maupun Inhealth.

Penyebab

6.30 Kasus-kasus pada Program Jamkesmas dan Jamkesda pada umumnya terjadi karena:

- Kemenkes belum membuat perangkat peraturan dan perangkat panduan yang mengatur pemutakhiran data pada tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
- Kepesertaan Jamkesda tidak memperhatikan kepesertaan Jamkesmas, dan peraturan yang disusun mengenai Jamkesda tidak mempertimbangkan dinamika di tataran pelaksanaan;
- pemerintah provinsi/kabupaten/kota kurang optimal dalam melaksanakan penyusunan APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terlayani program Jamkesmas di wilayahnya dan pelaksanaan kegiatan tidak optimal dalam melaksanakan pendataan orang miskin;
- kepala puskesmas, direktur RS dan tim pengelola Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya mematuhi Manlak Program Jamkesmas tentang kewajiban membuat dan menyampaikan laporan secara tepat waktu dan kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi, dan koordinasi atas pelaksanaan program jamkesmas di wilayahnya;

- kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan direktur RS tidak mematuhi ketentuan terkait sisa dana dan jasa giro Jamkesmas yang harus dikembalikan ke kas negara pada setiap akhir tahun dan kemenkes belum melakukan evaluasi atas tarif pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas; dan
- verifikator independen dan tim pengelola lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Simpulan

6.31 Hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan sebagai berikut

- belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemutakhiran data masyarakat miskin tidak baik, dan adanya perbedaan dalam data masyarakat miskin antar instansi;
- masih terdapat risiko masyarakat miskin belum dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis dan tidak tercakup baik dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda;
- penyaluran, pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas 2010 dan 2011;
- reviu kinerja pengelola program tidak dilakukan dan umpan balik atas pelaporan yang telah dilakukan pengelola Jamkesmas di tingkat daerah tidak diberikan secara berkala oleh pengelola tingkat pusat; dan
- tim pengelola dan tim koordinasi Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyetoran sisa Jamkesmas tahun 2010 dan 2011 belum selesai dilaksanakan.

Rekomendasi

6.32 Terhadap kasus-kasus pada Program Jamkesmas dan Jamkesda tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar

- menyusun perangkat peraturan dan perangkat panduan dalam hal pemutakhiran data dari tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke Kemenkes serta melakukan *updating* data peserta Jamkesmas;
- membuat surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan direktur RS agar tertib dalam menyetorkan sisa dana Jamkesmas dan melakukan evaluasi terhadap penerapan INA CBG's terkait dengan ketidakseimbangan/ketimpangan/kesenjangan antara tarif INA CBG's dan biaya riil RS;

- menginstruksikan direktur RS vertikal dan berkoordinasi dengan Mendagri agar menginstruksikan direktur RSUD untuk membuat kebijakan dan prosedur/alur pelayanan yang mendukung pelaksanaan Jamkesmas;
 - menetapkan mekanisme sanksi kepada verifikator independen RS dan tim pengelola Jamkesmas kabupaten/kota apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan;
 - membuat surat edaran kepada tim pengelola, tim koordinasi, kepala dinas kesehatan, direktur RS dan kepala puskesmas untuk mematuhi Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas tentang kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat waktu; dan
 - berkoordinasi dengan Mendagri untuk melakukan sinkronisasi kebijakan Jamkesda.
- 6.33 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 7

Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

- 7.1 Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak kerja sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7.2 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi (*cost recovery*) pada tujuh entitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk tujuh wilayah kerja (WK).
- 7.3 Entitas KKKS pada tiap-tiap WK tersebut meliputi KKKS JOB Pertamina Petrochina Salawati WK Salawati, KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ WK *OffShore North West Java* (ONWJ), KKKS PT Pertamina EP WK Eks Pertamina, KKKS Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu WK *Coastal Plain* Pekanbaru, KKKS Medco E&P Indonesia WK Rimau, KKKS Mobil Cepu Ltd WK Cepu, dan KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering WK Ogan Komering.
- 7.4 Anggaran dan realisasi *cost recoverable* tujuh KKKS yang diperiksa masing-masing senilai USD9.19 miliar dan USD10.30 miliar. Sementara itu, cakupan pemeriksaan adalah 100% dari realisasi *cost recoverable* atau senilai USD10.30 miliar. Nilai temuan pemeriksaan atas tujuh KKKS tersebut senilai USD37.86 juta dan Rp6,33 miliar.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.5 Pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak bagi hasil dan KKS Minyak dan Gas Bumi, bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan volume dan nilai *lifting* minyak mentah dan gas, *cost recovery* (biaya yang dimintakan penggantian), termasuk pembebanan biaya dari *home office* yang dilakukan oleh KKKS, serta perhitungan *equity to be split* (bagi hasil) bagian pemerintah dan bagian kontraktor.

Hasil Pemeriksaan

- 7.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 7.7 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- 7.8 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 11 kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada tujuh KKKS, sebagai berikut
- sebanyak 7 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja
 - sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 2 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 7.9 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 24.
- 7.10 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi pada KKKS JOB Pertamina Petrochina Salawati WK Salawati, terdapat pengadaan sirtu, batu kapur, dan batu pecah tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan material yang diterima berpotensi tidak sesuai dengan *purchase order* dan spesifikasi teknis yang dibayarkan.

Penyebab

- 7.11 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan KKKS minyak dan gas belum memiliki *standard operating procedure* (SOP) pengadaan barang dan jasa serta pelabelan aset, belum menyusun perencanaan dan dokumen pertanggungjawaban yang memadai, tidak melakukan pemantauan kinerja penyedia barang dan jasa, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian dari SKMIGAS.

Rekomendasi

- 7.12 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan KKS minyak dan gas, BPK telah merekomendasikan agar KKKS menyusun SOP pengadaan barang/jasa dan pelabelan aset serta mengenakan sanksi kepada rekanan/vendor sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu BPK juga merekomendasikan agar SKMIGAS meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang/jasa di KKKS.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.13 Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan dan administrasi.
- 7.14 Hasil pemeriksaan berdasarkan kelompok temuan ketidakpatuhan atas pelaksanaan KKS pada tujuh KKKS mengungkapkan adanya 53 kasus, terdiri dari kekurangan penerimaan sebanyak 50 kasus senilai USD37,864.67 ribu dan Rp6,33 miliar, dan 3 kasus administrasi. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok disajikan dalam Lampiran 23 dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 24.

Kekurangan Penerimaan (50 kasus senilai USD37,864.67 ribu dan Rp6,33 miliar atau total seluruhnya ekuivalen Rp372,48 miliar)

- 7.15 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/perusahaan milik negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan milik negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 7.16 Pada umumnya temuan kekurangan penerimaan atas pelaksanaan KKS tersebut merupakan koreksi perhitungan bagi hasil migas (*koreksi cost recovery* yang tidak dapat diperhitungkan/*non cost recovery*).
- 7.17 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 50 kasus senilai USD37,864.67 ribu dan Rp6,33 miliar atau total seluruhnya ekuivalen Rp372,48 miliar.
- 7.18 Kasus-kasus tersebut terjadi pada tujuh entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Koreksi *Cost Recovery* Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

(dalam ribu USD dan juta rupiah)

No	Entitas	Koreksi <i>Cost Recovery</i>
1	KKKS Job Pertamina Petrochina Salawati	USD1,826.64
2	KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ	USD1,439.60
		Rp6.325,77
3	KKKS PT Pertamina EP	USD2,992.03
4	KKKS Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu	USD1,304.99
		Rp12,76
5	KKKS Medco E&P Indonesia	USD518.20
6	KKKS Mobil Cepu Ltd.	USD29,747.10
7	KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering	USD36.11
JUMLAH		USD37,864.67
		Rp6.338,53
Jumlah dalam Rupiah *		372.489,89

*valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012

7.19 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- KKKS Mobil Cepu Ltd WK Cepu, terdapat peningkatan nilai kontrak No. C-3207122 *lease of early production facility* senilai USD28.02 juta yang terdiri dari perubahan lingkup kerja (PLK) yang tidak mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS senilai USD25.109 juta dan *importation taxes* senilai USD2.91 juta yang tidak dapat dibebankan dalam *cost recovery*. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembebanan *cost recovery* Tahun 2011 senilai USD28.02 juta.
- KKKS Pertamina EP WK Eks Pertamina, terdapat pembebanan biaya *home office overhead* (HOO) dalam *cost recovery* Tahun 2011 senilai USD1.68 juta tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan pembebanan *cost recovery* lebih besar dan perhitungan bagi hasil negara kurang dari yang seharusnya.

Penyebab

- 7.20 Kasus-kasus tersebut disebabkan KKKS tidak mengakomodir PLK dalam suatu amandemen kontrak yang mendapat persetujuan BPMIGAS terlebih dulu, dan KKKS kurang cermat dalam melakukan perhitungan HOO.

Rekomendasi

- 7.21 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi dan mengeluarkan PLK yang tidak didukung *change order* dari *cost recovery*, dan mengeluarkan biaya HOO dari perhitungan *cost recovery* serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

Administrasi (tiga kasus)

- 7.22 Penyimpangan administratif adalah suatu temuan yang terjadi karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian/potensi kerugian, tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak berpengaruh terhadap keuangan negara/perusahaan.
- 7.23 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.
- 7.24 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tiga kasus administrasi pada dua entitas, yaitu satu kasus pada KKKS Mobil Cepu Ltd WK Cepu dan sebanyak dua kasus pada KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering WK Ogan Komering. Ketiga kasus tersebut mengenai Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya.
- 7.25 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi pada KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering (PTOK) yaitu, pemungutan denda/bunga pajak senilai USD14.25 ribu tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang mengakibatkan potensi klaim dari rekanan di masa mendatang.

Penyebab

- 7.26 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan KKKS tidak mematuhi *production sharing contract* (PSC) dan lalai dalam mempedomani ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku.

Rekomendasi

- 7.27 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar SKMIGAS menegur KKKS untuk mematuhi PSC dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 7.28 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 8

Operasional Badan Usaha Milik Negara

- 8.1 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 15 entitas yaitu PT Tugu Pratama Indonesia/Tugu *Insurance Company Ltd* (PT TPI), PT Hutama Karya (Persero) (PT HK), PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/Bali *Tourism Development Corporation* (Persero) (PT BTDC), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (PT DPS), PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI), PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (PT DKB), PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN), PT Inhutani III (Persero), Perum Perhutani, PT Mega Eltra (PT ME), PT ASABRI (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PT BRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (PT BTN), PT Askes (PT Persero), dan PT Sucofindo (Persero).
- 8.2 Cakupan pemeriksaan operasional atas 15 BUMN adalah senilai Rp129,19 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp144,08 triliun. Total temuan pemeriksaan operasional BUMN senilai Rp1,09 triliun yang merupakan temuan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, ketidakhematan dan ketidakefektifan. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak berdampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.
- 8.3 Secara umum tujuan pemeriksaan pada 15 BUMN adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan, kredit, pengendalian biaya dan kegiatan investasi serta kegiatan pengadaan maupun pembentukan holding dan program santunan/dana pensiun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 8.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 8.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.6 Hasil pemeriksaan SPI pada 15 entitas pemeriksaan mengungkapkan adanya 275 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 32 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 69 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, serta 174 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 25
- 8.7 Terdapat 32 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebagai berikut
- sebanyak 26 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 4 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 2 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
- 8.8 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27
- 8.9 Terdapat 69 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, sebagai berikut
- sebanyak 8 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 1 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 22 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan;
 - sebanyak 34 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain berupa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan.
- 8.10 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

- 8.11 Terdapat 174 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, sebagai berikut
- sebanyak 30 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 136 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
 - sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern ;
 - sebanyak 6 kasus Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
 - sebanyak 1 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.
- 8.12 Kasus-kasus tersebut terjadi di 14 entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.
- 8.13 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di PT DPS (Persero), direksi perusahaan tidak cermat dalam pelaksanaan pembangunan Depot BBM Muara Sabak Jambi, mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain dan membayar material/jasa yang belum diterima senilai USD3.963,72 dan melaporkan pendapatan dan biaya proyek melebihi capaian sesungguhnya.
 - Di PT Askes (Persero), terdapat kelemahan desain pengendalian intern biaya operasional perjalanan dinas, yaitu tidak terdapat koordinasi antara bagian tertentu dan pihak bagian rumah tangga tidak proaktif menagih uang tiket *refund* yang harus dikembalikan selama Tahun 2011 dan 2012 sehingga PT Askes berpotensi menanggung kerugian atas tiket kategori *refund* serta uang harian yang terlanjur dibayar.
 - Di PT KPNB (Persero), PT KPNB dan PTPN tidak memiliki kebijakan penyesuaian harga komoditas pada saat amandemen kontrak, sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari tambahan selisih harga selama periode 2009 s.d. 2010.

Penyebab

- 8.14 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pimpinan/direksi/dewan komisaris BUMN tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, entitas belum memiliki kebijakan intern yang mengatur perubahan harga jual komoditas dan belum memiliki mekanisme monitoring yang efektif atas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Selain itu disebabkan ketidakcermatan pimpinan BUMN dalam penetapan kebijakan serta pelaksana kegiatan tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 8.15 Terhadap kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi BUMN agar memperhatikan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyusun atau memperbaiki standar atau pedoman serta meninjau kembali peraturan yang ditetapkan. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar direksi BUMN membuat kebijakan intern yang mengatur perubahan harga jual komoditas untuk amandemen kontrak serta memberikan sanksi untuk pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 8.16 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 8.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 26 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 27.

Tabel 8.1. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	10	8.062,06
2	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	22	734.930,68
3	Kekurangan Penerimaan	17	218.792,60
4	Administrasi	121	-
5	Ketidakhematan	9	7.339,46
6	Ketidakefektifan	34	130.843,37
Jumlah		213	1.099.968,17

- 8.17 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 213 kasus senilai Rp1,09 triliun, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 14 BUMN.

Kerugian Negara/Perusahaan (10 kasus senilai Rp8,06 miliar)

- 8.18 Kerugian negara/perusahaan adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- 8.19 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 8.20 Kasus-kasus kerugian negara/perusahaan pada umumnya meliputi pekerjaan adanya kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan lain-lain kasus kerugian negara/perusahaan.
- 8.21 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya kerugian negara/perusahaan sebanyak 10 kasus senilai Rp8,06 miliar yang disajikan dalam Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Perusahaan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Negara/Perusahaan			
1	Kekurangan volume pekerjaan	5	301,77
2	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1	560,86
3	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	6.274,41
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	304,52
5	Lain-lain	1	620,50
Jumlah		10	8.062,06

- 8.22 Kasus-kasus tersebut terjadi di 6 entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.
- 8.23 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT BTDC (Persero), pencairan deposito perusahaan beserta bunganya pada Tanggal 6 Juni 2011 senilai Rp6,11 miliar di transfer ke rekening PT Incor Energy dan dimanfaatkan PT Incor Energy sehingga menimbulkan kerugian negara/perusahaan senilai Rp6,11 miliar.
 - Di PT ASABRI (Persero), terdapat kelebihan pembayaran tunjangan untuk yatim/piatu dari anggota TNI, POLRI dan PNS Kemenhan/POLRI dari Tahun 2011 s.d. 2012 (Semester I) yang tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian senilai Rp304,52 juta.
 - Di PT Askes (Persero), kekurangan volume atas pekerjaan renovasi gedung PT Askes (Persero) kantor Cabang Boyolali pada kantor Divisi Regional VI Semarang pada Tahun 2010 mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan minimal senilai Rp66,26 juta.

- 8.24 Dari kasus-kasus kerugian negara/perusahaan atas operasional BUMN senilai Rp8,06 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/perusahaan senilai Rp66,27 juta oleh PT Askes (Persero).

Penyebab

- 8.25 Kasus-kasus kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena pejabat pelaksana kurang maksimal dalam melakukan proses verifikasi dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan pimpinan BUMN tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 8.26 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi BUMN untuk memberikan sanksi kepada pejabat terkait dan meminta pejabat terkait untuk menarik kelebihan pembayaran atas kerugian perusahaan yang terjadi, serta berusaha memperoleh pengembalian deposito dan segera mengambil langkah/tindakan hukum.

Potensi Kerugian Negara/Perusahaan (22 kasus senilai Rp734,93 miliar)

- 8.27 Potensi kerugian negara/perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 8.28 Kasus-kasus potensi kerugian negara atau perusahaan pada umumnya meliputi kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian/seluruhnya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan dan lain-lain kasus potensi kerugian negara/perusahaan.
- 8.29 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya potensi kerugian negara/perusahaan sebanyak 22 kasus senilai Rp734,93 miliar yang disajikan dalam Tabel 8.3.

Tabel 8.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Negara/Perusahaan			
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian/seluruhnya	2	38.439,57
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	17	329.240,22
3	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1	281,49
4	Lain-lain	2	366.969,40
Jumlah		22	734.930,68

8.30 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

8.31 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT ASABRI (Persero), pembayaran klaim dalam Tahun 2011 dan 2012 (Semester I) senilai Rp179,66 miliar tanpa dasar penetapan klaim dan Surat Panggilan (SP). Selain itu terdapat kurang catat saldo kas di bank senilai Rp144,89 miliar, sehingga perusahaan berpotensi mengalami kerugian minimal senilai Rp324,55 miliar.
- Di PT TPI, upaya penagihan piutang dengan umur di atas dua tahun dan proses penutupan polis PT SKJ yang belum optimal senilai Rp81,74 miliar sampai dengan pertengahan Juni 2012 sehingga perusahaan berpotensi kehilangan penggantian beban klaim yang telah dibayar, terganggu arus kasnya, dan menanggung beban klaim terlalu berat.
- Di Perum Perhutani, kegiatan penyaluran modal kerja untuk trading Usaha Hutan Rakyat (UHR) untuk Tahun 2010 dan 2011 tidak berjalan atau macet, sehingga perusahaan berpotensi mengalami kerugian minimal senilai Rp33,88 miliar.

Penyebab

8.32 Kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena pelaksana kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 8.33 Terhadap kasus kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMN untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, membuat SOP penagihan piutang dan tindak lanjut terhadap piutang-piutang yang tidak tertagih dan meninjau kembali peraturan yang ditetapkan serta memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Kekurangan Penerimaan (17 kasus senilai 218,79 miliar)

- 8.34 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara dhi. perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.
- 8.35 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan, penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan, dan penggunaan langsung penerimaan negara/perusahaan.
- 8.36 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 17 kasus senilai Rp218,79 miliar yang disajikan dalam Tabel 8.4.

Tabel 8.4. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan			
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	3	1.619,67
2	Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	12	162.842,60
3	Penggunaan langsung penerimaan negara/perusahaan	2	54.330,33
Jumlah		17	218.792,60

- 8.37 Kasus-kasus tersebut terdapat pada 9 entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

- 8.38 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut
- Di PT HK (Persero), piutang yang belum terselesaikan mengakibatkan perusahaan tidak dapat memanfaatkan dana yang tertanam dalam piutang senilai Rp91,37 miliar.
 - Di PT Dok dan PKB (Persero), penerimaan pembayaran atas Kerjasama Operasi dan Transfer (KSOT) *Floating Dock* 9600 TLC dari PT Tri Warako Utama terlambat. Selain itu perusahaan tidak menerbitkan faktur pajak atas transaksi sewa area galangan I mengakibatkan tertundanya penerimaan negara yang berasal dari PPN minimal senilai Rp3,15 miliar.
 - Di PT Askes (Persero), PT Askes (Persero) belum menetapkan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kantor Cabang Utama Kediri pada TA 2012, kantor Regional IV dan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan pada TA 2012 serta belum mengenakan denda atas keterlambatan serah terima renovasi gedung kantor Cabang Utama Tangerang pada TA 2011, mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda senilai Rp394,14 juta.
- 8.39 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas operasional BUMN senilai Rp218,79 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara oleh PT Askes (Persero) senilai Rp335,15 juta.

Penyebab

- 8.40 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut pada umumnya terjadi karena SPI belum memadai, Direksi BUMN tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya serta pelaksana tidak tertib atau kurang cermat dalam mengelola dokumen dan pencatatan piutang.

Rekomendasi

- 8.41 Atas kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi terkait untuk menagih dan menyetor ke kas negara/perusahaan atas pendapatan dan denda yang terlambat diterima serta lebih cermat dalam melakukan pencatatan piutang.

Administrasi (121 kasus)

- 8.42 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian atau potensi kerugian, tidak mengurangi hak negara/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 8.43 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) selain

perjalanan dinas, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/perusahaan), dan penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/perusahaan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain. Selain itu kasus penyimpangan yang bersifat administrasi juga meliputi pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/perusahaan melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.

- 8.44 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 121 kasus penyimpangan administrasi yang disajikan dalam Tabel 8.5.

Tabel 8.5. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Operasional BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Penyimpangan administrasi			
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) selain perjalanan dinas	4	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/perusahaan)	7	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/perusahaan	1	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain	98	-
5	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	5	-
6	Penyetoran penerimaan negara/perusahaan melebihi batas waktu yang ditentukan	2	-
7	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
8	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-
10	Lain-lain	1	-
Jumlah		121	-

- 8.45 Kasus-kasus administrasi tersebut terjadi 9 entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

8.46 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT ME, terdapat transaksi penjualan semen dan kimia agro selama Tahun 2010, 2011 dan 2012 tidak didukung surat perjanjian, sehingga adanya resiko hak dan kewajiban tidak terlindungi.
- Di PT KAI (Persero), pengadaan *balas* pada Tahun 2011 diindikasikan tidak dilaksanakan senilai Rp1,23 miliar sehingga pembayaran kepada rekanan tidak dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya.
- Di PT BRI (Persero) Tbk, terdapat 28 debitur belum memenuhi *affirmative covenant* dalam perjanjian kredit diantaranya debitur tidak menyampaikan laporan periodik yang diwajibkan, debitur belum mengasuransikan dan menilai ulang agunan, serta debitur belum mengikat agunan. Hal tersebut mengakibatkan strategi dan tindak lanjut yang ditempuh PT BRI (Persero) Tbk, kurang efektif serta kepentingan atas agunan kredit kurang terjamin.

Penyebab

8.47 Kasus-kasus administrasi tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat terkait lalai/kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan.

Rekomendasi

8.48 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat terkait agar melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan ketentuan yang berlaku.

Ketidakhematan (9 kasus senilai Rp7,33 miliar)

8.49 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

8.50 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan mengenai penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar dan pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga.

8.51 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 9 kasus ketidakhematan senilai Rp7,33 miliar yang disajikan dalam Tabel 8.6.

Tabel 8.6. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakhematan			
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	2	447,88
2	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	7	6.891,58
	Jumlah	9	7.339,46

8.52 Kasus-kasus tersebut terjadi di 5 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

8.53 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya sebagai berikut

- Di PT KAI (Persero), perusahaan telah membayar bea masuk atas pengadaan wesel *Corriago* dan *Insurance Paid (CIP)* pada Tahun 2011 yang dilakukan oleh pihak ke tiga sehingga terjadi ketidakhematan senilai Rp2,96 miliar.
- Di Perum Perhutani, realisasi tanaman yang tumbuh dalam rangka rehabilitasi dan usaha pengembangan hutan rakyat Tahun 2011 tidak mencapai target sehingga pengeluaran biaya tanaman senilai Rp1,21 miliar tidak dimanfaatkan sesuai rencana.
- Di PT ME, PT Multi Mas Chemindo (PT MMC) mengajukan klaim atas keterlambatan PT ME mengirimkan pupuk urea dan adanya pupuk urea yang bercampur dengan garam pada Tahun 2012 sehingga menimbulkan pemborosan senilai Rp650,34 juta.

Penyebab

8.54 Kasus ketidakhematan tersebut antara lain terjadi karena pejabat terkait tidak cermat dalam menjalankan tugasnya serta tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Rekomendasi

8.55 Atas kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada pejabat terkait agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pegawai/pejabat terkait .

Ketidakefektifan (34 kasus senilai Rp130,84 miliar)

- 8.56 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 8.57 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan mengenai penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 8.58 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 34 kasus ketidakefektifan senilai Rp130,84 miliar mengenai ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 8.7.

Tabel 8.7. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan			
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6	118.845,07
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	885,20
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5	11.113,10
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	21	-
Jumlah		34	130.843,37

- 8.59 Kasus kasus tersebut terjadi di 10 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

8.60 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT ME, terdapat material sisa proyek rekonduktoring SUTT 150 kV Babat - Tuban pada Tahun 2012 senilai Rp885,20 juta belum dimanfaatkan sehingga dana yang tertanam dalam material proyek tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional perusahaan.
- Di PT BTN (Persero) Tbk, monitoring atas pengembalian pokok kredit 21 debitur yang berasal dari penjualan unit rumah masih lemah sehingga terdapat penjualan unit rumah yang tidak digunakan sebagai pengembalian pokok kredit
- Di PT Inhutani III (Persero), pengelolaan kegiatan produksi dan penjualan kayu unit Pelaihari tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi mengganggu pengembangan hutan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan keberlangsungan usaha PT Inhutani III.

Penyebab

8.61 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut pada umumnya terjadi karena manajemen entitas tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rekomendasi

- 8.62 Atas kasus tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada manajemen entitas agar melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan ketentuan yang berlaku
- 8.63 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 9

Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya

9.1 Pada Semester II Tahun 2012, BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 36 objek pemeriksaan yaitu 34 objek pemeriksaan di BUMD dan 2 objek pemeriksaan RSUD provinsi dan kabupaten. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 15 bank perkreditan rakyat/bank pembangunan daerah (BPR/BPD), 6 perusahaan daerah air minum (PDAM), 13 badan usaha milik daerah (BUMD) lainnya, dan 2 rumah sakit umum daerah (RSUD). Kegiatan operasional tersebut pada umumnya mencakup pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya/belanja, dan kegiatan investasi. Rincian entitas disajikan dalam Lampiran 30.

Tujuan Pemeriksaan

- 9.2 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) entitas baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pengelolaan pendapatan, biaya/belanja, dan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengelolaan BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya.
- 9.3 Cakupan pemeriksaan operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya adalah senilai Rp14,98 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp41,02 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp1,20 triliun. Rincian cakupan pemeriksaan untuk operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD lainnya tersebut disajikan dalam Tabel 9.1 berikut.

Tabel 9.1. Cakupan Pemeriksaan Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Entitas	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan	
					Jumlah Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	7	8
1	BPR/BPD	16.210.277,90	39.395.239,57	13.674.112,56	276	996.788,18
2	PDAM	659.719,15	605.902,08	467.969,68	127	13.353,93
3	RSUD	381.629,85	239.514,90	239.514,90	24	31.346,43
4	BUMD Lainnya	333.639,97	782.235,79	608.278,83	195	160.289,23
JUMLAH		17.585.266,87	41.022.892,34	14.989.875,97	622	1.201.777,77

Hasil Pemeriksaan

- 9.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 9.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 9.6 Hasil pemeriksaan atas operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya menunjukkan adanya 303 kasus kelemahan SPI yang meliputi 138 kasus pada BPR/BPD, 56 kasus pada PDAM, 10 kasus pada RSUD, dan 99 kasus pada BUMD Lainnya sebagaimana disajikan dalam Tabel 9.2.

Tabel 9.2. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya

No	Sub Kelompok	BPR/BPD	PDAM	RSUD	BUMD Lainnya	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>						
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	15	7	2	20	44
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	56	28	6	38	128
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	67	21	2	41	131
Jumlah		138	56	10	99	303

- 9.7 Berdasarkan Tabel 9.2, hasil pemeriksaan atas operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya mengungkapkan 303 kasus sebagai akibat adanya kelemahan SPI, dengan rincian sebanyak 44 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebanyak 128 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan sebanyak 131 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam lampiran 28 dan rincian per entitas disajikan dalam Lampiran 30.
- 9.8 Kasus-kasus kelemahan SPI di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Bank DKI, Provinsi DKI Jakarta, sistem teknologi informasi bank belum mendukung penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) khususnya

perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai yang mengakibatkan timbulnya risiko kesalahan dalam penentuan dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Tahun Buku (TB) 2011 individual yang berdampak pada laporan laba rugi.

- Di PDAM Tirta Kepri di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan, pencatatan, dan penatausahaan persediaan bahan kimia periode TB 2011 dan Semester I TB 2012 tidak tertib sehingga nilai persediaan dalam neraca tidak diyakini dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk pembelian.
- Di RSUD DR Soedarso, Provinsi Kalimantan Barat, penatausahaan distribusi gas medis sentral periode 2011 s.d. Agustus 2012 tidak tertib yang mengakibatkan penggunaan gas medis sentral tidak dapat diketahui secara pasti dan rawan terhadap penyalahgunaan pemakaian dan pendistribusian gas medis.
- Di PD Banama Tingang Makmur (BTM) Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pengelolaan pendapatan kamar Hotel Dandang Tingang yang tersaji dalam laporan laba rugi (L/R) berbeda dengan rincian yang berasal dari *billing system* mengakibatkan nilai realisasi pendapatan kamar pada bulan Maret, Desember 2011, dan Mei 2012 tidak dapat diyakini sebagai nilai yang akurat dan andal dan didukung dengan bukti-bukti sumber transaksi yang lengkap, serta terdapat risiko kesalahan penyajian nilai kas, pendapatan, dan L/R pada Laporan Keuangan.
- Di BPR Sumsel, Provinsi Sumatera Selatan, penetapan gaji dan honorarium serta penghasilan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris PT BPR Sumsel Tahun 2011 tidak memiliki persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sehingga penetapan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Di PDAM Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tingkat kebocoran distribusi air Tahun 2011 dan 2012 melebihi batas toleransi minimal sehingga perusahaan berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal senilai Rp1,12 miliar.
- Di RSUD RA Basoeni Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, laporan penggunaan langsung hasil penjualan obat dan alat kesehatan habis pakai periode Januari s.d. September 2012 yang tidak disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset senilai Rp4,95 miliar mengakibatkan pertanggungjawaban transaksi pendapatan dan belanja pada RSUD RA Basoeni belum sepenuhnya dikelola secara transparan yang berpotensi penyalahgunaan.
- Di PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, penetapan pihak ketiga sebagai *financial partner* dalam pendanaan *participating interest* (PI) Tahun 2006 belum didukung studi kelayakan mengakibatkan pengelolaan PI di blok Cepu belum memberikan hasil yang optimal.

- Di PD BPR NTB Lombok Tengah (Loteng), Provinsi Nusa Tenggara Barat, belum menerapkan beberapa standar operasional prosedur *know your costumer* (SOP-KYC) yang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 sehingga BPR NTB Loteng berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan ilegal serta tidak dapat memantau dan mengevaluasi nasabah secara memadai.
- Di PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sistem dan prosedur akuntansi, serta standar operasional prosedur belum disusun dan ditetapkan sehingga aktivitas operasional belum optimal, menimbulkan berbagai penafsiran baik pelaksanaan administrasi keuangan maupun dalam penyusunan laporan keuangan PDAM, pegawai tidak memiliki standar minimal yang diharapkan perusahaan, dan pihak manajemen kurang memperoleh bahan penilaian kinerja pegawai secara terukur.

Penyebab

- 9.9 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pimpinan instansi tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, belum menyusun SOP, tidak cermat dalam penetapan kebijakan, pimpinan/direksi dan pelaksana kegiatan tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta kurangnya koordinasi.

Rekomendasi

- 9.10 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan instansi untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyusun SOP, meninjau kembali kebijakan yang telah ditetapkan, serta pimpinan instansi agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya dan meningkatkan koordinasi.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 9.11 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 9.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 29 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 30.

Tabel 9.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok	BPR/BPD		PDAM		RSUD		BUMD Lainnya		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
1	Kerugian Daerah/ Perusahaan	35	169.147,64	21	1.973,59	1	254,10	10	2.160,61	67	173.535,94
2	Potensi Kerugian Daerah/ Perusahaan	32	455.650,53	6	3.637,16	1	140,83	13	4.905,80	52	464.334,32
3	Kekurangan Penerimaan	18	4.676,87	8	352,37	6	8.578,91	31	151.828,89	63	165.437,04
4	Administrasi	32		22		4		35		93	-
5	Ketidakhematan	11	19.894,54	7	7.204,97	1	166,34	3	178,39	22	27.444,24
6	Ketidakefektifan	10	347.418,60	7	185,84	1	22.206,25	4	1.215,54	22	371.026,23
Jumlah		138	996.788,18	71	13.353,93	14	31.346,43	96	160.289,23	319	1.201.777,77

9.12 Berdasarkan Tabel 9.3, hasil pemeriksaan atas operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya mengungkapkan 319 kasus senilai Rp1,20 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dengan rincian kerugian daerah/perusahaan sebanyak 67 kasus senilai Rp173,53 miliar (diantaranya terdapat indikasi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 18 kasus senilai Rp2,58 miliar), potensi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 52 kasus senilai Rp464,33 miliar, kekurangan penerimaan sebanyak 63 kasus senilai Rp165,43 miliar, administrasi sebanyak 93 kasus, ketidakhematan sebanyak 22 kasus senilai Rp27,44 miliar, dan ketidakefektifan sebanyak 22 kasus senilai Rp371,02 miliar. Rincian per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam lampiran 29 dan rincian per entitas disajikan dalam lampiran 30.

9.13 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- Di PT Bank Riau Kepri, Provinsi Riau, pelaksanaan penagihan kredit hapus buku Tahun 2010 senilai Rp93,77 miliar belum optimal meskipun telah dibentuk tim penagihan kredit macet dan kerja sama pelelangan jaminan kredit macet dan hapus buku sehingga berpotensi tidak tertagih.
- Di PT Jatim Marga Utama, Provinsi Jawa Timur, terdapat penggunaan dana perusahaan untuk pengusahaan jalan tol belum dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan indikasi kerugian senilai Rp1,04 miliar.
- Di PT BPD Jabar dan Banten, Provinsi Jawa Barat, penyaluran kredit Bank BJB Cabang Sukajadi akhir Tahun 2008 s.d. Tahun 2010 bermasalah berpotensi tidak tertagih yang berpotensi merugikan perusahaan senilai Rp76,18 miliar.

- Di PDAM Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, penyelesaian tunggakan TB 2009 – 2012 dan pemberian sanksi atas langganan air yang menunggak lebih dari tiga bulan tidak optimal mengakibatkan potensi tidak tertagihnya pendapatan senilai Rp1,30 miliar.
 - Di PT Jasa Sarana di Bandung, Provinsi Jawa Barat, hasil divestasi saham Tahun 2011 yang belum diterima oleh perusahaan senilai Rp125,27 miliar, mengakibatkan perusahaan tidak bisa memanfaatkan hasil divestasi.
 - Di PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung, Provinsi Bali, belum dikenakannya denda keterlambatan atas pekerjaan potensi *uprating* IPA di Estuary pada Tahun 2011 dan pekerjaan *integrated asset management solution* (IAMS) pada Tahun 2012 mengakibatkan PDAM belum menerima denda keterlambatan senilai Rp167,04 juta.
 - Di PD BPR NTB Lombok Tengah, Provinsi NTB, penyetoran pajak atas bunga tabungan dan deposito Tahun 2010 s.d. 2012 terlambat mengakibatkan pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan pajak senilai Rp3,63 miliar.
 - Di PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan untuk TB 2011 dan 2012 (s.d Mei) tidak sesuai dengan Perda Kab. Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2000 pasal 43 ayat (1) sehingga harga pengadaan barang pada PDAM Tirta Sanjung Buana senilai Rp968,24 juta tidak dapat diyakini sebagai harga yang paling menguntungkan perusahaan.
 - Di PT BPD Jabar dan Banten, Provinsi Jawa Barat, terdapat pembayaran gaji, tunjangan, tantiem dan uang penghargaan untuk TB 2010 dan 2011 bagi direksi yang sudah tidak aktif mengakibatkan pemborosan senilai Rp13,33 miliar.
 - Di PDAM Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat realisasi biaya pegawai untuk TB 2011 dan 2012 yang melebihi ketentuan mengakibatkan ketidakhematan atas pengeluaran biaya kerja perusahaan minimal senilai Rp3,09 miliar.
 - Di PT Pertambangan dan Energi (PDPDE) di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pemberian pinjaman yang tidak tepat sasaran selama periode 2007 – 2008 senilai Rp1,21 miliar.
- 9.14 Dari kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan atas operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya senilai Rp173,53 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah/perusahaan senilai Rp768,43 juta yaitu PDAM Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp485,37 juta, PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung senilai Rp279,01 juta, dan PT BPD Bali senilai Rp4,05 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 30.

- 9.15 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah/perusahaan atas operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya senilai Rp464,33 miliar, telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah/perusahaan senilai Rp46,83 miliar yaitu PT BPD Jabar dan Banten senilai Rp46,768 miliar, PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung senilai Rp33,50 juta, dan PD Petromuba senilai Rp29,45 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 30.
- 9.16 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya senilai Rp165,43 miliar, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah/perusahaan senilai Rp949,47 juta yaitu di PT BPD Jabar dan Banten senilai Rp518,61 juta, di PT BPD Jateng senilai Rp12,53 juta, di PD BPR Bank Salatiga senilai Rp1,50 juta, di PDAM Tirta Mangutama senilai Rp266,83 juta, dan di PD Pasar Bermartabat Kota Bandung senilai Rp150,00 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 30.

Penyebab

- 9.17 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pimpinan instansi kurang cermat dalam menyusun kebijakan, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, pelaksana kegiatan yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta kurangnya koordinasi antar instansi.

Rekomendasi

- 9.18 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan instansi agar lebih cermat dalam menyusun kebijakan dan rencana aksi, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi antar instansi, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor ke kas daerah/perusahaan sesuai dengan ketentuan.
- 9.19 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 10

Operasional Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya

- 10.1 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan PDTT atas operasional Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya atas 27 objek pemeriksaan pada 7 kementerian/lembaga (KL), 1 Badan dan 6 pemerintah provinsi/kabupaten/kota
- 10.2 Pemeriksaan operasional BLU dilaksanakan pada 11 objek di 5 Kementerian/Lembaga yaitu Kepolisian Negara RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perindustrian. Adapun pemeriksaan operasional BLU di lingkungan pemerintah daerah meliputi 6 objek pemeriksaan operasional RSUD yaitu RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, RSUD Dr. Hardjono S Kabupaten Ponorogo, RSUD Ulin Provinsi Kalimantan Selatan, RSUD Kota Bitung, RSUD Kabupaten Mimika dan RSUD Kabupaten Paniai. Sedangkan pemeriksaan operasional Badan Lainnya dilaksanakan pada 10 objek pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) dan Otorita Asahan.
- 10.3 Kegiatan operasional tersebut pada umumnya mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan, belanja, dan aset Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012.
- 10.4 Cakupan pemeriksaan operasional BLU dan Badan Lainnya adalah senilai Rp13,61 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp23,91 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp1,02 triliun merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 10.5 Pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya bertujuan untuk menilai apakah
- pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan (penerimaan, belanja dan aset) termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai; dan
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan (penerimaan, belanja dan aset) termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku serta memperhatikan aspek kehematan dan efektifitas mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Hasil Pemeriksaan

- 10.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 10.7 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 10.8 Salah satu tujuan pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya adalah untuk menilai apakah SPI dari entitas telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan operasional BLU dan Badan Lainnya.
- 10.9 Hasil evaluasi atas SPI operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 10.10 Hasil evaluasi SPI terhadap operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan terdapat 151 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 42 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 69 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 40 kasus kelemahan struktur pengendalian intern seperti disajikan dalam Tabel 10.1. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 31.

Tabel 10.1. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	17	25	42
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	35	34	69
3	Struktur Pengendalian Intern	23	17	40
	Jumlah	75	76	151

- 10.11 Terdapat 42 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas jenis-jenis temuan disajikan dalam Tabel 10.2.

Tabel 10.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan				
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	12	22	34
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	3	5
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	3	-	3
	Jumlah	17	25	42

- 10.12 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 objek pemeriksaan disajikan dalam Lampiran 33.
- 10.13 Terdapat 69 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.3.

Tabel 10.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pendapatan Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	-	3
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	5	7	12
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	7	12	19
4	pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	-	1
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	10	28
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	5	6
	Jumlah	35	34	69

10.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di 25 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

10.15 Terdapat 40 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.4.

Tabel 10.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern				
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	17	15	32
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	1	6
3	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	1	-	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	1	1
	Jumlah	23	17	40

- 10.16 Kasus-kasus tersebut terjadi di 20 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.
- 10.17 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di LPP RRI Jakarta, Denpasar, Malang, dan Madiun, terdapat penerimaan jasa siaran non siaran (jasinonsi) RRI termasuk penerimaan di Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 masing-masing minimal senilai Rp57,01 miliar dan Rp14,09 miliar tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan RRI. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan jasinonsi kurang saji minimal senilai Rp57,01 miliar dan Rp14,09 miliar dalam LK BA 999 TA 2011 dan LK BA 116 Semester I TA 2012.
 - Di RS Bhayangkara Tk II Mappaoudang di Makassar, Kepolisian Negara RI, terdapat penerimaan hibah selama Tahun 2010 s.d Semester I Tahun 2012 dari Pertamina dan BTN masing-masing senilai Rp1,04 miliar dan Rp40,00 juta belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh register sehingga mengakibatkan pengelolaan atas uang/barang yang berasal dari hibah langsung berisiko tinggi mengalami penyimpangan dan penyalahgunaan.
 - Di LPP TVRI Jakarta, Pontianak, dan Makassar, terdapat kesepakatan pengenaan tarif bidang usaha siaran dan sewa ruangan Tahun 2011 s.d 2012 (Semester I) antara TVRI Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan dengan pihak ketiga lebih rendah dari tarif yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan senilai Rp2,24 miliar.

Penyebab

- 10.18 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme penyetoran, pencatatan, dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah. Selain itu, pejabat entitas kurang mengoptimalkan potensi penerimaan dari pihak ketiga.

Rekomendasi

- 10.19 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menyajikan penerimaan dalam laporan keuangan, melaporkan dan memantau proses registrasi hibah serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam menjalankan perjanjian dengan pihak ketiga.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 10.20 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi,

ketidakhematan dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 10.5. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 32 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 33.

Tabel 10.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kerugian Negara/Daerah	95	69.749,97
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	21	78.239,65
3	Kekurangan Penerimaan	66	824.011,28
4	Administrasi	97	-
5	Ketidakhematan	18	4.769,63
6	Ketidakefektifan	35	43.574,07
	Jumlah	332	1.020.344,60

- 10.21 Berdasarkan Tabel 10.5, hasil pemeriksaan mengungkapkan 332 kasus senilai Rp1,02 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan BLU dan Badan Lainnya atas 27 objek pemeriksaan pada 7 KL, 1 Badan dan 6 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- 10.22 Rincian temuan pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya berdasarkan pengelompokan operasional BLU dan Badan Lainnya disajikan dalam Tabel 10.6.

Tabel 10.6. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya Berdasarkan Pengelompokan BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan							
1	Kerugian Negara/ Daerah	55	64.496,32	40	5.253,65	95	69.749,97
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	12	35.338,01	9	42.901,64	21	78.239,65
3	Kekurangan Penerimaan	39	19.489,22	27	804.522,06	66	824.011,28
4	Administrasi	37	-	60	-	97	-
5	Ketidakhematan	5	489,28	13	4.280,35	18	4.769,63
6	Ketidakefektifan	25	40.686,28	10	2.887,79	35	43.574,07
	Jumlah	173	160.499,11	159	859.845,49	332	1.020.344,60

Kerugian Negara/Daerah (95 kasus senilai Rp69,74 miliar)

- 10.23 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 10.24 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 10.25 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara/daerah meliputi belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan pemahalan harga (*mark up*). Kasus-kasus kerugian negara/daerah juga meliputi biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan serta lain-lain kasus kerugian negara/daerah.
- 10.26 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 95 kasus senilai Rp69,74 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 30 kasus senilai Rp56,53 miliar. Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya disajikan dalam Tabel 10.7.

Tabel 10.7.Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Negara/Daerah							
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1	284,85	-	-	1	284,85
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	2	628,95	2	628,95
3	Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	153,29	-	-	1	153,29
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	12	5.796,10	8	949,01	20	6.745,11
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	10	3.921,36	5	826,69	15	4.748,05
6	Pemahalan harga (mark up)	13	35.547,28	4	399,52	17	35.946,80
7	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	31,71	3	106,27	4	137,98
8	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	2	314,44	4	181,94	6	496,38
9	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6	16.366,13	1	19,77	7	16.385,90
10	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	7	723,16	10	2.115,43	17	2.838,59
11	Lain-lain	2	1.358,00	3	26,07	5	1.384,07
	Jumlah	55	64.496,32	40	5.253,65	95	69.749,97

10.27 Kasus-kasus tersebut terjadi di 23 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

10.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Universitas Indonesia (UI), terdapat peralatan yang telah diserahkan terimakan rekanan namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak yaitu pengadaan peralatan Laboratorium FIK UI, peralatan Laboratorium Metalurgi FT UI, peralatan Laboratorium Pasca Sarjana Biomedis, peralatan Pendidikan dan Laboratorium FMIPA UI, dan peralatan Laboratorium Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan UI senilai Rp11,08 miliar. Selain itu, terdapat penyusunan HPS lebih tinggi dari yang seharusnya atas pengadaan peralatan Laboratorium Metalurgi FT UI, peralatan Laboratorium Pasca Sarjana Biomedis, peralatan Pendidikan dan Laboratorium FMIPA UI, dan peralatan Laboratorium Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan UI senilai Rp9,46 miliar. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara atas pengadaan peralatan laboratorium Tahun 2011 senilai Rp20,54 miliar.

- Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto Kepolisian Negara RI di Jakarta, terdapat indikasi pemahalan harga (*mark up*) nilai kontrak pengadaan alat kesehatan yang diperuntukkan bagi ICU, ICCU, NICU, IBS, IGD, Rawat Inap dan Poli Spesialis Kardiologi Tahun 2011 sehingga berindikasi merugikan negara senilai Rp2,49 miliar.
 - Di LPP TVRI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara, terdapat panjar kerja yang digunakan untuk biaya produksi siaran, biaya perjalanan dinas, dan biaya pemeliharaan belum dipertanggungjawabkan sejak Tahun 2004 s.d. 2012 pada TVRI Sumatera Utara dan Jakarta sehingga merugikan negara senilai Rp935,87 juta.
 - Di LPP RRI Jakarta, Denpasar, Malang, dan Madiun, terdapat pengeluaran kas Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 tanpa didukung bukti atau kuitansi rincian penggunaan uang pada LPP RRI Jakarta, Denpasar, dan Madiun senilai Rp424,44 juta sehingga pengeluaran kas senilai Rp424,44 juta diragukan kewajarannya.
 - Di LPP RRI Jakarta, Surabaya, Cirebon, dan Purwokerto, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun 2011 pada Direktorat Teknologi dan Media Baru di Jakarta, RRI Surabaya, RRI Cirebon, dan RRI Purwokerto sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp269,06 juta.
 - Di RSUD Ulin di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat kegiatan studi banding *benchmarking* dan *Clinical* keperawatan bagi tenaga supervisor askep RSUD Ulin Banjarmasin di RS SA Malang dan RSUP SI Denpasar Tahun 2011 tidak didukung bukti dan informasi yang memadai sehingga menimbulkan kerugian daerah senilai Rp284,85 juta.
- 10.29 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 30 kasus senilai Rp31,22 miliar dari seluruh kasus kerugian negara/daerah pada operasional BLU dan Badan Lainnya pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum tersebut di antaranya sebanyak 13 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp6,14 miliar, sebanyak 7 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp15,73 miliar, dan sebanyak 4 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp5,25 miliar. Dari temuan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah senilai Rp13,14 juta.
- 10.30 Dari kasus-kasus kerugian negara/daerah atas operasional BLU dan Badan lainnya senilai Rp69,74 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyeteroran uang ke kas negara/daerah senilai Rp361,92 juta, di antaranya yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) senilai Rp172,98 juta, BLU Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) dan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM), Kementerian Perindustrian senilai Rp142,51 juta, dan RSUD Ulin Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp32,00 juta.

Penyebab

- 10.31 Kasus-kasus kerugian negara/daerah pada umumnya terjadi karena Panitia pelelangan tidak mematuhi ketentuan pelelangan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK dan panitia pemeriksa barang tidak melakukan penelitian spesifikasi dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, pelaksana pekerjaan tidak memenuhi kewajibannya, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

- 10.32 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah, BPK telah merekomendasikan antara lain pimpinan entitas memberikan sanksi kepada PPK/Panitia Pelelangan/Panitia Pemeriksa Barang yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian negara yang terjadi dengan cara mengganti peralatan yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan/atau menyetor uang ke kas negara/daerah.

Potensi Kerugian Negara/Daerah(21 kasus senilai Rp78,23 miliar)

- 10.33 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 10.34 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, dan aset tidak diketahui keberadaannya. Selain itu terdapat kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih dan lain-lain kasus potensi kerugian.
- 10.35 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya potensi kerugian negara/daerah sebanyak 21 kasus senilai Rp78,23 miliar, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.8.

Tabel 10.8. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Negara/Daerah							
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2	27.715,59	-	-	2	27.715,59
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	-	1	103,50	2	103,50
3	Aset dikuasai pihak lain	-	-	2	1.241,81	2	1.241,81
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	3	865,02	1	43,27	4	908,29
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	921,68	4	41.493,06	5	42.414,74
6	Lain-lain	5	5.835,72	1	20,00	6	5.855,72
	Jumlah	12	35.338,01	9	42.901,64	21	78.239,65

10.36 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

10.37 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di LPP TVRI Jakarta, Padang, dan Samarinda, terdapat piutang usaha periode 30 Juni 2012 dari jasa siaran dan non siaran senilai Rp40,61 miliar yang berumur antara 1 tahun – 8 tahun dan penyelesaiannya berlarut-larut sehingga mengakibatkan pendapatan LPP TVRI Pusat, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur minimal senilai Rp40,61 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan operasional TVRI dan berpotensi tidak tertagih.
- Di UI, terdapat beberapa item pekerjaan yang tercantum dalam *bill of quantity* melebihi kebutuhan yang sebenarnya senilai Rp22,44 miliar dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan senilai Rp5,22 miliar pada Pembangunan Rumpun Kesehatan atau *Development World Class University at University of Indonesia* Tahun 2011, namun atas pekerjaan tersebut baru direalisasikan pembayaran uang muka sehingga mengakibatkan indikasi potensi kerugian negara seluruhnya senilai Rp27,66 miliar.

- Di UGM, terdapat kesalahan dalam penurunan nilai nominal saham (*stock split*) yang tidak diikuti dengan kenaikan jumlah lembar saham atas penyertaan modal UGM pada PT GI Tahun 2011 sehingga kepemilikan saham UGM pada PT GI berpotensi hilang senilai Rp506,34 juta.
- 10.38 Terdapat temuan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 5 kasus senilai Rp31,09 miliar dari seluruh kasus potensi kerugian negara/daerah pada Operasional BLU dan Badan Lainnya pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut di antaranya sebanyak 2 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya.

Penyebab

- 10.39 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah pada umumnya terjadi karena entitas tidak mempunyai SOP untuk mengamankan penerimaan negara di seluruh satker tentang kerja sama dengan mitra kerja untuk siaran dan non siaran serta tidak mengintensifkan penagihan piutang, pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pelelangan, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam kontrak, dan pejabat pengelola kurang optimal dalam pengamanan barang.

Rekomendasi

- 10.40 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas menyusun dan memberlakukan SOP untuk mengamankan penerimaan negara dan mengoptimalkan penagihan piutang usaha serta pengembalian aset negara. Selain itu, juga memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan.

Kekurangan Penerimaan (66 kasus senilai Rp824,01 miliar)

- 10.41 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 10.42 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, penerimaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

- 10.43 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 66 kasus senilai Rp824,01 miliar, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.9.

Tabel 10.9. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan							
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor kas negara/daerah	12	4.057,38	4	1.071,80	16	5.129,18
2	Penerimaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas kas negara/daerah	23	12.291,67	19	790.195,20	42	802.486,87
3	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	3	1.554,19	3	13.254,44	6	14.808,63
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	1.585,98	1	0,62	2	1.586,60
	Jumlah	39	19.489,22	27	804.522,06	66	824.011,28

- 10.44 Kasus-kasus tersebut terjadi di 22 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

- 10.45 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Otorita Asahan, terdapat saldo dana penerimaan dari PT Inalum berupa *environmental fund* (EF) dan *development fund* (DF) per 31 Maret 2012 yang dikelola oleh Otoritas Asahan senilai Rp772,46 miliar belum disetorkan ke kas negara sehingga dana senilai tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- Di LPP RRI Jakarta, Banjarmasin, Padang, dan Bukittinggi, terdapat penerimaan jasinonsi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RRI Pusat Pemberitaan, RRI Direktorat LPU, RRI Banjarmasin, RRI Padang, dan RRI Bukit Tinggi senilai Rp12,11 miliar tidak dilaporkan sebagai penerimaan di Laporan Keuangan LPP RRI dan digunakan langsung. Penerimaan tersebut belum dilaporkan sebagai PNBP di Laporan Keuangan Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012. Hal tersebut mengakibatkan pengendalian terhadap penerimaan Jasinonsi sulit dilakukan.

- Di Universitas Indonesia, terdapat kontribusi sebesar 5% dari hasil penerimaan kerjasama lembaga-lembaga di bawah Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu dan Budaya pada Tahun 2011 yang belum diterima mengakibatkan UI berpotensi kehilangan penerimaan dari kontribusi penerimaan dan tidak segera dapat memanfaatkan dana kontribusi minimal senilai Rp3,62 miliar.
 - Di Universitas Gadjah Mada, terdapat perhitungan sewa tanah dan bangunan atas pemanfaatan aset oleh PT BNI tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 sehingga mengakibatkan UGM berpotensi mengalami kekurangan penerimaan atas pemanfaatan tanah senilai Rp1,58 miliar.
- 10.46 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 6 kasus senilai Rp2,92 miliar dari seluruh kasus kekurangan penerimaan pada operasional BLU dan Badan Lainnya pada Semester II Tahun 2012, di antaranya sebanyak 5 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp2,88 miliar.
- 10.47 Dari kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya senilai Rp824,01 miliar, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp1,32 miliar, di antaranya yaitu UI senilai Rp891,50 juta, RS Bhayangkara Tk II Mappaoudang di Makassar senilai Rp238,57 juta, dan UGM senilai Rp103,63 juta.

Penyebab

- 10.48 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola penerimaan negara/daerah, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi

- 10.49 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan antara lain menghentikan penggunaan langsung penerimaan negara dan menyetorkan seluruh penerimaan ke kas negara serta melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah.

Administrasi (97 kasus)

- 10.50 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 10.51 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid), pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma. Selain itu juga meliputi kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan dan perpajakan dll., penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 10.52 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 97 kasus, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.10.

Tabel 10.10.Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Penyimpangan Administrasi				
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	2	2
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5	12	17
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	9	11	20
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-	6	6
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	4	-	4
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah	8	14	22
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dll.	8	3	11
8	Penyetoran penerimaan negara/derah melebihi batas waktu yang ditentukan	2	5	7
9	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1	-	1
10	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-	7	7
	Jumlah	37	60	97

- 10.53 Kasus-kasus tersebut terjadi di 26 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

10.54 Kasus-kasus administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di LPP RRI Surabaya, Cirebon, dan Purwokerto, terdapat aset tanah sebanyak 12 bidang seluas 543.599 m² senilai Rp228,46 miliar belum bersertifikat atas nama RRI pada RRI Surabaya, Cirebon, dan Purwokerto Semester I Tahun 2012 sehingga berpotensi hilang dan dikuasai pihak lain.
- Di Universitas Gadjah Mada, terdapat penyertaan modal ke PT UGM SP senilai Rp29,50 miliar yang tidak ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2009 dan 2010 sehingga mengakibatkan fungsi RKAT sebagai alat kendali pemangku kepentingan tidak terpenuhi dan penyertaan modal UGM ke PT UGM SP senilai Rp29,50 miliar melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART).
- Di RSUD Bitung, Kota Bitung, terdapat penggunaan dana Jamkesmas dan askes TA 2011 s.d. 2012 (Semester I) masing-masing senilai Rp6,81 miliar dan Rp2,26 miliar belum dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sebagai belanja daerah sehingga mengakibatkan nilai realisasi Belanja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bitung belum dilaporkan untuk Tahun 2011 dan Tahun 2012 (Semester I).
- Di LPP TVRI, Jakarta, Padang, dan Samarinda terdapat keterlambatan penyetoran PPh pasal 21 periode Tahun 2011 sampai dengan Semester I Tahun 2012 pada TVRI Pusat selama dua sampai dengan 105 hari senilai Rp7,38 miliar sehingga penerimaan pajak senilai Rp7,38 miliar tidak dapat segera dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai belanja negara dan berisiko disalahgunakan.
- Di LPP TVRI Jakarta, Pontianak, dan Makassar, terdapat PPK/Pejabat Pengadaan RRI Pontianak dan Makassar tidak membuat harga perkiraan sendiri (HPS) dan tidak mempunyai referensi harga sehingga mengakibatkan nilai pengadaan Tahun 2011 senilai Rp2,08 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Penyebab

- 10.55 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta tidak menaati ketentuan dalam pengelolaan aset, investasi, pengadaan barang dan jasa serta pembayaran.

Rekomendasi

- 10.56 Terhadap kasus-kasus administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan entitas meminta *legal audit* atas status penyertaan modal UGM, mengurus sertifikat tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Radio Republik Indonesia, menyetorkan pajak tepat pada waktunya dan mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Ketidakhematan (18 kasus senilai Rp4,76 miliar)

- 10.57 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 10.58 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 18 kasus pemborosan keuangan BLU dan Badan Lainnya atau kemahalan harga senilai Rp4,76 miliar, terdiri atas jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.11.

Tabel 10.11. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Operasional BLU dan Badan lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakhematan							
1	Pemborosan keuangan negara/daerah atau kemahalan harga	5	489,28	13	4.280,35	18	4.769,63
	Jumlah	5	489,28	13	4.280,35	18	4.769,63

- 10.59 Kasus-kasus tersebut terjadi di 10 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.
- 10.60 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di LPP TVRI Jakarta, Pontianak, dan Makassar, terdapat pengadaan barang/jasa Tahun 2011 yang dibiayai dari APBN berupa *Water Proofing* Beton, ICT 2011, ICT 2012 dan plafond ruangan Kepala Bidang Berita tidak sesuai kebutuhan pada TVRI Pusat dan Sulawesi Selatan sehingga mengakibatkan pemborosan penggunaan uang negara senilai Rp3,23 miliar.

- Di LPP TVRI Jakarta, Manado, dan Medan, terdapat pemberian uang lelah periode Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 berdasarkan nota dinas yang tumpang tindih dengan tugas pokok dari masing-masing pegawai/bagian di TVRI Sumut senilai Rp259,02 juta. Selain itu, terdapat pemberian tunjangan representatif Kepala Stasiun yang tumpang tindih dengan biaya representatif dan tunjangan operasional dari Bulan November 2011 s.d. Juni 2012 yang dikeluarkan oleh TVRI Sumut senilai Rp40,00 juta. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas pembebanan uang lelah dan tunjangan representatif senilai Rp299,02 juta.
- Di RSUD Paniai, Kabupaten Paniai, terdapat harga pengadaan obat TA 2011 yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 633/MENKES/SK/III/2011 tentang Harga Obat untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2011 sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp209,40 juta.
- Di Universitas Gadjah Mada, terdapat pengeluaran PT GI Tahun Buku 2011 untuk bonus direksi senilai Rp100,00 juta ketika kondisi perusahaan sedang mengalami rugi kumulatif senilai Rp1,77 miliar sehingga memboroskan keuangan perusahaan senilai Rp100,00 juta.

Penyebab

- 10.61 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa, adanya unsur kesengajaan dalam menerbitkan nota dinas tim guna mencairkan uang lelah, dan kurang optimal melakukan pengawasan.

Rekomendasi

- 10.62 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pejabat yang bertanggung jawab lebih cermat dalam merencanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian uang lelah dan tunjangan representatif.

Ketidakefektifan (35 kasus senilai Rp43,57 miliar)

- 10.63 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

- 10.64 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 10.65 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 35 kasus senilai Rp43,57 miliar, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.12.

Tabel 10.12. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan							
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2	-	-	-	2	-
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	4	5.320,47	1	-	5	5.320,47
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	10	35.365,81	4	2.795,60	14	38.161,41
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	-	1	-	4	-
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5	-	1	-	6	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	3	92,19	4	92,19
	Jumlah	25	40.686,28	10	2.887,79	35	43.574,07

- 10.66 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

- 10.67 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Universitas Indonesia, terdapat beberapa peralatan pendidikan dan laboratorium FMIPA dan peralatan laboratorium Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan UI masih tersimpan dalam dus kemasan barang dan disimpan di gudang penyimpanan yang belum dilakukan uji fungsi dan pelatihan pengoperasian oleh vendor untuk memastikan bahwa peralatan yang diadakan tersebut berfungsi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan barang hasil pengadaan Tahun 2011 senilai Rp28,28 miliar belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal pengadaan.

- Di Universitas Sebelas Maret, terdapat pemanfaatan gedung tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu gedung Kantor Pusat Tahap 4 hasil pembangunan Tahun 2011 senilai Rp2,79 miliar yang semula direncanakan sebagai perkantoran namun digunakan sebagai ruangan pertemuan/aula dan tempat olahraga.
- Di RSUD Bitung, Kota Bitung, terdapat hasil pengadaan alat kesehatan TA 2011 yang tersimpan di gudang, kantor, laboratorium, poliklinik mata, dan bagian radiologi sehingga peralatan kesehatan senilai Rp2,64 miliar tidak efektif dan belum memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya.
- Di BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP), Kementerian Perumahan Rakyat, pengadaan enam unit kendaraan dinas roda empat Tahun 2011 senilai Rp1,71 miliar untuk memenuhi kebutuhan operasional pejabat dan staf BLU-PPP tidak sesuai dengan tujuannya yaitu dipinjam-pakaikan kepada Biro Umum Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga BLU-PPP tidak dapat memanfaatkan kendaraan operasional tersebut secara optimal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLU-PPP.

Penyebab

- 10.68 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam merencanakan dan lalai dalam melaksanakan kegiatan, tidak mempedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 10.69 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan entitas lebih cermat dalam perencanaan kegiatan, mempercepat pemanfaatan hasil pengadaan dan menarik kembali aset yang dipinjam-pakaikan kepada unit lain serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 10.70 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 11

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 11.1 Selain tema-tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester II Tahun 2012 BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya pada 20 objek pemeriksaan yaitu 8 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 6 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, dan 6 objek pemeriksaan BUMN, seperti disajikan dalam Lampiran 36.
- 11.2 Cakupan pemeriksaan atas 20 objek pemeriksaan tersebut, disajikan dalam Tabel 11.1 di bawah ini.

Tabel 11.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas Yang Diperiksa (1)	Cakupan Pemeriksaan (2)	Total Temuan (3)	% Temuan (4) = $\frac{3}{2} \times 100\%$
Pemerintah Pusat	9.443.037,94	495.997,07	5,25%
Pemerintah Daerah	263.022,32	25.330,94	9,63%
BUMN	6.197.168,15	7.347,79	0,12%
Jumlah	15.903.228,41	528.675,80	3,32%

Hasil Pemeriksaan

- 11.3 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 11.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat

- 11.5 Hasil pemeriksaan atas 8 objek pemeriksaan dilingkungan pemerintah pusat, menunjukkan 29 kasus kelemahan SPI dan 56 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp495,99 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 11.6 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 29 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 9 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 19 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 11.7 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 34.
- 11.8 Kasus-kasus tersebut terjadi di 7 objek pemeriksaan seperti disajikan dalam Lampiran 36.
- 11.9 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), laporan bulanan yang disampaikan oleh masing-masing Tim Likuidasi (TL) belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan bank dalam likuidasi, mengakibatkan laporan bulanan yang dibuat dan disampaikan kepada LPS tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat sistem pencatatan persediaan konsentrat pada PT Freeport Indonesia (PT FI) masih lemah mengakibatkan selisih kurang persediaan konsentrat per 31 Desember 2011 sebanyak 11.075,30 *Wet Metric Ton* (WMT).
 - Di Kementerian Kehutanan, kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam Pasal 18 dan 19 PP Nomor 28 Tahun 2011 tidak sejalan dengan penjelasan Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 1990, yaitu zona di luar inti dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu memberi peluang penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kegiatan non kehutanan sehingga akan merusak kawasan hutan konservasi.

- Di Kementerian Pertanian, periode s.d September 2011 penetapan kebutuhan impor, pemberian kuota dan penerbitan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) atas impor daging dan jeroan sapi seluruhnya masih menjadi kewenangan Kementan. Realisasi impor daging sapi Tahun 2010 dan 2011 melebihi kebutuhan impor masing-masing sebanyak 83,8 ribu ton atau 150% dari kebutuhan impor dan 67,1 ribu ton atau 187% dari kebutuhan impor. Perbandingan antara kebutuhan impor dan realisasi daging sapi (tidak termasuk bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam tabel 11.2.

Tabel 11.2. Perbandingan antara Kebutuhan Impor dan Realisasi Daging Sapi (Tidak Termasuk Bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012

(dalam ribu ton)

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kebutuhan konsumsi daging	313,3	325,9	338,7	351,9	365,4
2	Produksi lokal	233,6	250,8	283,0	316,1	349,7
3	kebutuhan impor	79,7	75,1	55,7	35,8	15,7
4	Realisasi impor	150,4	142,8	139,5	102,9	34,6

sumber: PSDS 2010-2014 dan data DJBC

Pada periode Oktober 2011 s.d. sekarang, kewenangan penetapan kebutuhan impor telah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, kewenangan pemberian Persetujuan Impor (PI) oleh Menteri Perdagangan, dan kewenangan pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP) oleh Menteri Pertanian, namun masih ditemukan kelalaian dalam penerbitan PI yang tidak berdasarkan RPP.

Penyebab

- 11.10 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memahami prosedur yang ada serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 11.11 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan rekonsiliasi data secara rutin dan tertulis, melaksanakan sosialisasi, memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengkaji kebijakan pemerintah untuk terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, agar Menteri Pertanian segera memperbaiki administrasi penerbitan RPP dan kuota impor daging sapi, serta berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan terkait perbedaan kuantitas antara PI dengan RPP.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 11.12 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 11.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 35 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 36.

Tabel 11.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	8	1.599,70
2	Potensi Kerugian Negara	5	8.604,77
3	Kekurangan Penerimaan	7	8.748,76
4	Administrasi	27	-
5	Ketidakhematan	1	4.465,90
6	Ketidakefektifan	8	472.577,94
Jumlah		56	495.997,07

- 11.13 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 56 kasus senilai Rp495,99 miliar, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 8 entitas pemerintah pusat.
- 11.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di 8 objek pemeriksaan seperti disajikan dalam Lampiran 36.
- 11.15 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di LPS, terdapat pembayaran klaim simpanan layak bayar kepada nasabah BPR Tripanca Setiadana pada Tanggal 14 Juli 2009 dan 17 Juli 2009 yang terindikasi sebagai penerima kredit fiktif. Pembayaran tersebut dilakukan sebelum laporan audit investigasi BPKP diterbitkan sehingga mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp2,18 miliar.
 - Di Kementerian ESDM, terdapat pelaksanaan pekerjaan pembangunan transmisi, gardu induk dan jaringan distribusi TA 2010 – 2011 tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan kelebihan bayar senilai Rp1,21 miliar.
 - Di Kementerian Pertanian, terdapat lima kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perijinan yang diberikan yaitu PT. IP pada Tahun 2010 mengimpor daging sapi sebanyak 880,50 ton diindikasikan tanpa surat persetujuan pemasukan (SPP), PT. IP diduga memalsukan

40 dokumen invoice pelengkap Persetujuan Impor Barang (PIB), PT. KSU diduga memalsukan lima surat persetujuan impor daging sapi, impor daging dan jeroan sapi sebanyak 22,82 ribu ton oleh 21 importir diindikasikan tanpa melalui prosedur karantina, dan dua importir diduga merubah nilai transaksi impor daging sapi untuk dapat membayar bea masuk yang lebih rendah. Disamping lima kasus di atas terdapat kesalahan pengenaan tarif PNBP jasa tindakan karantina periode tahun 2010 s.d. Oktober 2012 mengakibatkan kekurangan penerimaan minimal senilai Rp26,478 juta dan potensi kekurangan penerimaan negara senilai Rp73,702 juta serta tidak terpungutnya PNBP senilai Rp2,362 miliar sebagai akibat tidak dilakukannya tindakan karantina.

- Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT) yang sudah dinyatakan menjadi bagian pemerintah senilai USD9,97 juta belum dapat dimanfaatkan bagi kepentingan negara. Selain itu terdapat pengadaan jasa konsultasi taksasi Tahun 2008 dan 2009 seluruhnya senilai Rp240,00 juta dilakukan tidak melalui proses lelang, sehingga tidak diperoleh harga yang bersaing dan ekonomis.

- 11.16 Dari kasus-kasus kerugian negara pada PDDT lainnya pemerintah pusat terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 2 kasus senilai Rp1,21 miliar yaitu 1 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp268,73 juta dan sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran, selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp950,53 juta. Selain itu terdapat 1 kasus potensi kerugian negara senilai Rp633,47 juta dan 1 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp928,53 juta.
- 11.17 Dari kasus-kasus kerugian negara pada pemerintah pusat senilai Rp1,59 miliar telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara oleh LPS senilai Rp11,55 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 36.

Penyebab

- 11.18 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian antar instansi terkait dan adanya unsur kesengajaan dari importir untuk memanfaatkan kelemahan pengawasan dan pengendalian tersebut. Selain itu terdapat perbedaan waktu pembayaran simpanan layak bayar dengan laporan audit investigasi.

Rekomendasi

- 11.19 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung

jawab, membuat rencana yang akurat, melaksanakan pengamanan dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dan kompeten, menagih kekurangan penerimaan, mempertanggungjawabkan potensi kerugian negara dan menyetorkan kerugian negara ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta agar menarik klaim simpanan layak bayar apabila terbukti sebagai penerima kredit fiktif.

Pemerintah Daerah

- 11.20 Hasil pemeriksaan 6 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah menunjukkan adanya 7 kasus SPI dan 57 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp25,33 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

- 11.21 Hasil pemeriksaan SPI pada 6 objek pemeriksaan mengungkapkan adanya 7 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 2 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 11.22 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 34.
- 11.23 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Muaro Jambi, aset hasil pengadaan dana BOSTA 2011 pada 48 sekolah belum diberi kode inventaris barang dan minimal senilai Rp104,16 juta belum tercatat mengakibatkan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah (BMD) menjadi tidak handal dan berpotensi hilang. Selain itu, Rencana Strategis 2011-2016 dinas pendidikan belum ditetapkan oleh kepala daerah mengakibatkan dinas pendidikan belum memiliki acuan dalam membangun pendidikan untuk lima tahun ke depan.
 - Di Kabupaten Bungo, jumlah dana BOS yang diterima sekolah tidak sesuai dengan jumlah siswa pada lembar kerja individu sekolah mengakibatkan kelebihan dan kekurangan penetapan alokasi dana BOS pada TA 2011 dan Semester I TA 2012.

Penyebab

- 11.24 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta lemahnya monitoring dan evaluasi.

Rekomendasi

- 11.25 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta monitoring pelaksanaan kegiatan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 11.26 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 11.4. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 35 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 36.

Tabel 11.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian daerah	22	651,93
2	Kekurangan Penerimaan	5	831,83
3	Administrasi	23	-
4	Ketidakhematan	3	773,66
5	Ketidakefektifan	4	23.073,52
Jumlah		57	25.330,94

- 11.27 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 57 kasus senilai Rp25,33 miliar, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 6 entitas pemerintah daerah.

- 11.28 Kasus-kasus tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Banten, pajak atas honor dan sewa Tahun 2011 kurang dipungut dan disetor pada KPU Provinsi Banten mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp551,11 juta. Selain itu terdapat kelebihan

pencairan biaya operasional pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Benda Kota Tangerang, mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp198,65 juta.

- Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pengelolaan pembukuan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan pemilu pada TA 2011 tidak tertib sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban terlambat.
- Di Kabupaten Muaro Jambi, dana BOS Tahun 2011 senilai Rp22,93 miliar terlambat disalurkan sehingga proses belajar mengajar terganggu dan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.

11.29 Dari kasus kerugian daerah senilai Rp651,93 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp61,63 juta yaitu Pemda Kab. Muaro Jambi senilai Rp23,47 juta dan Pemda Provinsi Kep. Bangka Belitung senilai Rp38,16 juta seperti disajikan dalam Lampiran 36.

11.30 Dari kasus kekurangan penerimaan senilai Rp831,83 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp14,43 juta, yaitu Pemda Provinsi Kep. Bangka Belitung senilai Rp13,49 juta dan Pemda Provinsi Banten senilai Rp944,24 ribu.

Penyebab

11.31 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pejabat yang bertanggung jawab tidak memahami dan mematuhi ketentuan dan prosedur yang ada, tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

11.32 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, melaksanakan monitoring dan evaluasi, memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkan kerugian daerah ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUMN

11.33 Hasil pemeriksaan atas 6 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN menunjukkan adanya 32 kasus SPI dan 28 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp7,34 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

- 11.34 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 32 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 13 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 15 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 11.35 Rincian kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 34.
- 11.36 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di PT PLN (Persero), saldo uang jaminan langganan (UJL) PLN berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2011 berbeda dengan saldo UJL dalam data induk langganan (DIL) mengakibatkan penyajian nilai utang jangka pendek PLN kepada pelanggan lebih rendah dibandingkan nilai yang seharusnya.
 - Di PT Pertamina (Persero), pelaksanaan penandatanganan surat permintaan pembayaran atas 31 kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) senilai Rp76,96 miliar di lingkungan *corporate secretary* dilakukan oleh pejabat di bawah direktur utama sehingga penandatanganan tersebut tidak sah karena belum disetujui oleh pihak yang berwenang. Selain itu terdapat pinjaman program kemitraan (PK) periode September 2008 s.d. Oktober 2009 senilai Rp6,47 miliar yang tidak disalurkan secara langsung kepada mitra binaan yang berhak.

Penyebab

- 11.37 Kasus-kasus kelemahan SPI pada PDTT lainnya antara lain disebabkan pejabat terkait lalai/kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan.

Rekomendasi

- 11.38 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pejabat terkait melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan ketentuan yang berlaku dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 11.39 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 11.5. Rincian jenis temuan pada

tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 35 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 36.

Tabel 11.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan PDDT Lainnya pada BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	2	5.532,69
2	Potensi Kerugian	2	1.360,36
3	Kekurangan Penerimaan	4	454,74
4	Administrasi	10	-
5	Ketidakefektifan	10	-
Jumlah		28	7.347,79

11.40 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 28 kasus senilai Rp7,34 miliar, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 5 entitas BUMN.

11.41 Kasus-kasus tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Di PT Sarinah (Persero), terdapat kegiatan pengadaan dan penjualan singkong kering (*cassava*) Tahun 2011 tidak sesuai ketentuan menimbulkan indikasi kerugian senilai Rp3,27 miliar yang berasal dari kekurangan volume *cassava* untuk ekspor senilai Rp2,924 miliar dan distribusi lokal senilai Rp346,87 juta.
- Di PT Antam (Persero), penyaluran dana program bina lingkungan (BL) untuk pembebasan lahan kampus Tahun 2011 dan renovasi Masjid Nurul Iman Kijang Tahun 2009 dan 2011 senilai Rp2,45 miliar belum dipertanggungjawabkan sehingga penggunaan dana program bina lingkungan belum terpantau secara memadai.

Penyebab

11.42 Kasus-kasus kerugian negara/perusahaan terjadi karena pimpinan entitas lalai/tidak cermat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Rekomendasi

11.43 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk melakukan penagihan dan mengenakan sanksi tertulis kepada pejabat terkait.

11.44 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Daftar Singkatan dan Akronim

A

AIPA	: <i>Asean Inter-Parliamentary Assembly</i>
ALOS	: <i>Average Length of Stay</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ART	: Anggaran Rumah Tangga

B

Baminlog	: Bintara Administrasi Logistik
Bansos	: Bantuan Sosial
B4T	: Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
BBLM	: Balai Besar Logam dan Mesin
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BKMM	: Balai Kesehatan Mata Masyarakat
BKPM	: Balai Kesehatan Paru Masyarakat
BMKT	: Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
BL	: Bina Lingkungan
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMAD	: Bea Masuk Anti Dumping
BMADS	: Bea Masuk Anti Dumping Sementara
BMD	: Barang Milik Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTM	: PD Banama Tingang Makmur
BUA	: Badan Urusan Administrasi
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CIP	: <i>Corriago dan Insurance Paid</i>
CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>

D

Denkesyah	: Detasemen Kesehatan Wilayah
DF	: <i>Development Fund</i>
DIL	: Data Induk Langganan
Dinsos	: Dinas Sosial
Dinsosnaker	: Dinas Sosial Tenaga Kerja
Dispenda	: Dinas Pendapatan Daerah
Disperindagkop	: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Ditjen	: Direktorat Jenderal
Ditjen BUK	: Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DPPKD	: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

E

EF	: <i>Environmental Fund</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral

G

Gudpuszi	: Gudang Pusat Zeni
----------	---------------------

H

HGU	: Hak Guna Usaha
HOO	: <i>Home office overhead</i>
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri

I

IAMS	: <i>Integrated Asset Management Solution</i>
IGD	: Instalasi Gawat Darurat
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
INA CBG's	: <i>Indonesia Case Base Groups</i>
INASOC	: <i>Indonesia SEA Games Organizing Committee</i>

J

Jamkesda	: Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
JPK Gakin	: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin

K

KADI	: Komite Anti <i>Dumping</i> Indonesia
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KIT	: Kawasan Industri Tenayan Raya
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KKS	: Kontrak Kerja Sama
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	: Kementerian/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
Kodiklat	: Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSOT	: Kerjasama Operasi dan Transfer

L

LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LBMD	: Laporan Barang Milik Daerah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LLAJ	: Lalu Lintas Angkutan Jalan
Loteng	: Lombok Tengah
LPP-RR1	: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP-TVRI	: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

N

NHM : PT Nusa Halmahera Mineral

P

PAD : Pendapatan Asli Daerah
 Pamobvit : pengamanan objek vital
 PC : *personal computer*
 PDTT : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
 PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
 Pemda : Pemerintah Daerah
 PHE : PT Pertamina Hulu Energi
 PI : *Participating Interest*
 PIB : Persetujuan Impor Barang
 PJK MM : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
 PK : Program Kemitraan
 PKB : Pajak Kendaraan Bermotor
 PKP : Pengusaha Kena Pajak
 PMK : Peraturan Menteri Keuangan
 PMP : Penyertaan Modal Pemerintah
 PM TBS : PPN Masukan Tandan Buah Segar
 PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
 PPFD : Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen
 PPh : Pajak Penghasilan
 PPJ : Pajak Penerangan Jalan
 PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
 PPK : Pemberi Pelayanan Kesehatan
 PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan
 PPN : Pajak Pertambahan Nilai
 P3M : Pusat Pelatihan Pemuda dan Mahasiswa
 PPP : Pusat Pembiayaan Perumahan
 Prona : Proyek Operasi Nasional Agraria
 PSU : prasarana, sarana dan utilitas
 PSDS : Program Swasembada Daging Sapi
 PT BRI : PT Bank Rakyat Indonesia
 PT BTDC : PT Pengembangan Pariwisata Bali/Bali *Tourism Development Corporation*
 PT BTN : PT Bank Tabungan Negara
 PT DPS : PT Dok dan Perkapalan Surabaya
 PT DKB : PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari
 PT FI : PT Freeport Indonesia
 PT HK : PT Hutama Karya
 PT KAI : PT Kereta Api Indonesia
 PT KPBN : PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
 PT ME : PT Mega Eltra
 PT MMC : PT Multi Mas Chemindo
 PTOK : Pertamina Talisman Ogan Komering
 PTPN : PT Perkebunan Nusantara
 PTR : Petani Tebu Rakyat
 PT TPI : PT Tugu Pratama Indonesia/*Tugu Insurance Company Ltd*
 Pusdikajen : Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal
 Pusdikif : Pusat Pendidikan Infanteri

R

RI	: Rawat Inap
RJ	: Rawat Jalan
RJTL	: Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKAT	: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
RKBMD	: Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKPBMD	: Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
RS	: Rumah Sakit
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RSUPN	: RS Umum Pemerintah Nasional
RU	: <i>Refinery Unit</i>
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
Rusunawa	: Rumah Susun Sederhana Sewa

S

Samsat	: Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap
SE	: Surat Edaran
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKMPP	: Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPB	: Surat Persetujuan Berlayar
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	: Surat Pernyataan Miskin
SPP	: Surat Persetujuan Pemasukan
SPT	: Surat Pemberitahuan
STPD	: Surat Tagihan Pajak Daerah

T

TL	: Tim Likuidasi
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

U

UHR	: Usaha Hutan Rakyat
UI	: Universitas Indonesia
UJL	: Uang Jaminan Lagganan
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

W

WK	: Wilayah Kerja
WMT	: <i>Wet Metric Ton</i>
WP	: Wajib Pajak
WP&B	: <i>Work Program and Budget</i>

LAMPIRAN

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PD TT Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

[illegible]

Halaman 2 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

[illegible]

eterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 2

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDDT Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/ perusahaan		Keridaksukaan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah/perusahaan																				Nilai penyerahan aset atau kas negara/daerah atau kas perusahaan yang telah diidentifikasi dalam proses pemeriksaan		
		Total Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/ perusahaan		Pembelian aset yang berstatus sengketa										Aset tidak diketahui keberadaannya				Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan				Piutang/ piutangan atau dana bergeser yang tidak sesuai ketentuan			Lain-lain	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																										
1	Pengelolaan Pendapatan	8	11.413,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9.801,24	-	-	1	1.611,82	-	
1	Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pendapatan Daerah	8	11.413,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9.801,24	-	-	1	1.611,82	-	
	Provinsi	1	1.611,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.611,82	-	
	Kabupaten/kota	7	9.801,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9.801,24	-	-	-	-	-	
2	Pelaksanaan Belanja	322	180.223,69	288	155.322,49	5	2.184,71	2	250,45	1	82,40	2	80,40	4	603,80	3	644,50	-	-	-	-	-	17	21.054,94	9.097,86	
4	Belanja Pusat	14	28.574,43	11	28.567,03	1	-	-	-	-	-	1	7,40	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	87,69	
5	Belanja Daerah	308	151.649,26	277	126.755,46	4	2.184,71	2	250,45	1	82,40	1	73,00	4	603,80	2	644,50	-	-	-	-	-	17	21.054,94	9.010,17	
	Provinsi	35	31.519,25	31	20.238,12	2	2.120,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.160,39	7.696,63	
	Kabupaten/kota	273	120.130,01	246	106.517,34	2	63,97	2	250,45	1	82,40	1	73,00	4	603,80	2	644,50	-	-	-	-	-	15	11.894,55	1.313,54	
3	Manajemen Aset	56	180.820,76	1	115,21	-	-	-	30	95.079,76	1	163,15	20	50.042,89	-	-	-	-	2	34.741,68	-	-	2	678,07	-	
	Pusat	12	114.732,00	-	-	-	-	8	80.266,09	-	-	3	-	-	-	-	-	1	34.465,91	-	-	-	-	-	-	
	Provinsi	11	16.818,03	-	-	-	-	7	5.805,40	-	-	3	10.586,94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	425,69	-	-	
	Kabupaten/kota	33	49.270,73	1	115,21	-	-	15	9.008,27	1	163,15	14	39.455,95	-	-	-	-	1	275,77	-	-	1	252,38	-	-	
	BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jarkesmas dan Jarkesda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pelaksanaan KKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Operasional BUMN	22	734.930,68	2	38.439,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	329.240,22	1	281,49	2	366.969,40	-	
7	Operasional BPR/PPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya	52	372.176,61	2	94,77	-	-	3	93,50	-	-	1	140,83	3	1.700,00	3	-	-	38	369.557,68	1	523,31	1	66,52	46.831,85	
	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabupaten/kota	1	140,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	140,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUMD	51	372.035,78	2	94,77	-	-	3	93,50	-	-	-	-	3	1.700,00	3	-	-	38	369.557,68	1	523,31	1	66,52	46.831,85	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Potensi kerugian negara/dieraah atau perusahaan										Ketidapkutuhan Terhadap Keterangan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi kerugian negara/dieraah atau kerugian negara/dieraah/perusahaan																		Lain-lain	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Kerugian negara/ perusahaan		Rekanan belum melakukan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Pembelian aset yang berstatus sengketa		Aset tidak diketahui keberadaannya		Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Piutang/ pinjaman atau dana bergilir yang berpotensi tidak tertagih		Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan															
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai												
8	11	Operasi/BLU dan Badan Lainnya		21	78.239,65	2	27.715,59	2	103,50	2	1.241,81	-	4	908,29	-	-	-	5	42.414,74	-	6	5.855,72	-	25							
		BLU	12	35.338,01	2	27.715,59	1	-	-	-	-	-	3	865,02	-	-	-	1	921,68	-	5	5.835,72	-	-							
		Badan Lainnya	9	42.901,64	-	-	1	103,50	2	1.241,81	-	-	1	43,27	-	-	-	4	41.493,06	-	1	20,00	-	-							
9	12	PDOT Lainnya		7	9.965,13	2	1.821,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	172,14	-	3	7.971,30	-							
		Pusat	5	8.604,77	1	633,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	7.971,30	-							
		BUMN	2	1.360,36	1	1.188,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	172,14	-	-	-	-							
		Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Total	488	1.567.769,58 USD 9.530,27	297	23.509,32	7	2.288,21	37	96.665,52	2	245,55	27	51.172,41	7	2.303,80	7	644,50	70	785.927,70 USD 9.530,27	2	805	32	404.207,77	55.925,71						
		Pusat	31	151.911,20	12	29.200,50	1	-	8	80.266,09	-	-	4	7,40	-	-	2	-	1	34.465,91	-	-	3	7.971,30	87,69						
		Provinsi	48	50.089,93	31	20.238,12	2	2.120,74	7	5.805,40	-	-	4	10.721,77	-	-	-	-	-	-	-	4	11.197,90	7.696,63							
		Kabupaten/Kota	313	179.201,98	247	106.632,55	2	63,97	17	9.258,72	2	245,55	15	39.528,95	4	603,80	2	644,50	8	10.077,01	-	-	16	12.146,93	1.313,54						
		Jumlah Daerah (Provinsi + Kabupaten/Kota)	361	229.291,91	278	126.870,67	4	2.184,71	24	15.064,12	2	245,55	19	50.256,72	4	603,80	2	644,50	8	10.077,01	-	-	20	23.344,83	9.010,17						
		BUMN	24	736.291,04	3	39.627,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	329.412,36	1	281,49	2	366.969,40	-							
		Jumlah Rupiah BUMN		736.291,04		39.627,79		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-							
		BUMD	51	372.035,78	2	94,77	-	-	3	93,50	-	-	-	-	-	3	1.700,00	3	38	369.557,68	1	523,31	1	66,52	46.831,85						
		Jumlah Total Setelah dikoreksi ke Rupiah	-	USD 9.530,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 9.530,27	-	-	-	-	-	-						
		Jumlah Rupiah BUMD		464.193,49		94,77		-		93,50		-		-		1.700,00		-	461.715,39		523,31		66,52	46.831,85							
		BLU	12	35.338,01	2	27.715,59	1	103,50	2	1.241,81	-	-	3	865,02	-	-	-	1	921,68	-	-	5	5.835,72	-	-						
		Badan Lainnya	9	42.901,64	-	-	1	103,50	2	1.241,81	-	-	1	43,27	-	-	-	4	41.493,06	-	-	1	20,00	-	-						
		Jumlah BLU dan Badan Lainnya	21	78.239,65	2	27.715,59	2	103,50	2	1.241,81	-	-	4	908,29	-	-	-	5	42.414,74	-	-	6	5.855,72	-	-						
		Jumlah Total Setelah dikoreksi ke Rupiah	488	1.659.927,29	297	23.509,32	7	2.288,21	37	96.665,52	2	245,55	27	51.172,41	7	2.303,80	7	644,50	70	785.985,41	2	804,80	32	404.207,77	55.925,71						

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 3

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDDT Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Ketidakepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan										Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Kekurangan Penerimaan										Nilai								
		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/perusahaan		Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah		Penyetoran Negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak		Pengenaan tarif pajak/ PNP lebih rendah dari ketentuan		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Lain-lain								
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai							
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	1																			
	1																			
	1																			
	Pemeriksaan dengan Tujuan Umum	2																		
4																				
5																				
3																				
															</					

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Ketidakepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan																		Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan					
		Kekurangan Penerimaan																							
		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/perusahaan				Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah				Penerimaan Negara/daerah disoror atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak				Pengean tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan				koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS						Lain-lain	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai								
1	5	8	Pelaksanaan KKKS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
5				50	6.338,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	6.338,53	-	-	-	-	-	-		
6				17	202.675,80	3	1.619,67	12	146.725,80	2	54.330,33	-	-	-	-	-	USD 37.864,67	-	-	-	-	-	-		
7				63	165.437,04	9	1.423,11	49	159.025,52	1	4.841,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10				5	8.529,00	1	288,13	3	3.399,31	1	4.841,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				1	49,91	-	-	1	49,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				57	156,858	8	1.134,98	45	155.576,30	-	-	-	-	-	4	146,85	-	-	-	-	-	-	-		
8				66	810,084	16	5.129,18	42	788.560,04	6	14.808,63	-	-	-	2	1.586,60	-	-	-	-	-	-	-		
					USD 1.440,21				USD 1.440,21																
				39	19.489,22	12	4.057,38	23	12.291,67	3	1.554,19	-	-	-	1	1.585,98	-	-	-	-	-	-	-		
				27	790.595,23	4	1.071,80	19	776.268,37	3	13.254,44	-	-	-	1	0,62	-	-	-	-	-	-	-		
					USD 1.440,21			-	USD 1.440,21																
9				16	7.384,11	4	1.168,37	9	3.691,71	1	61,64	-	-	-	1	100,18	-	-	1	2.362,21	-	-	-		
					USD 274,17				USD 274,17																
				7	6.097,54	1	928,53	3	2.644,98	1	61,64	-	-	-	1	100,18	-	-	1	2.362,21	-	-	-		
					USD 274,17	-		-	USD 274,17																
				4	454,74	3	239,84	1	214,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-			-	-																
				5	831,83	-	-	-	831,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				951	1.726.870,01	370	65.767,09	458	1.410.802,32	33	226.240,45	3	192,64	31	14.644,58	50	6.338,53	6	2.884,40	4.869,87	-	-	-		
					USD 43.035,52				USD 4.399,59								USD 37,864.67		USD 48,97						
					SGD 1,68				SGD 1,68																
				93	236.974,99	29	10.750,15	48	72.139,47	6	150.993,62	3	192,64	5	536,90	-	-	2	2.362,21	180,71	-	-	-		
				-	USD 1,757,29			-	USD 986,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 48,97						
					253.967,98				17.734,69										2.835,75	180,71	-	-	-		
				90	42.821,17	49	8.048,69	37	23.202,57	1	4.841,56	-	-	-	3	6.728,35	-	-	-	411,11	-	-	-		
				518	122.876,99	260	37.429,90	224	78.388,53	18	1.266,31	-	-	12	5.270,06	-	-	4	522,19	3.736,99	-	-	-		
					SGD 1,68			-	SGD 1,68																
					122.890,27				78.401,81										522,19	3.736,99	-	-	-		
				608	165.711,35	309	45.478,59	261	101.604,29	19	6.107,87	-	-	15	11.998,41	-	-	4	522,19	4.148,10	-	-	-		

Halaman 3 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Ketidakepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan																		Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diteliti dan lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Kekurangan Penerimaan																		penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diteliti dan lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/perusahaan						Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah		Penerimaan Negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak				Pengenaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KMS		Lain-lain					
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	BUMN	127	357.254,28	8	3.274,19	62	292.935,41	2	54.330,33	-	-	5	375,82	50	6.336,53	-	-	335,15	-				
		-	USD 39.838,02	-	-	-	USD 1.973,35	-	-	-	-	-	-	-	USD 37.864,67	-	-	-	-				
	Jumlah Rupiah BUMN		742.487,94		3.274,19		312.017,71		54.330,33				375,82		372.489,89		-	335,15	-				
	BUMD	57	156.858,13	8	1.134,98	45	155.576,30	-	-	-	-	4	146,85	-	-	-	-	167,04	782,43				
	BLU	39	19.489,22	12	4.057,38	23	12.291,67	3	1.554,19	-	-	1	1.585,98	-	-	-	-	38,87	1.233,70				
	Badan Lainnya	27	790.595,23	4	1.071,80	19	776.268,37	3	13.254,44	-	-	1	0,62	-	-	-	-	-	54,99				
		-	USD 1.440,21	-	-	-	USD 1.440,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Jumlah Rupiah Badan Lainnya		804.522,06		1.071,80		790.195,20		13.254,44				0,62		-	-	-	-	54,99				
	Jumlah BLU dan Badan Lainnya	66	824.011,28	16	5.129,18	42	802.486,87	6	14.808,63	-	-	2	1.586,60	-	-	-	-	38,87	1.288,69				
	Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	951	2.143.036,78	370	72.751,63	458	1.453.359,64	33	226.240,45	3	192,64	31	14.644,58	50	372.489,89	6	3.357,94	4.869,87	10.444,55				

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Perpajakan,
Kepabeanan, dan Cukai

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMN	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	1	-	3
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	-	1	-	1
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-	-	1
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	-	-	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	12	13	36
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	-	10	9	19
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	11	2	-	13
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	-	4	4
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	11	2	-	13
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	2	-	6
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	-	-	5
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	-	-	2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		24	15	13	52

Lampiran 5

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Perpajakan,
Kepabeanan, dan Cukai**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	-	-	1	34,68	-	-	1	34,68
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		-	1	34,68	-	-	1	34,68
II	Kekurangan Penerimaan	6	54.909,17	4	445,30	50	141.485,62	60	196.840,09
1	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/ Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	6	54.909,17	3	337,43	47	141.241,70	56	196.488,30
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		-	1	107,87	3	243,92	4	351,79
III	Administrasi	7	-	8	-	23	-	38	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	1						1	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6		5		20		31	-
3	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan			3		3		6	-
IV	Ketidakefektifan	2	-	-	-	-	-	2	-
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2				-		2	-
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	15	54.909,17	13	479,98	73	141.485,62	101	196.874,77

Lampiran 6

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan	
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Kepatuhan Perpajakan Perkebunan																
1	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero)	-	-	-	-	12	64.783,26	-	-	11	64.783,26	1	-	-		
2	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV (Persero)	2	-	2	-	7	9.950,93	-	-	5	9.950,93	2	-	-		
3	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI (Persero)	6	-	6	-	5	11.357,95	-	-	4	11.357,95	1	-	-		
4	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	-	-	-	-	18	12.376,85	-	-	14	12.376,85	4	-	-		
5	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (Persero)	-	-	-	-	12	27.681,79	-	-	4	27.681,79	8	-	-		
6	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X (Persero)	5	-	5	-	13	7.490,69	-	-	7	7.490,69	6	-	-		
7	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII (Persero)	-	-	-	-	6	7.844,15	-	-	5	7.844,15	1	-	-		
8	KPP Wajib Pajak Besar Tiga	7	-	5	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-		
Pajak Bendahara Pengeluaran																
1	Kab. Kolaka	4	-	4	-	3	5,56	-	-	1	5,56	2	-	-		
2	Kab. Kolaka Utara	5	1	3	1	5	1,40	-	-	1	1,40	4	-	-		
3	Kota Baubau	6	-	5	1	5	473,02	1	34,68	2	438,34	2	-	-		
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai																
1	Dirjen Bea Cukai	10	-	5	5	6	48.256,37	-	-	5	48.256,37	1	-	-		
Bea Masuk Anti Dumping																
1	KADI, BKF, KPBC	7	2	1	4	7	6.652,80	-	-	1	6.652,80	4	2	-		
Jumlah		52	3	36	13	101	196.874,77	1	34,68	60	196.840,09	38	2	-		

Lampiran 7

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	13
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	43
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan	11
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	7
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	22
5	Lain-lain	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	23
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	13
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	10
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		79

Lampiran 8

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Negara/Daerah	3	1.215,98
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3	1.215,98
II	Kekurangan Penerimaan	26	3.430,22
			USD 872,07
	Jumlah rupiah		11.863,14
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	1	90,11
			USD 111,24
	Jumlah rupiah		1.165,80
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	20	3.022,26
			USD 711,86
	Jumlah rupiah		9.905,95
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	2	272,70
4	Penerimaan Negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	40,00
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	5,15
6	Lain-lain	1	USD 48,97
	Jumlah rupiah		473,54
III	Administrasi	23	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	1	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	9	-
4	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	12	-
IV	Ketidakefektifan	4	-
1	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4	-
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	56	4.646,20
			USD 872,07
	Jumlah rupiah		13.079,12

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 9

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan		
				Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktahuan Terhadap ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan			Kerugian Negara/ Daerah
		Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai			Jml kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pendapatan Negara																		
1	Kejaksaan RI	42	12,73	23	5	13	5	19	12,73	-	-	1	12,73	15	3	-	-	-
1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejati dan Kejari di Lingkungan Kejati Banten di Serang	19	-	9	4	3	2	10	-	-	-	-	-	7	3	-	-	-
	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA, 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang	7	12,73	4	-	3	1	3	12,73	-	-	1	13	2	-	-	-	-
	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA, 2011 dan 2012 di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan	11	-	6	-	5	1	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	5	-	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Kementerian Luar Negeri	21	2.043,44	11	2	7	2	10	2.043,44	-	-	8	2.043,44	2	-	-	-	351,64
		-	USD 48.97					-	USD 48.97				USD 48.97					
5	Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian SIMKEU Real Time pada KBRI Amman	2	351,64	1	-	1	-	1	351,64	-	-	1	351,64	-	-	-	-	351,64

Halaman 2 - Lampiran 9

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Jml Kasus	Nilai	Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang- undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan
								Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KJRI Cape Town di Afrika Selatan	1	510,98	-	-	-	-	1	510,98	-	-	1	510,98	-	-	-	-	-	
7	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 KBRI Doha di Qatar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KJRI Guangzhou di Republik Rakyat Tiongkok	1	139,90	-	-	-	-	1	139,90	-	-	1	139,90	-	-	-	-	-	
9	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian SIMKEU Real Time pada KJRI Hongkong di Republik Rakyat Tiongkok	1	428,30	-	-	-	-	1	428,30	-	-	1	428,30	-	-	-	-	-	
10	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KJRI Houston di Amerika Serikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KBRI Kopenhagen di Denmark	2	USD 48,97	1	-	1	-	1	USD 48,97	-	-	1	48,97	-	-	-	-	-	
12	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KJRI Los Angeles di Amerika Serikat	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KBRI Untuk Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia di London	6	-	5	-	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
14	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KBRI Oslo di Norwegia	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KBRI Pretoria di Afrika Selatan	4	612,62	-	-	-	-	4	612,62	-	-	3	612,62	1	-	-	-	-	
16	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KBRI Stockholm di Swedia	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBPTahun Anggaran 2011 dan 2012 serta Pengujian pengendalian Simkeu Real-Time pada KBRI Bangkok di Thailand	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 9

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan					
		TOTAL		Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
18	Belanja dan PNPB TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian SIMKEU Real Time pada KBRI Baghdad di Irak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kementerian Hukum dan HAM	15	53,79	10	2	6	2	5	53,79	-	-	1	53,79	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh di Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten di Serang	3	53,79	2	-	1	1	1	53,79	-	-	1	53,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi PNPB TA 2010 dan 2011 pada Kanwil Kemenkumham Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta intensifikasi PNPB TA 2010 & 2011 pada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta serta Satker Terkait di Jakarta	8	-	6	1	4	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 s.d. 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo di Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Jambi	3	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 9

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
				Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan			
		Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
25	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan di Banjarmasin	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
26	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Pajak (PNBP) TA. 2011 dan 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku di Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2010 s.d 2012 (semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di Ternate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi PNBP TA. 2009 dan 2010 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 s.d. 2012 (Semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 s.d. 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara di Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi PNBP Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta TA. 2010 dan 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 5 - Lampiran 9

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
				Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan	Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan penerimaan		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	Kementerian Perhubungan	19	1.374,16 USD 823.10	8	-	5	3	11	1.374,16 USD 823.10	2	653,89	8	720,27 USD 823.10	1	-	246,56	9,46		
32	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009, 2010, dan 2011 Pada Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Kemenhub di Jakarta	19	1.374,16	8	-	5	3	11	1.374,16	2	653,89	8	720,27	1	-	246,56	9,46		
5	Kementerian Tenaga Kerja	25	1.112,69 USD 823.10	15	1	7	7	10	1.112,69 USD 823.10	1	562,09	7	550,60	1	1	-	-	-	
33	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pendapatan dan Belanja) Tahun 2011 sampai dengan Triwulan III Tahun 2012	13	350,00	8	-	5	3	5	350,00	-	-	5	350,00	-	-	-	-	-	
34	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Pendapatan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Triwulan III Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	762,69	7	1	2	4	5	762,69	1	562,09	2	200,60	1	1	-	-	-	
6	Kepolisian RI	13	49,39	12	3	5	4	1	49,39	-	-	1	49,39	-	-	-	-	-	
35	Pengelolaan Anggaran dan Penerimaan Bukan Pajak TA 2009 s.d. 2011 pada Kepolisian Daerah Jambi di Jambi	13	49,39	12	3	5	4	1	49,39	-	-	1	49,39	-	-	-	-	-	
	Total	135	4.646,20 USD 872.07	79	13	43	23	56	4.646,20 USD 872.07	3	1.215,98	26	3.430,22 USD 872.07	23	4	-	246,56	361,10	
	Jumlah rupiah	135	13.079,12	79	13	43	23	56	13.079,12	3	1.215,98	26	11.863,14	23	4	-	246,56	361,10	

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 10

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Kelompok	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	16	9	25
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	7	9
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	1	2
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	11	1	12
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	2	-	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	71	199	270
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	7	9
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	19	49	68
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5	15	20
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	3	3	6
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	42	124	166
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	1	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	15	52	67
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9	42	51
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	9	13
3	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	1	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	-	2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		102	260	362

Lampiran 11

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Daerah**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Daerah	3	332,98	5	950,72	8	1.283,70
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	204,01	5	950,72	7	1.154,73
2	Lain-lain	1	128,97	-	-	1	128,97
II	Potensi Kerugian Daerah	1	1.611,82	7	9.801,24	8	11.413,06
1	Pinutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	-	-	7	9.801,24	7	9.801,24
2	Lain-lain	1	1.611,82	-	-	1	1.611,82
III	Kekurangan Penerimaan	23	21.735,89	198	69.047,11	221	90.783,00
					SGD 1,68		SGD 1,68
	Jumlah rupiah		21.735,89		69.060,39		90.796,28
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	-	-	1	8,39	1	8,39
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/daerah	20	15.007,54	168	62.383,29	188	77.390,83
					SGD 1,68		SGD 1,68
	Jumlah rupiah		15.007,54	-	62.396,57	-	77.404,11
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	-	-	18	1.266,31	18	1.266,31
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3	6.728,35	9	5.136,78	12	11.865,13
5	Lain-lain	-	-	2	252,34	2	252,34
IV	Administrasi	20	-	43	-	63	-
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	2	-	-	-	2	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	-	-	2	-	2	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	13	-	13	-	26	-
4	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5	-	28	-	33	-
V	Ketidakefektifan	9	-	5	60,91	14	60,91
1	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5	-	-	-	5	-
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4	-	5	60,91	9	60,91
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	56	23.680,69	258	79.859,98	314	103.540,67
					SGD 1,68		SGD 1,68
	Jumlah rupiah		23.680,69		79.873,26		103.553,39

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Daerah

Halaman 1 - Lampiran 12

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke kas Daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		Jml kasus	Nilai			Jml kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pendapatan Daerah																			
1	Prov.Sumatera Selatan																		
	1 Kota Palembang	10	1	9	-	5	10.520,74	-	-	-	-	4	10.520,74	1	-	-	-	-	
2	Prov. Bengkulu																		
1	Pemeriksaan atas Pendapatan PKB, BBN-KB, PBB-KB, dan Bagi Hasilnya Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	7	1	6	-	1	206,77	-	-	-	-	1	206,77	-	-	-	-	-	
3	Prov. Kepulauan Riau	21	-	15	6,00	15	17.786,17 SGD 1,68	-	-	-	-	9	17.786,17 SGD 1,68	6	-	-	-	-	
1	Prov. Kepulauan Riau	9	-	7	2	5	5.601,55	-	-	-	-	4	5.601,55	1	-	-	-	-	
2	Kab. Bintan	5	-	4	1	5	12.151,97	-	-	-	-	4	12.151,97	1	-	-	-	-	
							SGD 1,68	-	-	-	-	-	SGD 1,68	-	-	-	-	-	
3	Kab. Karimun	7	-	4	3	5	32,65	-	-	-	-	1	32,65	4	-	-	-	-	
4	Prov. DKI Jakarta	8	1	5	2	8	2.039,71	-	-	1	1.611,82	4	427,89	3	-	-	-	8,98	
1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	5	-	5	-	7	2.039,71	-	-	1	1.612	4	427,89	2	-	-	-	8,98	
2	Pengelolaan dan Belanja Operasional TA 2011 dan 2012 s.d Semester I pada Unit Pengelola Transjakarta Busway Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5	Prov. Jawa Barat	72	2	52	18	83	13.253,96	1	361,18	1	878,11	66	12.014,67	8	7	-	361,18	3.941,12	
1	Pemeriksaan PKB-BBNKB pada Dispenda Provinsi Jawa Barat TA 2012 (s.d Agustus)	7	-	7	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
2	Kab. Bandung	13	-	10	3	9	714,34	-	-	-	-	9	714,34	-	-	-	-	42,00	

Halaman 2 - Lampiran 12

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke kas Daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
3	Kab. Ciamis	8	1	5	2	7	284,59	-	-	-	-	5	284,59	1	1	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Cianjur	4	1	3	-	9	5.190,71	1	361,18	1	878,11	5	3.951,42	2	-	-	-	-	-	361,18	3.531,94	
5	Kab. Indramayu	3	-	1	2	11	2.288,37	-	-	-	-	10	2.288,37	1	-	-	-	-	-	-	2,70	
6	Kota Bogor	16	-	11	5	12	2.162,29	-	-	-	-	12	2.162,29	-	-	-	-	-	-	-	85,84	
7	Kota Cirebon	6	-	6	13	13	1.423,61	-	-	-	-	11	1.423,61	2	-	-	-	-	-	-	240,69	
8	Kota Sukabumi	9	-	5	4	6	104,13	-	-	-	-	5	104,13	1	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kota Tasikmalaya	6	-	4	2	11	1.085,92	-	-	-	-	9	1.085,92	1	1	-	-	-	-	-	37,95	
6	Prov. Jawa Tengah	64	4	54	6	45	14.784,12	1	18,21	1	8.137,76	34	6.628,15	9	-	-	-	-	-	17,14	88,96	
1	Kab. Cilacap	21	2	16	3	9	158,82	-	-	-	-	6	158,82	3	-	-	-	-	-	-	27,59	
2	Kab. Grobogan	12	2	10	-	8	8.357,49	1	18,21	1	8.137,76	5	201,52	1	-	-	-	-	-	17,14	59,25	
3	Kab. Kendal	12	-	10	2	5	1.797,01	-	-	-	-	5	1.797,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Klaten	8	-	8	-	9	3.409,55	-	-	-	-	8	3.409,55	1	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Tegal	11	-	10	1	14	1.061,25	-	-	-	-	10	1.061,25	4	-	-	-	-	-	-	2,12	
7	Prov. D.I.Y	10	-	9	1	21	3.148,57	-	-	-	-	16	3.148,57	2	3	-	-	-	-	-	229,31	
1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika TA 2012 pada Pemerintah Provinsi D.I.Y	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Gunung Kidul	4	-	3	1	6	278,38	-	-	-	-	5	278,38	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Sleman	3	-	3	-	12	2.870,19	-	-	-	-	11	2.870,19	-	-	1	-	-	-	-	229,31	
8	Prov. Jawa Timur	20	-	15	5	11	2.668,01	-	-	-	-	7	2.668,01	4	-	-	-	-	-	-	-	
1	Kota Blitar	14	-	10	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kota Malang	6	-	5	1	9	2.668,01	-	-	-	-	7	2.668,01	2	-	-	-	-	-	-	-	
9	Prov. Banten																					
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2012 pada Pemerintah Provinsi Banten	5	2	3	-	6	71,46	-	-	-	-	4	71,46	2	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 12

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke kas Daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10																				
	Prov. Bali	1																		
	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) Tahun Anggaran 2012 (s.d. 31 Agustus 2012) pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
11																				
	Prov. NTB	1																		
	Pelaksanaan APBD Khusus Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Pemprov NTB dan Instansi Terkait Lainnya TA 2012 (Semester 1)	6	-	6	-	4	62,58	1	62,58	-	-	-	-	3	-	-	62,58	-	-	
12																				
	Prov. NTT	34	2	21	11	38	9.085,57	1	50,38	5	785,37	27	8.249,82	5	-	-	3,10	5,18	-	
1	Prov. NTT	9	2	5	2	10	2.294,41	-	-	-	-	7	2.294,41	3	-	-	-	-	-	
2	Kab. Belu	8	-	5	3	9	2.528,29	1	50,38	1	609,69	7	1.868,22	-	-	-	3,10	-	-	
3	Kab. Lembata	9	-	6	3	8	1.513,63	-	-	1	92,64	5	1.420,99	2	-	-	-	-	-	
	Kab. Sikka	8	-	5	3	11	2.749,24	-	-	3	83,04	8	2.666,20	-	-	-	-	5,18	-	
13																				
	Prov. Kalimantan Barat	21	3	12	6	7	695,21	-	-	-	-	4	695,21	3	-	-	-	-	-	
1	Pendapatan PKB dan BBNKB dengan Menggunakan E-Audit Prov. Kalimantan Barat TA 2012 (s.d Juli 2012)	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Kab. Ketapang	17	1	11	5	6	695,21	-	-	-	-	4	695,21	2	-	-	-	-	-	
14																				
	Prov. Kalimantan Selatan																			
1	Kota Banjarmasin	4	-	3	1	3	769,92	-	-	-	-	2	769,92	1	-	-	-	23,56	-	
15																				
	Prov. Kalimantan Timur																			
1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Provinsi Kalimantan Timur TA 2012	9	3	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 12

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke kas Daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		Jml kasus	Nilai			Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
16	Prov. Sulawesi Utara																		
1	Pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor T.A. 2012 (s.d. 31 Agustus 2012) Provinsi Sulawesi Utara	7	3	4	-	1	128,97	1	128,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Prov. Sulawesi Selatan																		
1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan dengan Menggunakan E Audit pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2012 (s.d Juli 2012)	17	-	12	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
18	Prov. Sulawesi Tenggara	24	-	22	2	32	3.095,30	-	-	-	-	23	3.034,39	7	2	60,91	-	0,70	
1	Kab. Konawe	5	-	5	-	15	1.887,44	-	-	-	-	12	1.826,53	1	2	60,91	-	-	
2	Kab. Muna	19	-	17	2	17	1.207,86	-	-	-	-	11	1.207,86	6	-	-	-	0,70	
19	Prov. Gorontalo																		
1	Pendapatan PKB dan BBNKB TA 2012 (s.d. Agustus 2012) dengan Menggunakan E Audit pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya	8	2	4	2	3	5.254,64	-	-	-	-	1	5.254,64	-	2	-	-	-	
20	Prov. Maluku Utara	7	1	5	1	16	14.686,37	3	662,38	-	-	10	14.023,99	3	-	-	436,50	-	
1	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Provinsi Maluku Utara TA 2011 dan 2012 (Semester I)	1	-	-	1	4	8.020,60	1	141,43	-	-	2	7.879,17	1	-	-	-	-	
2	Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah Kota Ternate TA 2011 dan 2012	6	1	5	-	12	6.665,77	2	520,95	-	-	8	6.144,82	2	-	-	436,50	-	

Halaman 5 - Lampiran 12

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke kas Daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		Jml kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Prov. Papua																	
	1 Kab. Mimika	6	-	5	1	10	5.282,60	-	-	-	-	9	5.282,60	1	-	-	-	29,09
	Total Pemerintahan Provinsi	102	16	71	15	56	23.680,69	3	332,98	1	1.611,82	23	21.735,89	20	9	-	62,58	8,98
	Total Pemerintahan Kabupaten/Kota	260	9	199	52	258	79.859,98	5	950,72	7	9.801,24	198	69.047,11	43	5	60,91	817,92	4.317,92
							SGD 1.68						SGD 1.68					
	Total Rupiah Pemerintah Kabupaten/ Kota						79.873,26		950,72		9.801,24		69.060,39			60,91	817,92	4.317,92
	Total Rupiah Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	362	25	270	67	314	103.553,95	8	1.283,70	8	11.413,06	221	90.796,28	63	14	60,91	880,50	4.326,90

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 13

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

No	Kelompok	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	31
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	18
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	12
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	76
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	33
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	3
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	20
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	9
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	10
6	Lain-lain	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	47
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	32
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	13
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		154

Halaman 1 - Lampiran 14

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Negara	212	41.057,98
			USD 0.80
			DKK 3.55
	Jumlah rupiah		41.071,81
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	10	8.135,44
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	14	4.983,31
			DKK 3.55
	Jumlah Rupiah		4.989,40
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	48,08
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	55	8.842,91
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	55	4.446,93
6	Pemahalan harga (Mark up)	10	7.400,88
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	94,12
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	13	1.046,65
9	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	10	1.766,46
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	12	1.403,84
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	29	2.855,89
			USD 0.80
	Jumlah Rupiah		2.863,63
12	Lain-lain	1	33,47
II	Potensi Kerugian Negara	14	28.574,43
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	11	28.567,03
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	-
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	7,40
4	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1	-
III	Kekurangan Penerimaan	49	13.825,61
			USD 611.05
	Jumlah Rupiah		19.734,46
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara	26	9.652,01
			USD 611,05
	Jumlah Rupiah		15.560,86
2	Penerimaan Negara (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara	16	3.406,12
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara	2	183,27
4	Penerimaan Negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	2	152,64
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3	431,57
IV	Administrasi	131	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	12	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	56	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	25	-
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	3	-
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	4	-

Halaman 2 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	13	-
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6	-
9	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara	3	-
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-
12	Lain-lain	1	-
V	Ketidakhematan	25	9.106,73
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	-
2	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	24	9.106,73
VI	Ketidakefisienan	1	32,97
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	32,97
VII	Ketidakefektifan	26	4.557,43
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3	111,68
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	140,00
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	14	3.293,78
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	392,15
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4	619,82
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		458	97.155,15
			USD 611.85
			DKK 3.55
Jumlah rupiah			103.077,83

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat**

			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau pengyotoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindak lanjuti dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan				Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Ketidapatuhan Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Kerugian Negara		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Halaman 2 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktapatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengiklatkan																Nilai penyerahan aset atau penyrtoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Total SPK	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktapatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi	Ketidakefisienan			Ketidakefektifan	Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus		Nilai	Jml kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
7	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada KBRI Stockholm di Swedia	5	2	1	2	2	5,05	1	5,05	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5,09	-	-	
8	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real Time pada Kantor Pusat Kemlu dan KRI Guangzhou di Jakarta dan RRT	4	1	1	2	4	493,07	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	493,07	-	-	-	-	
9	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada KBRI Kopenhagen di Denmark	6	3	1	2	3	173,18	2	173,18	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	DKK 3.55	-	DKK 3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada KBRI Doha di Qatar	5	1	4	-	4	12,09	1	12,09	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	9,70	-	-	
11	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real Time pada KBRI Amman di Yordania	7	3	4	-	3	12,62	2	12,62	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	USD 0.80	-	USD 0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 0.28	-	-	-	
12	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real Time pada KRI Los Angeles di Amerika Serikat	8	1	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real Time pada KRI Houston di Amerika Serikat	6	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real Time pada KBRI untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia di Oslo	5	1	1	3	3	1,18	1	1,18	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1,18	-	-	
15	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada KBRI untuk Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia di London	7	1	4	2	4	14,84	2	14,84	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada KRI Cape Town di Afrika Selatan	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diindikasikan lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi	Ketidakefisienan			Ketidakefektifan	Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus		Jml kasus	Nilai	Jml Kasus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
17	Pemeriksaan atas Belanja dan PNPB TA 2011 dan 2012 pada KBRl Pretoria di Afrika Selatan	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Belanja dan PNPB TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian SHIREU Real Time pada KBRl Baghdad di Irak	3	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Pemeriksaan atas Belanja dan PNPB tahun Anggaran 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real-time pada KBRl Bangkok di Thailand	4	1	1	2	6	128,71	3	128,71	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	6	1	2	3	114	5.488,40	86	5.134,79	-	-	6	106,08	16	2	48,63	-	-	4	198,90	1.686,52	-	-	9,56	
20	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh di Banda Aceh	-	-	-	-	11	574,17	9	564,64	-	-	1	5,00	-	-	-	-	-	1	4,53	447,87	-	-	-	
21	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten di Serang	1	1	-	-	8	91,74	3	59,64	-	-	1	32,10	4	-	-	-	-	-	-	59,64	-	-	4,81	
22	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi PNPB TA. 2010 dan 2011 pada Kanwil Kemenkumham Bengkulu	-	-	-	-	9	803,99	9	803,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	
23	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNPB TA. 2010 & 2011 pada kanwil Kemenkumham DKI Jakarta serta Satker Terkait di Jakarta	-	-	-	-	7	93,44	4	92,28	-	-	1	1,16	2	-	-	-	-	-	-	56,48	-	-	1,16	
24	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 s.d. 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo di Gorontalo	-	-	-	-	4	296,71	4	296,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diuraikan lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap ketentuan Perundang-undangan				Keuangan Negara				Ketidakefisienan				Ketidakefektifan	Keuangan Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan		
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Jambi	-	-	5	-	-	148,53	4	106,77	-	-	-	-	-	1	41,76	-	-	-	-	106,84	-	-
26	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan di Banjarmasin	-	-	-	-	11	280,04	9	280,04	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	58,23	-	-
27	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2011 dan 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku di Ambon	-	-	-	-	5	147,24	5	147,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,19	-	-
28	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2010 s.d 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di Ternate	-	-	-	-	14	766,62	11	724,78	-	-	1	41,84	2	-	-	-	-	-	-	58,23	-	-
29	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi PNBP TA. 2009 dan 2010 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru	1	-	4	1	-	112,00	2	112,00	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pelaksanaan Anggaran dan PNBP Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah TA.2010 s.d. 2012	-	-	8	-	-	670,94	8	670,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 s.d. 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara di Kendari	1	-	5	1	-	505,16	5	505,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,94	-	-
32	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi PNBP/Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta TA. 2010 dan 2011	3	-	7	2	1	227,32	2	204,93	-	-	1	22,39	3	-	-	-	-	1	-	204,94	-	-

Halaman 5 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari dalam proses pemeriksaan				
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan				Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan
				Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
33	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta	-	-	-	-	3	280,98	2	274,11	-	-	-	-	-	1	6,87	-	-	-	-	274,11	-	-	
34	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2010 dan 2011	-	-	-	-	9	347,50	7	149,54	-	-	1	3,59	-	-	-	-	-	1	194,37	137,53	-	3,59	
35	Pelaksana Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta	-	-	-	-	4	142,02	2	142,02	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	142,02	-	-	
5	Kementerian Perhubungan	1	1	-	-	22	5.840,91	10	2.477,71	2	1.364,68	2	28,68	2	4	1.281,87	-	-	2	687,97	162,42	-	-	
36	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2011 dan 2012 di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat	1	1	-	-	16	4.695,98	7	2.187,73	1	532,49	1	5,92	2	3	1.281,87	-	-	2	687,97	-	-	-	
37	Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Saker-saker Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Sulawesi Tengah	-	-	-	-	3	249,91	2	227,15	-	-	1	22,76	-	-	-	-	-	-	-	162,42	-	-	
38	Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Saker-saker Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Sulawesi Tengah	-	-	-	-	3	895,02	1	62,83	1	832,19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Mabas TNI	4	-	4	-	5	252,72	3	252,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	234,27	-	-	
39	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2010, 2011, dan 2012 pada Denma Mabes TNI serta instansi	4	-	4	-	5	252,72	3	252,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	234,27	-	-	

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

[illegible]

Halaman 7 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefisienan																		Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus
1	TNI AU	2	3	5	6	3	8.121,31	10	1.397,90	3	312,75	2	6.108,52	9	302,14	3	302,14	15	15	9	18	19	20	21	22	23	24
9							USD 611,05																	429,27	21,30	1.684,22	
48	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI AU serta Dinas terkait	-	-	-	-	-	1.541,64	4	1.228,89	1	312,75	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,25	21,30	-
49	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara (Kodiklat) di Jaleria (TP No. 10)	-	-	-	-	-	471,15	6	169,01	-	-	-	-	6	3	302,14	-	-	-	-	-	-	-	-	169,02	-	-
50	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara (DISAEROU) Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di Jakarta	5	-	2	3	7	6.108,52	-	-	2	-	2	6.108,52	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1.684,22
		-	-	-	-	-	USD 611,05	-	-	-	-	-	USD 611,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepolisian RI	4	1	2	1	7	953,07	4	953,07	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pengelolaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan s.d. 2011 pada Kepolisian Daerah Jambi di Jambi	4	1	2	1	7	953,07	4	953,07	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kementerian Keuangan	2	-	2	-	15	4.437,66	1	12,04	2	4.163,85	1	32,40	7	2	229,37	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
52	Belanja Modal Kementerian Keuangan	2	-	2	-	15	4.437,66	1	12,04	2	4.163,85	1	32,40	7	2	229,37	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	-	2	1	6	3.212,78	2	1.154,12	1	849,10	3	1.209,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,57
53	Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Kapal Perikanan TA 2010 s.d. 2012	3	-	2	1	6	3.212,78	2	1.154,12	1	849,10	3	1.209,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,57
13	Kementerian Kesehatan	3	1	-	2	14	3.910,92	8	1.302,23	-	-	1	668,13	1	2	722,43	-	-	-	-	-	-	2	1.218,13	69,83	-	-
54	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana APBN TA 2011 pada Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam	3	1	-	2	8	979,55	5	779,62	-	-	-	-	1	1	59,93	-	-	-	-	-	-	1	140,00	53,94	-	-
55	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan TA 2010 dan 2011 pada Dinkes Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	2.931,37	3	522,61	-	-	1	668,13	-	1	662,50	-	-	-	-	-	-	1	1.078,13	15,89	-	-

Halaman 8 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyotoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindai lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Kerugian Negara				Potensi Kerugian Negara				Kekurangan Penerimaan				Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai				Jml kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
14	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	14	2.323,04	4	1.988,09	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	1	334,95	14,38	-	-		
56	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2011 dan 2012 (s.d Semester I) Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta	-	-	-	-	14	2.323,04	4	1.988,09	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	334,95	14,38	-	-		
15	PPATK	1	-	1	-	1	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	334,95	-	-	-		
57	Belanja PPATK TA 2011 dan s.d. 30 September 2012	1	-	1	-	1	334,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	334,95	-	-	-		
16	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2	-	1	1	30	10.409	10	3.527,75	-	-	9	2.813,43	9	1	3.605,25	-	-	1	462,77	508,07	-	600,19		
58	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2	-	1	1	30	10.409,20	10	3.527,75	-	-	9	2.813,43	9	1	3.605,25	-	-	1	462,77	508,07	-	600,19		
17	Badan Pertanahan Nasional	13	2	3	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
59	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Legalisasi Aset Perairahan Khususnya Prona Tahun 2010 dan 2011 pada Kantor BPN, kanwil BPN Prov. Jawa Tengah, dan kanwil BPN Prov. Jatim di Jakarta, Semarang, dan Surabaya	13	2	3	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Kementerian Perumahan Rakyat	-	-	-	-	7	909,53	4	786,97	-	-	-	-	1	1	122,56	-	-	1	-	-	-	-		
60	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat	-	-	-	-	7	909,53	4	786,97	-	-	-	-	1	1	122,56	-	-	1	-	-	-	-		
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta	6	1	5	-	37	13.176,64	20	10.886,05	-	-	9	643,90	4	3	1.357,31	-	-	1	289,38	83,83	-	3,55		
61	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Pendapatan dan Belanja) Tahun 2011 sampai dengan Triwulan III Tahun 2012 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta	3	1	2	-	23	9.852,94	12	8.185,90	-	-	7	404,64	1	2	973,02	-	-	1	289,38	82,18	-	-		

Halaman 9 - Lampiran 15

		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)						
NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Negara		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
62	Pengelolaan dan Perangaijawaban (Pendapatan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Trivulan III tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi					14	3.323,70	8	2.700,15	-	-	2	239,26	3	1	384,29	-	-	-	-	1,65	-										3,55		
20	Kementerian Agama	2	-	1	1	14	30.038,31	5	7.135,60	1	21.233,15	3	1.027,56	2	1	642,00	-	-	2	-	100,00	-										14,25		
63	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 Pada Dirlen Binas Islam	2	-	1	1	14	30.038,31	5	7.135,60	1	21.233,15	3	1.027,56	2	1	642,00	-	-	2	-	100,00	-										14,25		
	Jumlah	154	31	76	47	458	97.155,15	212	41.057,98	14	28.574,43	49	13.825,61	131	25	9.106,73	1	32,97	26	4.557,43	3.771,97	87,69									2.872,10			
							USD 611,85		USD 0,80				USD 611,05								USD 0,28										-			
							DKK 3,55		DKK 3,55																							-		
	Jumlah Rupiah						103.077,83		41.071,81		28.574,43		19.734,46			9.106,73		32,97		4.557,43	3.774,68	87,69									2.872,10			

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 16

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah

No	Kelompok	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	8	9
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	6	7
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	-	2	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	20	123	143
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	8	57	65
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/ Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	-	4	4
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8	41	49
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	-	4	4
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	-	7	7
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/ belanja	4	10	14
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	7	37	44
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	3	8	11
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	22	26
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	2	2
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	5	5
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		28	168	196

Halaman 1 - Lampiran 17

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Daerah	165	146.363,05	878	298.778,88	1.043	445.141,93
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	3	1.056,42	34	9.341,01	37	10.397,43
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	5	520,95	31	15.233,48	36	15.754,43
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	2.285,16	18	14.333,48	19	16.618,64
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	92	23.995,02	354	111.709,14	446	135.704,16
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	29	6.177,94	168	46.361,14	197	52.539,08
6	Pemahalan harga (Mark up)	6	17.681,30	55	11.524,25	61	29.205,55
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	143,67	15	5.232,26	16	5.375,93
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	1.307,75	45	5.965,49	52	7.273,24
9	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	300,76	15	1.146,07	16	1.446,83
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	9	1.138,07	57	51.322,78	66	52.460,85
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	8	91.368,03	66	22.132,96	74	113.500,99
12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	-	-	1	232,36	1	232,36
13	Lain - lain	3	387,98	19	4.244,46	22	4.632,44
II	Potensi Kerugian Daerah	35	31.519,25	273	120.130,01	308	151.649,26
1	Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	31	20.238,12	246	106.517,34	277	126.755,46
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2	2.120,74	2	63,97	4	2.184,71
3	Aset dikuasai pihak lain	-	-	2	250,45	2	250,45
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	1	82,40	1	82,40
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	1	73,00	1	73,00
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	4	603,80	4	603,80
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	-	-	2	644,50	2	644,50
8	Lain-lain	2	9.160,39	15	11.894,55	17	21.054,94
III	Kekurangan Penerimaan	56	11.711,95	300	45.172,30	356	56.884,25
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/daerah	48	7.760,56	257	37.381,12	305	45.141,68
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/daerah	8	3.951,39	39	7.495,92	47	11.447,31
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	-	-	2	25,41	2	25,41
4	Lain-lain	-	-	2	269,85	2	269,85

Halaman 2 - Lampiran 17

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
IV	Administrasi	38	-	205	-	243	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	-	21	-	21	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	15	-	74	-	89	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	10	-	10	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	16	-	65	-	81	-
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	3	-	8	-	11	-
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	2	-	3	-	5	-
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	-	-	4	-	4	-
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2	-	12	-	14	-
9	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	1	-	1	-
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	-	-	1	-	1	-
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-	-	3	-	3	-
12	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-	-	3	-	3	-
V	Ketidakhematan	21	92.987,43	118	82.369,00	139	175.356,43
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	4	9.010,43	3	104,36	7	9.114,79
2	penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	11	835,97	11	835,97
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	17	83.977,00	104	81.428,67	121	165.405,67
VI	Ketidakefisienan	-	-	1	4.359,11	1	4.359,11
1	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	-	-	1	4.359,11	1	4.359,11
VII	Ketidakefektifan	26	98.185,53	106	244.432,03	132	342.617,56
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	8	3.229,90	42	28.808,16	50	32.038,06
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	657,82	5	34,50	6	692,32
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	15	25.380,03	30	99.287,18	45	124.667,21
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	189,58	1	189,58
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	68.917,78	27	116.112,61	29	185.030,39
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	1	-	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		341	380.767,21	1.881	795.241,33	2.222	1.176.008,54

Halaman 1 - Lampiran 18

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

NO		TOTAL		Keklemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah tidak lanjut dalam proses pemeriksaan												
				Keklemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Keklemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Keklemahan Struktur Pengendalian Intern		Ketidakefektifan						Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan														
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	Prov. Aceh	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
1	1 Kab. Aceh Jaya	7	1.272,27	-	-	-	-	7	1.272,27	4	874,64	-	-	2	397,63	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	39,33							
1	2 Kab. Aceh Tenggara	18	607,51	3	-	2	-	15	607,51	8	482,37	4	111,93	1	13,21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3 Kab. Pidie	12	1.451,00	2	-	-	2	10	1.451,00	3	392,02	4	97,31	3	961,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4 Kab. Simeulue	15	4.293,26	1	-	-	1	14	4.293,26	3	191,96	6	1.862,72	4	428,03	-	-	-	-	-	-	1	1.810,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5 Kota Langsa	17	1.211,29	3	-	2	-	14	1.211,29	5	377,90	1	115,44	1	971,14	2	3	620,81	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Prov. Sumatera Utara																																	
1	6 Prov. Sumatera Utara	8	5.942,57	-	-	-	-	8	5.942,57	-	-	5	5.250,82	1	126,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	7 Kab. Nias	7	486,21	-	-	-	-	7	486,21	2	237,27	2	25,57	1	62,38	1	1	160,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8 Kab. Padang Lawas	6	1.455,21	-	-	-	-	6	1.455,21	3	1.402,39	1	52,82	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	9 Kab. Simalungun	18	5.806,93	2	-	-	1	16	5.806,93	8	1.313,92	3	1.430,57	2	59,56	1	1	244,25	-	-	-	1	2.758,53	420,45	5,43	13,97								
5	10 Kab. Tapanuli Selatan	11	5.491,89	-	-	-	-	11	5.491,89	2	252,20	5	4.927,32	-	-	3	312,37	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	11 Kota Sibolga	7	302,76	-	-	-	-	7	302,76	3	190,33	1	79,81	1	14,17	1	1	18,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	12 Kota Tobing Tinggi	13	5.698,46	-	-	-	-	13	5.698,46	6	4.172,71	4	1.475,66	1	50,09	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Prov. Sumatera Barat																																	
1	13 Prov. Sumatera Barat	20	2.752,46	4	-	-	-	16	2.752,46	9	889,73	1	353,84	2	102,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	14 Kab. Agam	10	970,40	1	-	-	-	9	970,40	1	33,16	2	189,74	2	623,91	-	3	123,59	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15 Kab. Pasisir Selatan	16	2.938,64	4	-	-	3	12	2.938,64	3	340,35	-	-	5	214,25	1	1	2.279,11	-	-	-	2	104,93	315,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	16 Kab. Solok Selatan	17	2.003,71	1	-	-	-	16	2.003,71	2	32,10	3	1.188,34	5	139,04	2	3	466,23	-	-	-	1	178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	17 Kota Bukittinggi	14	4.608,04	1	-	-	1	13	4.608,04	1	14,86	3	70,52	5	2.117,66	2	1	284,00	-	-	-	1	2.121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	18 Kota Padang	28	12.640,57	6	-	1	-	42	12.640,57	7	9.545,32	1	46,83	5	155,67	4	4	2.165,44	-	-	-	-	727,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	19 Kota Sawahlunto	22	2.563,63	1	-	-	-	21	2.563,63	6	1.234,46	-	-	8	128,17	2	1	125,04	-	-	-	4	1.075,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	20 Kota Solok	20	885,25	2	-	-	-	18	885,25	4	194,44	2	30,52	8	552,43	-	3	107,86	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Prov. Riau																																	
1	21 Kab. Bengkalis	29	3.822,39	-	-	-	-	29	3.822,39	28	3.135,79	-	-	-	-	-	1	686,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	22 Kab. Kampar	14	69.486,41	-	-	-	-	14	69.486,41	8	191,14	-	-	4	227,07	-	1	34,47	-	-	-	1	69.033,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	23 Kepulauan Meranti	14	1.569,43	2	-	-	1	12	1.569,43	10	1.181,73	2	387,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	24 Kab. Siak	19	2.131,58	1	-	-	-	18	2.131,58	15	2.109,60	1	21,98	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prov. Jambi																																	
1	25 Prov. Jambi	5	2.941,35	-	-	-	-	5	2.941,35	3	1.465,03	1	1.023,47	1	452,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	26 Kab. Batang Hari	6	645,27	-	-	-	-	6	645,27	5	643,62	-	-	1	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	27 Kab. Tanjung Jabung	4	1.256,72	-	-	-	-	4	1.256,72	3	1.233,49	-	-	1	232,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO		TOTAL				Keklemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefisienan																Nilai penyerahan aset atau penyerotan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan									
		Total SPH		Keklemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Keklemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Keklemahan Struktur Pengendalian Intern		Total ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Kerugian Negara				Potensi Kerugian Negara				Kekurangan Penerimaan				Ketidakefisienan				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		
1	28 Kab. Tanjung Jabung Timur	5	2.741,20	-	-	6	-	7	-	8	-	5	2.741,20	2	468,99	2	1.936,41	1	335,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	29 Kota Jambi	3	395,13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	395,13	2	368,26	-	-	1	26,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	30 Kota Sungai Penuh	4	654,68	-	-	-	-	-	-	-	-	4	654,68	4	654,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Prov. Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1	31 Kab. Banyuasin	10	455,87	1	-	-	-	1	-	-	-	9	455,87	4	82,97	5	372,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	32 Kab. Empat Lawang	4	2.861,51	-	-	-	-	4	-	-	-	4	2.861,51	3	2.486,46	1	375,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	33 Kab. Lahat	5	2.150,99	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.150,99	2	574,34	2	241,56	-	-	-	-	-	-	1	1.335,09	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	34 Kab. Muara Enim	3	868,02	-	-	-	-	-	-	-	-	3	868,02	1	620,34	1	247,68	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	35 Kab. Musi Rawas	10	1.141,86	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.141,86	4	83,53	5	1.039,72	1	18,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	36 Kab. Ogan Komering Ulu Timur	4	355,97	-	-	-	-	-	-	-	-	4	355,97	2	317,21	1	23,97	1	14,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	37 Kota Prabumulih	5	2.105,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.111,17	1	957,65	1	37,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Prov. Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	38 Kab. Bengkulu Selatan	7	555,51	1	-	-	-	1	-	-	-	6	555,51	3	423,73	1	63,97	2	67,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	39 Kab. Seluma	11	9.311,58	1	-	-	-	-	-	-	-	10	9.311,58	3	7.995,65	-	-	3	2	14,04	-	-	3	2	14,04	-	-	1	1.265,56	-	-	-	-
		3	40 Kota Bengkulu	12	1.746,06	1	-	-	-	1	-	-	-	11	1.746,06	4	1.401,00	1	73,00	4	202,17	1	69,89	1	1	1	69,89	-	-	1	32,011	-	-	-	-
4	41 Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	8	1.421,33	3	-	-	-	-	-	-	-	5	1.421,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	1.421,33	-	-	-	-		
5	42 Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Tersangka Kota Bengkulu	8	3.538,41	2	-	-	-	2	-	-	-	6	3.538,41	1	312,50	-	-	-	-	-	-	-	1	1	537,90	-	-	3	2.688,01	-	-	-	-		
8	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	43 Prov. Kepulauan Bangka Belitung	10	1.947,37	1	-	-	-	1	-	-	-	9	1.947,37	1	237,90	4	659,15	1	50,32	2	-	-	-	-	-	1	1.000,00	-	-	-	-	-	-
		2	44 Kabupaten Bangka	9	5.296,45	1	-	-	-	-	-	-	-	8	5.296,45	3	551,09	-	-	2	28,03	1	-	-	-	-	-	2	4.717,33	-	-	-	-	-	-
		3	45 Kabupaten Bangka Tengah	15	764,74	2	-	-	-	1	-	-	-	13	764,74	4	301,38	3	266,58	4	196,78	2	-	-	-	-	-	2	74,66	4,88	-	-	-	-	-
4	46 Kabupaten Belitung Timur	13	2.826,36	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.826,36	7	97,65	2	2.458,67	3	270,04	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 18

NO		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari lanjut dalam proses pemeriksaan				
		TOTAL		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kerugian penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Ketidakefektifan						
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
1	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Prov. Kepulauan Riau																											
1	47	Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang terkait dengan kegiatan TA 2011 dan 2012 Prov. Kep. Riau	19	9.744,33	-	-	-	-	-	19	9.744,33	9	1.641,08	5	878,08	3	254,77	1	-	-	-	-	-	1	6.970,40	895,45	-	961,1
2	48	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal Barang dan Jasa Terkait Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2011 dan 2012 Kab. Natuna	20	2.678,87	1	-	1	-	-	19	2.678,87	13	534,07	1	290,66	4	314,14	-	-	-	-	-	-	1	1.540,00	-	-	-
3	49	Pengadaan barang dan jasa dari belanja modal dan belanja barang dan jasa yang terkait konstruksi TA 2011 dan 2012 Kota Batam	13	221,29	-	-	-	-	-	13	221,29	6	77,18	4	81,09	2	63,02	1	-	-	-	-	-	-	-	21,51	-	5,69
4	50	DAK Bidang Kesehatan TA 2010 dan 2011 Kab. Kepulauan Anambas	8	1.615,30	2	-	2	-	-	6	1.615,30	4	1.454,14	-	-	-	-	1	161,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	51	DAK Bidang Kesehatan TA 2010 dan 2011 Kota Batam	6	594,18	-	-	-	-	-	6	594,18	3	376,11	-	-	-	-	2	218,07	-	-	-	1	-	159,09	-	-	-
10	Prov. DKI Jakarta																											
1	52	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta	4	1.006,51	2	-	2	-	-	2	1.006,51	-	-	-	-	-	-	-	1	117,35	-	-	1	889,16	-	-	-	-
2	53	Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	19	6.336,38	1	-	-	-	1	18	6.336,38	12	2.281,14	-	-	2	207,75	-	1	384,42	-	-	3	3.463,07	1.100,60	-	-	-
3	54	Belanja Daerah TA 2012 pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta	20	2.340,03	-	-	-	-	-	20	2.340,03	11	1.611,76	-	-	6	728,27	3	-	-	-	-	-	-	-	374,40	-	139,42
4	55	Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta TA 2011 dan 2012	17	6.414,87	1	1	-	-	-	16	6.414,87	5	1.304,49	6	2.112,92	5	2.997,46	-	-	-	-	-	-	-	-	1.304,50	155,31	23,56

Halaman 4 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	TOTAL	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Keketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan									
		Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
1	56	Belanja Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	13	4.377,76	-	-	-	7	-	-	13	4.377,76	4	579,55	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	57	Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	22	13.860,42	1	-	-	-	-	1	21	13.860,42	10	555,00	-	-	-	3	86,53	3	3	8.626,01	-	-	2	4.592,88	119,43	-	-
7	58	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (Triwulan III) pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta	7	1.639,25	-	-	-	-	-	-	7	1.639,25	6	1.639,25	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.639,25	-	-
8	59	Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kab Administrasi Kepulauan Seribu	7	562,79	-	-	-	-	-	-	7	562,79	6	415,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	147,73	415,06	-	-
9	60	Belanja Perencanaan Dinas Pada Sekretariat DPRD TA 2008 dan 2009	5	1.172,80	1	-	-	-	-	1	4	1.172,80	3	661,95	-	-	-	-	-	-	-	1	510,85	-	-	-	661,95	-	-
10	61	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012 Pada Dinas Perhubungan	22	16.862,11	3	-	-	-	3	-	19	16.862,11	13	14.607,68	1	1.465,99	3	688,69	1	-	-	-	-	-	1	99,75	724,64	1.465,99	94,06
11	62	Pendapatan dan Belanja Operasional Tahun Anggaran 2011 dan 2012 s.d Semester I pada Unit Pengelola Transjakarta Busway Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	18	14.205,84	3	-	-	-	3	-	15	14.205,84	4	2.080,83	2	9.160,39	4	2.790,62	4	-	-	174,00	-	-	-	-	52,21	-	14,48
11	Prov. Jawa Barat	26	9.261,80	1	-	-	-	1	-	-	25	9.261,80	11	1.310,70	-	-	-	2	90,02	5	4	220,38	-	-	3	7.640,70	-	-	-
2	64	Kab. Bekasi	13	1.733,73	-	-	-	-	-	-	13	1.733,73	4	571,87	3	790,40	4	122,94	-	1	26,84	-	-	-	1	221,68	-	-	-
3	65	Kab. Bogor	18	78.752,57	-	-	-	-	-	-	18	78.752,57	3	883,32	8	3.373,34	4	1.560,51	-	1	115,98	-	-	-	1	72.819,42	-	-	-
4	66	Kab. Cirebon	7	274,86	-	-	-	-	-	-	7	274,86	3	145,69	-	-	-	1	129,17	2	-	-	-	-	1	-	27,77	-	16,08
5	67	Kab. Garut	17	1.772,11	1	-	-	-	1	-	16	1.772,11	11	1.319,15	2	263,27	2	129,50	-	1	60,19	-	-	-	-	-	51,80	-	-
6	68	Kab. Karawang	11	1.940,53	1	-	-	-	1	-	10	1.940,53	6	1.913,20	-	-	-	1	15,18	2	1	12,15	-	-	-	-	-	-	-
7	69	Kab. Majalengka	12	1.914,18	-	-	-	-	-	-	12	1.914,18	7	467,08	-	-	-	2	183,57	1	-	-	-	-	2	1.263,53	113,96	-	63,91
8	70	Kota Cimahi	20	803,77	-	-	-	-	-	-	20	803,77	5	294,67	4	192,84	5	34,94	3	1	6,93	-	-	2	274,39	-	-	-	3,72

(nilai dalam juta rupiah)

[illegible]

Halaman 6 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengiklatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan													
		TOTAL		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Kerugian Negara			Kerugian Penerimaan			Administrasi						Ketidakefisienan		Ketidakefhematan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
15	Prov. Banten																														
1	86 Kab. Serang	7	3.321,10	1			1	6	3.321,10	2	592,60	2	2.645,95	1	82,55	1															
2	87 Kab. Tangerang	11	1.322,77	2			2	9	1.322,77	5	1.163,79	-	-	1	158,98	1						2		838,88							
16	Prov. Bali																														
1	88 Kab. Bangli	8	1.851,42	-			-																								
7	89 Kab. Buleleng	7	982,89	1			-																								
3	90 Kab. Jembrana	5	2.378,32	1			1	4	2.378,32	3	2.250,01	-	-	1	128,31	1									322,90		469,68				
4	91 Kab. Karangasem	11	1.238,04	4			4	7	1.238,04	3	1.181,06	1	45,78	1	11,20	2												108,20			
13	92 Kab. Klungkung	13	2.214,49	3			3	10	2.214,49	4	1.197,27	3	134,26	-	-	1						2		882,96							
6	93 Kota Denpasar	22	2.655,63	5			5	17	2.655,63	3	469,00	3	1.374,69	2	348,00	4		2	274,36			3		189,58							
7	94 Pengadalan Barang dan Jasa TA 2010, 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) Prov. Bali	17	102.160/75				-	-	17	102.160/75	13	19.471,29	-	-	-	-	-	3	78.585,28			1		4.104,18							
8	95 Pengadalan Barang dan Jasa TA 2010, 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) Kab. Tabanan	15	5.553,16	-			-	-	15	5.553,16	10	4.993,16	1	24,04	2	115,21	1		-			1		420,75							
17	Prov. Nusa Tenggara Barat																														
1	96 Belanja Modal Kab. Dompu	8	785,39	-			-	-	8	785,39	6	766,88	1	18,51	-	-	1		-			-									
2	97 Belanja Modal Kab. Lombok Timur	14	1.007,03	-			-	-	14	1.007,03	7	589,33	5	400,90	2	16,80	-		-			-									
3	98 Belanja Modal Kab. Lombok Utara	7	27.356,28	1			-	1	6	27.356,28	1	373,04	-	-	2	50,28	1	1	4,11			1		26.928,85							
4	99 Belanja Modal Kota Bima	11	490,01	3			3	-	8	490,01	2	73,68	2	36,28	1	81,20	1	1	94,65			1		244,20							
5	100 Belanja Modal Kota Mataram	4	65,89	-			-	-	4	65,89	1	23,49	1	26,72	1	15,68	1	-	-			-					0,76				
18	Prov. Nusa Tenggara Timur																														
1	101 Kab. Ende	29	2.761,22	3			-	2	2.761,22	4	763,98	4	375,19	4	251,56	8	2	51,62				4		1.318,87	31,94	1,00		13,02			
2	102 Kab. Mangarai	15	3.458,53	3			-	2	3.458,53	7	651,09	-	1	422,9	3	-	1	-	-			1		2.765,15	35,33	-	1,49				
3	103 Kab. Sumba Timur	13	2.114,24	3			2	1	10	2.114,24	2	100,30	4	166,02	1	166,02	1	-	-			-		1.665,33	4,46	19,56	109,28				
4	104 Kab. Sumba Tengah	24	1.525,45	2			1	1	22	1.525,45	5	655,22	4	371,53	5	386,26	6	1	112,44			-		1	8,75	180,96	120,25				
19	Prov. Kalimantan Barat																														
1	105 Prov. Kalimantan Barat	5	1.388,29	-			-	-	5	1.388,29	4	1.325,97	-	-	1	62,32	-		-			-									
2	106 Kab. Kapuas Hulu	11	1.586,99	1			1	10	1.586,99	5	928,69	1	22,89	1	2,14	1	1	-	-			2		633,27							
3	107 Kab. Melawi	9	447,68	-			-	9	447,68	5	308,96	-	-	2	93,90	-	1	13,14				-	1	31,68							
4	108 Kab. Sambor	7	480,06	2			2	5	480,06	3	480,06	1	9,57	-	-	-	2		-			-									

Halaman 7 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO		TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaksiptuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari lanjut dalam proses pemeriksaan										
		TOTAL				Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaksiptuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Ketidaksiptuhan Negara			Ketidaksiptuhan Penerimaan			Ketidaksiptuhan Administrasi			Ketidaksiptuhan Ketidaksiptuhan			Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai			Jml kasus	Nilai	
1	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
1	109 Kab. Sekeloa	5	1.090,91	-	-	-	-	5	1.090,91	3	1.064,22	-	-	1	3,72	-	1	22,97	-	-	-	-	59,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	110 Kab. Sintang	11	468,22	-	-	-	-	11	468,22	7	468,22	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	111 Kota Singkawang	9	398,96	-	-	-	-	9	398,96	4	268,57	-	-	1	21,48	2	2	108,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Prov. Kalimantan Tengah																															
1	112 Belanja Modal TA 2010, 2011 dan 2012 (Kecamatan I) Kab. Barito Timur	11	11.422,85	1	-	-	-	10	11.422,85	5	1.427,10	2	5.620,12	1	0,90	-	1	15,62	1	4.359,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	113 Belanja Modal Kab. Gunung Mas	7	516,55	2	-	-	2	-	5	516,55	1	46,72	1	305,98	1	12,35	-	1	151,50	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	114 Belanja Modal Kab. Kapuas	11	16.157,70	-	-	-	-	11	16.157,70	4	1.209,22	1	6.128,68	1	8.745,37	3	1	74,43	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	115 Belanja Modal Kab. Kotawaringin Barat	5	729,47	-	-	-	-	5	729,47	1	107,42	1	384,24	1	133,53	-	1	27,38	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	116 Belanja Modal Kab. Kotawaringin Timur	8	179,71	-	-	-	-	8	179,71	2	63,05	2	55,92	1	29,10	-	1	31,64	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	117 Belanja Modal Kab. Pulau Pisau	7	1.432,05	-	-	-	-	7	1.432,05	1	58,50	2	957,06	1	345,79	2	1	70,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	118 Belanja Modal Kota Palangkaraya	6	781,59	-	-	-	-	6	781,59	2	638,03	1	7,27	1	68,08	-	1	68,21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Prov. Kalimantan Selatan																															
1	119 Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Prov. Kalimantan Selatan	10	74.322,32	1	-	-	-	9	74.322,32	4	4.437,19	3	5.912,33	1	535,32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	120 Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kab. Banjar	10	939,38	1	-	-	-	9	939,38	6	864,26	-	-	2	75,12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	121 Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kab. Hulu Sungai Utara	10	7.968,22	-	-	-	-	10	7.968,22	7	6.650,63	1	1.193,40	1	124,19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	122 Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kab. Tabalong	8	4.754,18	1	-	-	1	-	7	4.754,18	5	4.640,58	1	91,65	1	21,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	123 Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kab. Tapin	11	6.141,67	-	-	-	-	11	6.141,67	10	5.826,12	-	-	1	315,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO		TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara																Ketidakefektifan				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah	Nilai penyerahan aset atau penyeton ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan	
		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Mekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Nilai temuan	Potensi Kerugian Daerah	Nilai	Kekurangan Penerimaan											
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus	Nilai									
21	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
22 Prov. Kalimantan Timur																																				
1	124	26	73.145,95	1	-	1	-	25	73.145,95	11	5.303,28	4	12.413,27	5	1.002,22	1	2	35.460,69	-	-	-	2	18.966,49	560,85	-	-										
23 Prov. Sulawesi Utara																																				
1	125	8	504,75	2	-	2	-	6	504,75	2	81,69	-	-	1	59,95	1	2	363,11	-	-	-	-	-	-	-	-										
2	126	16	1.555,18	-	-	-	-	16	1.555,18	5	247,55	3	810,37	1	275,63	5	2	221,63	-	-	-	-	-	254	-	-										
3	127	12	2.057,34	2	-	2	-	10	2.057,34	6	1.419,17	-	-	3	638,17	-	1	-	-	-	-	-	180,62	-	-	179,71										
4	128	25	2.899,77	1	-	1	-	24	2.899,77	8	1.910,43	2	97,87	5	336,98	5	2	322,23	-	-	-	2	232,26	-	-	-										
24 Prov. Sulawesi Tengah																																				
1	129	5	3.063,40	-	-	-	-	5	3.063,40	2	2.172,72	2	890,68	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	152,69	98,76	-										
2	130	4	1.686,03	-	-	-	-	4	1.686,03	2	1.649,97	1	36,06	-	-	-	1	-	-	-	-	-	630,91	96,06	-	-										
3	131	5	1.113,19	-	-	-	-	5	1.113,19	3	752,10	1	144,99	1	216,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	132	3	489,56	-	-	-	-	3	489,56	1	95,26	1	74,87	1	319,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
25 Prov. Sulawesi Selatan																																				
1	133	13	3.402,80	1	-	1	-	12	3.402,80	4	1.726,19	1	400,57	4	276,72	-	1	96,71	-	-	2	902,61	198,37	-	158,47											
2	134	12	841,91	1	-	1	-	11	841,91	7	820,55	1	7,52	2	13,84	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-										
3	135	12	1.526,88	1	-	1	-	11	1.526,88	6	1.067,93	-	-	3	458,95	1	-	-	-	-	1	-	-	309,25	-	6,63										
4	136	5	172,88	2	-	2	-	3	172,88	2	94,94	-	-	1	77,94	-	-	-	-	-	-	-	-	78,19	-	-										
5	137	9	25.854,04	1	-	1	-	8	25.854,04	5	25.717,03	1	126,67	1	10,34	-	-	-	-	-	1	-	-	110,87	-	-										
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Halaman 9 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidakefektifan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah dihindari lanjut dalam proses pemeriksaan											
		TOTAL			Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total ketidakefektifan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan						
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
Prov. Sulawesi Tenggara																																					
26	1	138	2.348,33	3	-	-	-	3	19	2.348,33	9	1.661,46	2	118,86	-	-	6	1	312,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2	139	1.305,72	3	1	-	2	14	1.305,72	4	248,09	3	114,64	1	13,72	4	1	187,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3	140	5.885,01	1	1	-	-	12	5.885,01	5	5.475,19	1	393,85	1	15,97	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Prov. Gorontalo																																					
27	1	141	4.150,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2	142	4.285,36	1	-	-	-	23	4.285,36	13	616,41	-	-	-	-	-	2	8	3.668,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3	143	1.395,93	3	1	2	-	10	1.395,93	5	944,24	-	-	-	-	-	1	3	409,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4	144	3.165,52	1	-	-	-	1	3.165,52	7	668,06	-	-	-	-	-	-	3	2.497,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5	145	1.650,34	-	-	-	-	5	1.650,34	2	133,77	-	-	-	-	-	-	3	1.516,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6	146	4.697,18	3	-	-	3	-	4.697,18	3	790,50	-	-	-	-	-	-	2	1	3.406,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	147	1.506,16	-	-	-	-	17	1.506,16	7	1.256,55	4	194,47	4	55,14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	148	9.754,65	-	-	-	-	23	9.754,65	14	4.218,49	3	61,89	5	57,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prov. Sulawesi Barat																																					
28	1	149	1.005,64	2	1	1	-	7	1.005,64	4	581,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	150	5.134,88	9	-	7	2	9	5.134,88	4	1.514,75	1	722,00	1	269,83	-	-	1	1	723,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	151	164,95	4	1	3	-	6	164,95	2	23,01	1	134,05	1	7,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prov. Maluku																																					
29	1	152	5.600,23	3	-	2	1	24	5.600,23	11	3.496,10	2	1.431,26	7	600,42	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	153	8.429,45	2	-	2	-	26	8.429,45	13	3.568,53	1	165,28	8	4.695,64	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	154	3.030,37	2	-	-	2	26	3.030,37	22	2.900,18	1	82,40	2	47,79	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 10 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	TOTAL				Keklemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan																Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan													
	Keklemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Keklemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Keklemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Kerugian Negara				Potensi Kerugian Negara				Kekurangan Penerimaan				Administrasi				Ketidakefisienan				Ketidakefektifan				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26														
30	Prov. Maluku Utara																																					
1	155	Kab. Halmahera Barat	23	6.905,35	1	-	-	22	6.905,35	12	4.931,11	3	300,88	3	276,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	156	Kab. Halmahera Tengah	13	2.325,11	-	-	13	2.325,11	7	1.197,46	6	1.127,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	157	Kab. Halmahera Timur	15	1.251,92	-	-	15	1.251,92	9	777,64	3	171,26	3	303,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	158	Kab. Halmahera Utara	25	15.776,36	1	-	24	15.776,36	4	545,10	13	12.686,80	7	2.544,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	159	Kab. Kepulauan Sula	27	6.331,28	-	-	27	6.331,28	8	1.847,52	12	4.151,56	6	332,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	160	Kab. Pulau Morotai	36	3.943,93	-	-	36	3.943,93	17	2.958,59	3	274,96	4	229,57	10	2	480,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	161	Kota Tidore Kepulauan	30	4.317,04	-	-	30	4.317,04	17	869,68	6	305,48	3	66,64	-	3	1.918,72	-	-	-	-	1	1.156,52	55,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	162	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 Prov. Maluku Utara	34	6.660,97	1	-	33	6.660,97	20	5.882,92	1	166,02	11	612,03	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	163	Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 Kota Ternate	4	636,30	-	-	4	636,30	2	110,87	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	525,43	36,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	164	Belanja Modal Kab. Kepulauan Sula	40	51.090,17	2	-	38	51.090,17	18	45.664,01	3	3.009,43	5	2.416,73	7	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
31	Prov. Papua																																					
1	165	Kab. Boven Digoel	13	9.847,54	-	-	13	9.847,54	6	3.663,19	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	5.937,59	21,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	166	Kab. Jayawijaya	17	6.193,54	1	-	16	6.193,54	7	1.836,71	3	2.875,27	3	723,68	-	-	2	238,10	-	-	-	1	519,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	167	Kab. Keerom	25	16.158,68	3	-	22	16.158,68	12	5.832,73	1	253,33	-	-	6	2	8.945,76	-	-	-	1	1.126,86	1.449,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	168	Kab. Mamberamo Raya	17	9.514,25	1	-	16	9.514,25	9	7.253,28	-	-	2	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	169	Kab. Mappi	17	9.862,73	1	-	16	9.862,73	9	4.209,68	1	197,75	-	-	-	2	4	5.455,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	170	Kab. Nabire	17	16.880,01	2	-	15	16.880,01	6	5.795,35	2	7.805,81	1	364,70	3	1	1.220,00	-	-	-	2	1.694,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	171	Kab. Supiori	23	5.505,03	-	-	23	5.505,03	12	2.164,45	2	644,50	5	654,93	1	2	591,34	-	-	-	-	1.449,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	172	Kab. Waropen	14	13.769,21	-	-	14	13.769,21	11	11.838,95	-	-	2	147,26	-	-	-	-	-	-	-	1.783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	173	Kab. Yahukimo	17	5.100,67	-	-	17	5.100,67	10	3.898,63	1	60,61	2	358,32	3	1	783,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
32	Prov. Papua Barat																																					
1	174	Prov. Papua Barat	11	84.753,58	-	-	11	84.753,58	6	81.394,57	2	1.991,52	3	1.367,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	175	Kab. Fakfak	5	5.738,25	-	-	5	5.738,25	3	1.707,18	2	4.031,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	176	Kab. Kaimana	9	3.365,68	-	-	9	3.365,68	4	918,45	2	1.165,32	3	1.281,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	177	Kab. Manokwari	6	2.023,76	-	-	6	2.023,76	5	1.989,32	-	-	1	34,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	178	Kab. Maybrat	13	5.588,18	-	-	13	5.588,18	9	2.967,84	3	2.352,46	1	267,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	179	Kab. Raja Ampat	6	444,25	-	-	6	444,25	5	198,31	-	-	1	245,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	180	Kab. Sorong	8	10.613,48	1	-	7	10.613,48	4	299,40	2	10.073,20	1	240,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	181	Kab. Sorong Selatan	7	1.825,72	-	-	7	1.825,72	3	1.341,53	1	45,21	3	438,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	182	Kab. Tambora	7	3.847,76	-	-	7	3.847,76	4	3.289,68	1	214,86	2	343,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	183	Kab. Teluk Bintuni	6	6.871,96	-	-	6	6.871,96	3	6.169,92	1	159,82	2	542,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Halaman 11 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diungkap lanjut dalam proses pemeriksaan																													
	TOTAL		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Ketidapatuhan Terhadap ketentuan Perundang-undangan				Keuangan Negara				Potensi Keugian Negara				Kekurangan Penerimaan				Administrasi		Ketidakefektifan				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
1	2																																	
11	184	Kab. Teluk Wondama	7	1.936,93	-	-	-	7	1.936,93	4	1.693,26	-	-	-	3	243,67	-	-	-	-	-	-	198,87	-	-	14,18								
12	185	Kota Sorong	7	333,09	-	-	-	7	333,09	4	107,35	3	225,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,71	9,85	-									
			2.418	1.176.008,54	196	9	143	44	2.222	1.176.008,54	1.043	445.141,93	308	151.649,26	356	56.884,25	243	139	175.356,43	1	4.359,11	132	342.617,56	28.211,47	9.010,17	4.756,56								
			369	380.767,21	28	1	20	7	341	380.767,21	165	146.865,05	35	31.519,25	56	11.711,95	38	21	92.987,43	-	-	26	98.185,53	12.516,07	7.086,63	951,41								
			2.049	795.241,33	168	8	123	37	1.881	795.241,33	878	298.778,88	273	120.130,01	300	45.172,30	205	118	82.369,00	1	4.359,11	106	244.432,03	15.695,40	1.313,54	3.805,15								

Lampiran 19

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset

No	Kelompok	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	29	13	124	7	173
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	22	7	108	5	142
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	3	10	-	15
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	3	3	2	10
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	3	-	3	-	6
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	29	3	39	11	82
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	-	4	-	6
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	5	-	-	-	5
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3	-	4	-	7
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	3	27	5	53
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/ belanja	-	-	2	6	8
6	Lain-lain	1	-	2	-	3
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	8	4	36	8	56
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	6	4	28	4	42
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	-	8	4	13
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	-	-	-	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		66	20	199	26	311

Halaman 1 - Lampiran 20

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/ Kota		BUMN		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:											
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	7	374,56	4	40.582,33	20	9.535,45	3	11.542,63	34	62.034,97
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	2	151,33	-	-	-	-	-	-	2	151,33
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	2	3,08	-	-	1	269,39	1	9.324,68	4	9.597,15
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	67,75	-	-	-	-	2	2.217,95	3	2.285,70
5	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan	-	-	2	11.877,98	5	4.411,97	-	-	7	16.289,95
6	Lain-lain	2	152,40	2	28.704,35	13	4.854,09	-	-	17	33.710,84
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan	12	114.732,00	11	16.818,03	33	49.270,73	-	-	56	180.820,76
1	Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan Kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	-	-	1	115,21	-	-	1	115,21
2	Aset dikuasai pihak lain	8	80.266,09	7	5.805,40	15	9.008,27	-	-	30	95.079,76
3	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	-	-	1	163,15	-	-	1	163,15
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	3	-	3	10.586,94	14	39.455,95	-	-	20	50.042,89
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	34.465,91	-	-	1	275,77	-	-	2	34.741,68
6	Lain-lain	-	-	1	425,69	1	252,38	-	-	2	678,07
III	Kekurangan Penerimaan	3	6.880,38	1	12,50	15	8.162,37	6	6.299,59	25	21.354,84
									USD 306,67		USD 306,67
	Jumlah Rupiah		6.880,38		12,50		8.162,37		9.265,09		24.320,34
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disor ke Kas Negara/Daerah	1	79,50	-	-	2	40,39	2	1.414,68	5	1.534,57
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disor ke Kas Negara/Daerah	2	6.800,88	1	12,50	13	8.121,98	2	4.753,01	18	19.688,37
									USD 306,67		USD 306,67
	Jumlah Rupiah		6.800,88		12,50		8.121,98		7.718,51		22.653,87
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	-	-	-	-	-	-	2	131,90	2	131,90
IV	Administrasi	36	-	40	-	203	-	11	-	290	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	-	-	6	-	2	-	8	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah)	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	27	-	26	-	151	-	6	-	210	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	-	-	4	-	2	-	1	-	7	-

Halaman 2 - Lampiran 20

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/ Kota		BUMN		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	6	-	8	-	37	-	2	-	53	-
10	Lain-lain	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
V	Ketidakhematan	-	-	1	-	3	415,25	1	2.473,31	5	2.888,56
1	Pemborosan keuangan negara/daerah atau kemahalan harga	-	-	1	-	3	415,25	1	2.473,31	5	2.888,56
VI	Ketidakefektifan	2	1.383,33	5	3.952,97	21	129.042,77	-	-	28	134.379,07
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	1.383,33	2	3.952,97	15	129.042,77	-	-	19	134.379,07
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		60	123.370,27	62	61.365,83	295	196.426,57	21	20.315,53	438	401.478,20
									USD 306.67		USD 306.67
Jumlah Rupiah			123.370,27		61.365,83		196.426,57		23.281,03		404.443,70

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakefektifan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan				Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Struktur Pengendalian Intern		Total		Keuangan Negara/ Daerah		Kekurangan Negara/ Daerah	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemerintah Pusat													
1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah serta Aset Gedung dan Bangunan s.d Semester I Tahun 2011 pada UO Kementerian Pertahanan	5	2	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-
2	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah serta Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I Tahun 2011 pada UO NABES TNI	6	3	3	-	4	-	-	-	-	-	4	-
3	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Th 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2011 Pada UO TNI AD	9	4	4	1	10	87.044,97	-	-	2	80.266,09	1	6.778,88
4	Pemeriksaan Atas Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Th 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2011 Pada UO TNI AL	8	4	4	-	8	79,50	-	-	-	-	-	-
5	Pemeriksaan Atas Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara/BMN) khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d. Semester I tahun 2011 pada UO TNI AU	9	5	4	-	4	34.465,91	-	-	3	34.465,91	-	-
6	Manajemen Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia	9	5	1	3	5	-	-	-	1	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 21

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan		
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara/ Daerah			Potensi Kerugian Negara/ Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
7	7 Pengelolaan Aset dan Hibah Tahun Anggaran 2011 dan Semester I 2012 Pada Badan Usaha Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA), Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	14	3	9	2	24	1.757,22	6	351,89	3	-	1	22,00	12	-	-	2	1.383,33	50,44	-		
8	8 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	3	1	2	3	22,67	1	22,67	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
Jumlah I		66	29	29	8	60	123.370,27	7	374,56	12	114.732,00	3	6.880,38	36	-	-	2	1.383,33	50,44	-		
Pemerintah Daerah																						
1	Provinsi Aceh																					
1	1 Pemeriksaan Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	2	2	-	-	2	311,15	-	-	-	-	1	311,15	1	-	-	-	-	-	311,15		
2	Provinsi Riau																					
2	2 Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekanbaru	17	3	11	3	28	10.861,47	1	4.000,00	4	275,77	5	6.454,95	14	1	130,75	3	-	4.000,00	-		
3	Provinsi Sumatera Selatan																					
3	3 Pengelolaan Aset Pemerintah Prov. Sumatera Selatan	5	3	2	-	10	3.466,66	-	-	3	-	-	-	6	-	-	1	3.466,66	-	-		
4	Provinsi Bengkulu																					
4	4 Manajemen Aset Daerah Pemkab Lebong	10	9	-	1	9	66.126,73	-	-	2	1.673,56	-	-	6	-	-	1	64.453,17	-	-		
5	Provinsi Jawa Tengah																					
5	5 Manajemen Aset Tetap Kab. Banjarnegara	9	7	1	1	5	2.103,17	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2.103,17	-	-		
6	Manajemen Aset Tetap Kab Pemalang	6	5	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-		

Halaman 3 - Lampiran 21

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7	Manajemen Aset pada Kabupaten Sukoharjo	8	4	3	1	7	297,27	1	106,93	-	-	1	190,34	3	-	-	2	-	-	-	
6	Provinsi DIY																				
8	Manajemen Aset TA 2012 (s.d. 30 Juni 2012 (s.d. 30 Juni) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	6	6	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
7	Provinsi Jawa Timur																				
9	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Malang per 30 Juni 2012	12	8	1	3	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	
10	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pasuruan	8	7	1	-	9	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	
11	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pasuruan per 30 Juni 2012	10	8	-	2	6	66,34	2	66,34	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
12	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Daerah Per 30 Juni 2012 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	8	5	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
13	Manajemen Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Agustus 2012	2	-	1	1	10	371,81	1	-	2	367,59	1	4,22	5	-	-	1	-	-	-	
14	Manajemen Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Oktober 2012	3	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
8	Provinsi Kalimantan Barat																				
15	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Pontianak	14	6	6	2	12	118,90	1	118,90	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 21

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern						Ketidaka patuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diindikasikan lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
16	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Kuba Raya	13	10	-	3	21	1.496,56	1	-	2	1.467,85	1	28,71	17	-	-	-	-	-	-			
17	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Landak	4	4	-	-	15	32,50	1	32,50	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-			
9	Provinsi Kalimantan Tengah																						
18	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Katingan	3	3	-	-	7	15,00	1	15,00	1	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-			
19	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Barito Timur	7	5	-	2	11	31,04	1	31,04	-	-	-	-	9	-	-	1	-	-	-			
20	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara	3	3	-	-	18	2.563,22	1	48,68	3	2.085,56	1	11,68	10	1	266,00	2	151,30	-	-			
10	Provinsi Kalimantan Selatan																						
21	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kota Banjarbaru TA 2008 sd snt 1 TA 2012	7	7	-	-	16	16.795,85	1	16,20	4	16.384,39	1	17,28	9	-	-	1	377,98	-	-			
11	Provinsi Sulawesi Utara																						
22	Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	8	4	-	4	19	12,50	-	-	2	-	1	12,50	13	1	-	2	-	-	-			
12	Provinsi Sulawesi Tengah																						
23	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 Pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah	2	1	1	-	8	16.225,89	3	12.046,25	3	4.179,64	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
24	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 Pada Pemerintahan Kabupaten Poso	4	1	1	2	12	9.306,92	3	463,07	3	6.399,91	1	1.054,50	4	-	-	1	1.389,44	-	-			
25	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 Pada Pemerintahan Kabupaten Banggai	7	4	3	-	17	12.545,43	1	36,55	4	2.536,05	-	-	11	-	-	1	9.972,83	-	-			

Halaman 5 - Lampiran 21

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

[illegible]

Halaman 6 - Lampiran 21

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diindikasikan lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan		
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus				Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Manajemen Aset PT Timah (Persero) Tbk	5	3	-	2	5	10.358,13	1	9.324,68	-	-	1	1.033,45	3	-	-	-	-	-	-
3	Manajemen Aset PT Antam (Persero) Tbk	8	3	2	3	10	5.204,39	2	2.217,95	-	-	3	513,13	4	1	2.473,31	-	-	-	-
Jumlah III		26	7	11	8	21	20.315,53	3	11.542,63	-	-	6	6.299,59	11	1	2.473,31	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah						USD 306,67		11.542,63		-		9.265,09			2.473,31		-	-	-
	Total ((I + II + III))	311	173	82	56	438	401.478,20	34	62.034,97	56	180.820,76	25	21.354,84	290	5	2.888,56	28	134.379,07	4.050,44	371,15
	Jumlah Rupiah						USD 306,67		62.034,97		180.820,76		24.320,34			2.888,56		134.379,07	4.050,44	371,15
Pemerintah Provinsi		20	13	3	4	62	61.365,83	4	40.582,33	11	16.818,03	1	12,50	40	1	-	5	3.952,97	-	-
Pemerintah Kabupaten/Kota		199	124	39	36	295	196.426,57	20	9.535,45	33	49.270,73	15	8.162,37	203	3	415,25	21	129.042,77	4.000,00	371,15

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 22

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	7
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	4
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		11

Lampiran 23

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jml Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kekurangan Penerimaan	50	USD 37,864.67
			6.338,53
	Jumlah Rupiah		372.489,89
1	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	48	USD 37,864.67
		2	6.338,53
	Jumlah Rupiah		372.489,89
II	Administrasi	3	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		53	USD 37,864.67
			6.338,53
Jumlah Rupiah			372.489,89

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 24

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KKKS Job Pertamina Petrochina Salawati	1	-	-	1	6	USD 1,826.64	6	USD 1,826.64	-	
2	KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ	2	-	2	-	8	USD 1,439.60	8	USD 1,439.60	-	
		-	-	-	-	1	6.325,77	1	6.325,77	-	
3	KKKS PT Pertamina EP	6	-	5	1	5	USD 2,992.03	5	USD 2,992.03	-	
4	KKKS Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu	-	-	-	-	6	USD 1,304.99	6	USD 1,304.99	-	
		-	-	-	-	1	12,76	1	12,76	-	
5	KKKS Medco E&P Indonesia	-	-	-	-	6	USD 518.20	6	USD 518.20	-	
6	KKKS Mobil Cepu Ltd.	1	-	-	1	13	USD 29,747.10	12	USD 29,747.10	1	
7	KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering	1	-	-	1	7	USD 36.11	5	USD 36.11	2	
	Jumlah	11	-	7	4	53	USD 37,864.67	50	USD 37,864.67	3	
							6.338,53		6.338,53		
	Jumlah Rupiah						372,489.89		372,489.89		

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 25

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	32
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	26
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4
3	entitas terlambat menyampaikan laporan	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	69
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	8
2	mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	22
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	34
6	Lain-lain	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	174
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	30
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	136
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	6
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		275

Halaman 1 - Lampiran 26

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Negara/Perusahaan	10	7.501,20
			USD 58.00
	Jumlah rupiah		8.062,06
1	Kekurangan volume pekerjaan	5	301,77
2	Pemahalan harga (Mark up)	1	USD 58.00
	Jumlah rupiah		560,86
3	penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	6.274,41
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	304,52
5	Lain-lain	1	620,50
II	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	22	734.930,68
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian / seluruhnya	2	38.439,57
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	17	329.240,22
3	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1	281,49
4	Lain-lain	2	366.969,40
III	Kekurangan Penerimaan	17	202.675,80
			USD 1,666.68
	Jumlah rupiah		218.792,60
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/perusahaan	3	1.619,67
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/perusahaan	12	146.725,80
			USD 1,666.68
	Jumlah rupiah		162.842,60
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/perusahaan	2	54.330,33
IV	Administrasi	121	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	4	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/perusahaan)	7	
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Perusahaan	1	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	98	-
5	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	5	-
6	Penyetoran penerimaan negara/perusahaan melebihi batas waktu yang ditentukan	2	-
7	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-
10	Lain-lain	1	-

Halaman 2 - Lampiran 26

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
V	Ketidakhematan	9	7.339,46
1	penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	2	447,88
2	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	7	6.891,58
			-
VI	Ketidakefektifan	34	130.843,37
1	penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6	118.845,07
2	barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	885,20
3	pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5	11.113,10
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	21	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		213	1.083.290,51
			USD 1,724.68
	Jumlah dalam Rupiah *		

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 27

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)			Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan								
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara/ Perusahaan			Potensi Kerugian Negara/Perusahaan			Kekurangan Penerimaan									Administrasi	Ketidakefektifan			Kerugian Negara/ Perusahaan	Kekurangan Penerimaan
							Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus								Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
1	PT Tugu Pratama Indonesia dan Tugu Insurance Company Limited	7	1	-	6	5	81.741,51	-	-	3	81.741,51	-	-	-	-	-	2	-	-	-										
2	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Beban Kontrak pada PT. Hutama Karya (Persero)	9	2	4	3	7	154.943,42	-	-	4	18.454,03	3	136.489,39	-	-	-	-	-	-	-										
3	Pengelolaan Deposito Tahun 2011 dan 2012 pada PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ Bali Tourism Development Corporation (Persero) (PT BTDC)	1	-	-	1	2	6.110,15	1	6.110,15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-										
4	PT Dok dan Pelabuhan Surabaya (Persero)	17	3	6	8	10	36.883,54	2	620,50	1	35.063,04	1	1.200,00	5	-	-	1	-	-	-										
5	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	11	1	5	5	14	6.079,24	-	-	-	-	3	924,49	6	4	5.154,75	1	-	-	-										
6	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	18	4	11	3	10	120.784,55	-	-	-	-	3	8.317,92	2	-	-	5	112.467	-	-										
7	Pembentukan Holding BUMN Perkebunan dan Penjualan Komoditas Perkebunan pada PT KPBN	12	-	9	3	-	-	-	-	-	-	-	USD 1,666.68	-	-	-	-	-	-	-										
8	PT Inuhani III (Persero)	5	1	3	1	3	180,61	1	164,26	-	-	1	16,35	-	-	-	1	-	-	-										
9	Perum Perhutani	4	2	2	-	11	80.069,76	4	235,51	4	77.902,43	2	718,58	-	1	1.213,24	-	-	-	-										
10	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan dan Pengendalian Biaya Pada PT Mega Eltra	4	1	1	2	6	6.246,04	-	-	2	4.425,90	1	284,60	1	1	650,34	1	885,20	-	-										
11	Penyelenggaraan Program Santunan dan Tabungan Hari Tua, Dana pensiun, Biaya Operasional & Belanja Modal serta PKBL PT ASABRI (Persero)	14	6	2	6	15	430.252,96	1	304,52	4	372.808,91	2	54.330,33	5	1	-	2	2.809,20	-	-										

Halaman 2 - Lampiran 27

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Anggaran Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara/Perusahaan			Potensi Kerugian Negara/Perusahaan			Kekurangan Penerimaan			Administrasi	Ketidakefektifan			Kerugian Negara/Perusahaan	Kekurangan Penerimaan		
						Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		Nilai					Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
12	Pengelolaan Kredit Pada PT Bank BRI (Persero) Tbk	120	8	7	105	108	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	14	-	-	-				
13	Pengelolaan Kredit Pada PT Bank BTN (Persero) Tbk	26	1	8	17	11	83.385,55	-	-	1	83.385,55	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-				
14	Pelaksanaan Program pengelolaan barang/jasa, pengelolaan biaya operasional, dan PKBL pada PT Askes (Persero)	19	2	6	11	9	49.331,98	1	66,26	1	33.868,11	1	394,14	2	2	321,13	2	14.682,34	66,27	-	335,15				
15	Pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, kegiatan investasi dan pengelolaan PKBL Pada PT Sucofindo (Persero)	8	-	5	3	2	27.281,20	-	-	2	27.281,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Jumlah		275	32	69	174	213	1.083.290,51	10	7.501,20	22	734.930,68	17	202.675,80	121	9	7.339,46	34	130.843,37	66,27	-	335,15				
Jumlah Rupiah							USD 1,724,68		USD 58,00				USD 1,666,68												
							1.099.968,17		8.062,06				218.792,60												

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 28

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya

No	Kelompok	BPR/BPD	PDAM	RSUD	BUMD Lainnya	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	15	7	2	20	44
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6	2	1	10	19
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	3	-	6	11
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	-	-	1	1
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	7	2	1	2	12
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	-	-	-	1	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	56	28	6	38	128
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	3	-	6	14
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	2	-	1	3	6
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	14	6	3	9	32
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	-	-	-	1
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	9	13	2	14	38
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	25	5	-	6	36
7	Lain-lain	-	1	-	-	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	67	21	2	41	131
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	27	12	2	26	67
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	36	8	-	9	53
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	-	-	-	1	1
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	-	-	3	4
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	3	1	-	2	6
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		138	56	10	99	303

Halaman 1 - Lampiran 29

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	BPR/BPD		PDAM		RSUD		BUMD Lainnya		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
I	Kerugian Daerah/Perusahaan	35	169.147,64	21	1.973,59	1	254,10	10	2.160,61	67	173.535,94
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	4	237,44	2	58,75	1	254,10	-	-	7	550,29
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	12,86	2	47,71	-	-	2	87,02	6	147,59
3	Pemahalan harga (Mark up)	-	-	1	17,87	-	-	-	-	1	17,87
4	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	-	-	5	241,20	-	-	2	215,77	7	456,97
5	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	4,05	2	191,97	-	-	-	-	3	196,02
6	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	3	131,81	3	325,30	-	-	-	-	6	457,11
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3	4.081,60	-	-	-	-	-	-	3	4.081,60
8	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	6	1.739,16	5	894,34	-	-	4	1.374,40	15	4.007,90
9	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	14	162.373,35	1	196,45	-	-	2	483,42	17	163.053,22
10	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	1	367,37	-	-	-	-	-	-	1	367,37
11	Lain-lain	1	200,00	-	-	-	-	-	-	1	200,00
II	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	32	363.492,82	6	3.637,16	1	140,83	13	4.905,80	52	372.176,61
			USD 9.530,27		-		-		-		USD 9.530,27
	Jumlah Rupiah		455.650,53		3.637,16		140,83		4.905,80		464.334,32
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	59,02	1	35,75	-	-	-	-	2	94,77
2	Aset dikuasai pihak lain	-	-	1	-	-	-	2	93,50	3	93,50
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	-	-	1	140,83	-	-	1	140,83
4	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	3	1.700,00	-	-	-	-	-	-	3	1.700,00
5	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
6	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	28	361.733,80	4	3.601,41	-	-	6	4.222,47	38	369.557,68
			USD 9.530,27		-		-		-		USD 9.530,27
	Jumlah Rupiah		453.891,51		-		-		-		453.891,51
7	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	1	523,31	1	523,31
8	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	1	66,52	1	66,52
III	Kekurangan Penerimaan	18	4.676,87	8	352,37	6	8.578,91	31	151.828,89	63	165.437,04
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke Kas Daerah atau perusahaan	5	899,75	2	171,80	1	288,13	1	63,43	9	1.423,11
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah atau perusahaan	12	3.773,84	3	37,00	4	3.449,22	30	151.765,46	49	159.025,52
3	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	-	-	-	-	1	4.841,56	-	-	1	4.841,56
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	3,28	3	143,57	-	-	-	-	4	146,85
IV	Administrasi	32		22		4		35		93	
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1		2		-		2		5	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	2		6		-		5		13	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		2		1		-		4	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	3		2		-		1		6	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-		-		-		1	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/Perusahaan	2		3		-		4		9	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	19		3		1		16		39	

Halaman 2 - Lampiran 29

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	BPR/BPD		PDAM		RSUD		BUMD Lainnya		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
8	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-		-		1		2	
9	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-		2		1		4	
10	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-		-		-		3		3	
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		2		-		2		5	
12	Lain-lain	-		2		-		-		2	
V	Ketidakhematan	11	19.894,54	7	7.204,97	1	166,34	3	178,39	22	27.444,24
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	25,80	1	43,12	-	-	-	-	2	68,92
2	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga	10	19.868,74	6	7.161,85	1	166,34	3	178,39	20	27.375,32
VI	Ketidakefektifan	10	347.418,60	7	185,84	1	22.206,25	4	1.215,54	22	371.026,23
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan	1	5,87	2	185,84	-	-	1	1.215,54	4	1.407,25
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	1.694,36	1	-	-	-	-	-	3	1.694,36
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	-	-	1	22.206,25	1	-	2	22.206,25
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	317.962,75	-	-	-	-	1	-	5	317.962,75
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2	27.755,62	3	-	-	-	-	-	5	27.755,62
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		138	904.630,47	71	13.353,93	14	31.346,43	96	160.289,23	319	1.109.620,06
			USD 9,530.27		-		-		-		USD 9,530.27
Jumlah Rupiah		138	996.788,18	71	13.353,93	14	31.346,43	96	160.289,23	319	1.201.777,77

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 30

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya

NO		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara/ Daerah			Potensi Kerugian Negara/ Daerah			Kekurangan Penerimaan						Administrasi			Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus					Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				Nilai	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Halaman 2 - Lampiran 30

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara/ Daerah			Potensi Kerugian Negara/Daerah			Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan			
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
7	Prov. Jawa Tengah																						
7	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012	5	1	2	2	20	15.300,37	5	5.893,28	9	9.191,17	2	215,92	3	1	-	-	-	-	-	-	12,53	
8	Operasional pada PD BPR Bank Bapas 69 Kab. Magelang TB 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni 2012)	13	3	6	4	6	127,23	3	29,92	-	-	3	97,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Operasional PD BPR Djoko Tingkir Kab. Sragen TB 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni) Pada Pemerintah kab. Sragen di Sragen	8	1	4	3	3	75,20	2	16,60	-	-	-	-	-	1	58,60	-	-	-	-	-	-	
10	Operasional PD BPR Bank Pasar Rembang Tmn 2011 dan 2012	7	1	2	4	2	2,10	-	-	-	-	1	2,10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Operasional PD BPR Bank Salatiga Tmn 2011 dan 2012	12	2	6	4	6	56,48	-	-	-	-	2	4,78	1	1	45,83	2	5,87	-	-	-	1,50	
8	Prov. Bali																						
12	Operasional Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) pada PT BPD Bali	4	-	3	1	8	651,37	1	4,05	-	-	1	621,52	4	1	25,80	1	-	4,05	-	-	-	
13	Operasional PD BPR Bank Buleleng 45 TB 2011 dan 2012 (Semester I) di Singaraja	8	-	5	3	9	405,78	3	210,87	-	-	1	59,17	4	1	135,74	-	-	-	-	-	-	
9	Prov. Nusa Tenggara Barat																						
14	Operasional PD BPR NTB Bima Tahun Buku 2010, 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni)	12	2	8	2	5	17,32	-	-	-	-	2	17,32	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
15	Operasional PD BPR NTB Lombok Tengah Tahun Buku 2010, 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni 2012)	15	-	5	10	8	401,71	1	367,37	1	34,34	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PDAM	56	7	28	21	71	13.353,93	21	1.973,59	6	3.637,16	8	352,37	22	7	7.204,97	7	185,84	764,38	33,50	266,83		
1	Prov. Sumatera Barat																						
1	PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung	12	3	5	4	10	1.149,53	-	-	1	82,39	1	5,17	4	2	1.061,97	2	-	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 30

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakaipatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																Nilai penyimpangan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakaipatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara/ Daerah			Potensi Kerugian Negara/ Daerah			Kekurangan Penerimaan			Ketidakefektifan			Kerugian Negara		Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan		
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
2	Prov. Kep. Riau																									
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri TB 2011 dan 2012 (s.d Smt I) di Tanjungpinang	13	1	6	6	3	86,75	1	65,76	-	2	20,99														
3	Prov. Bali																									
3	Operasional PDAM Tirta Mangudana Kabupaten Badung tahun 2011 dan 2012	4	-	2	2	14	624,71	5	279,01	1	35,75	2	266,83	4	1	43,12	1		279,01							
4	Operasional PDAM Kab. Tabanan Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Juni 2012)	12	2	5	5	12	3.090,88	1	49,22	-	1	37,03		6	3	3.004,63	1									
4	Prov. Sulawesi Selatan																									
5	Operasional PDAM Kota Palopo Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d 30 September 2012)	8	-	5	3	14	2.416,63	9	925,62	1	1.305,17	-	-	2	-	-	2	185,84	485,37							
5	Prov. Sulawesi Tenggara																									
6	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Buton Tahun 2011 dan 2012 (Semester I)	7	1	5	1	18	5.985,43	5	653,98	3	2.213,85	2	22,35	6	1	3.095,25	1									
	RSUD	10	2	6	2	14	31.346,43	1	254,10	1	140,83	6	8.578,91	4	1	166,34	1	22.206,25								
1	Prov. Jawa Timur																									
1	Operasional RSUD RA Basoeni Mojokerto TA 2011 dan 2012 (Tw. III) di Mojokerto	3	1	2	-	2	49,91	-	-	-	-	1	49,91	1	-	-	-									

Halaman 4 - Lampiran 30

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyotoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara/ Daerah			Potensi Kerugian Negara/ Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi	Ketidakhormatan			Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Halaman 5 - Lampiran 30

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaka patuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan																Nilai penyehatan aset atau penyeleksi kasus negara/darah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaka patuhan Terhadap ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Ketidaklaksanaan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan penerimaan							
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			16	3	9	4	17	6.985,13	1	73,08	3	-	9	6.912,05	4	-	-	-	-	-	-	150,00			
6	Prov. Jawa Tengah																								
9	Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Thn 2011 dan 2012	7	-	4	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-			
7	Prov. Jawa Timur																								
10	Kegiatan Operasional PT Jatim Investment Management dan Anak Perusahaan TB 2011 dan 2012	1	-	-	-	1	4	523,31	-	1	523,31	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-			
11	Kegiatan Operasional PD Rumah Potong Hewan Kota Surabaya Tahun 2011 dan 2012	7	1	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
12	Kegiatan Operasional PT Jatim Marga Utama Tahun 2011 dan 2012	2	-	-	-	2	5	1.759,54	1	1.042,74	1	650,00	1	66,80	2	-	-	-	-	-	-	-			
8	Prov. Kalimantan Tengah																								
13	Kegiatan Operasional PD Benama Tingang Makmur TB 2011 dan Smt. I 2012 di Palangkaraya	13	3	6	4	8	734,57	2	72,72	3	562,32	2	99,53	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
			303	44	128	131	319	1.109.620,06 USD 9.530,27	67	173.535,94	52	372.176,61 USD 9.530,27	63	165.437,04	93	22	27.444,24	22	371.026,23	768,43	46.831,85	949,47			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			303	44	128	131	319	1.201.777,77	67	173.535,94	52	464.334,32	63	165.437,04	93	22	27.444,24	22	371.026,23	766,43	46.831,85	949,47			

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 31

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

No	Kelompok	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	17	25	42
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	12	22	34
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	3	5
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3	-	3
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	35	34	69
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	-	3
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	5	7	12
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	7	12	19
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	-	1
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	10	28
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	5	6
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	23	17	40
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	17	15	32
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	1	6
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	-	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	1	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		75	76	151

Halaman 1 - Lampiran 32

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Negara/Daerah	55	64.496,32	40	5.253,65	95	69.749,97
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1	284,85	-	-	1	284,85
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	2	628,95	2	628,95
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	153,29	-	-	1	153,29
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	12	5.796,10	8	949,01	20	6.745,11
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	10	3.921,36	5	826,69	15	4.748,05
6	Pemahalan harga (mark up)	13	35.547,28	4	399,52	17	35.946,80
7	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	31,71	3	106,27	4	137,98
8	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2	314,44	4	181,94	6	496,38
9	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6	16.366,13	1	19,77	7	16.385,90
10	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	7	723,16	10	2.115,43	17	2.838,59
11	Lain-lain	2	1.358,00	3	26,07	5	1.384,07
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah	12	35.338,01	9	42.901,64	21	78.239,65
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2	27.715,59	-	-	2	27.715,59
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	-	1	103,50	2	103,50
3	Aset dikuasai pihak lain	-	-	2	1.241,81	2	1.241,81
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	3	865,02	1	43,27	4	908,29
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	921,68	4	41.493,06	5	42.414,74
6	Lain-lain	5	5.835,72	1	20,00	6	5.855,72
III	Kekurangan Penerimaan	39	19.489,22	27	790.595,23	66	810.084,45
					USD 1.440,21		USD 1.440,21
	Jumlah Rupiah	39	19.489,22	27	804.522,06	66	824.011,28
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	12	4.057,38	4	1.071,80	16	5.129,18
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	23	12.291,67	19	776.268,37	42	788.560,04
					USD 1.440,21		USD 1.440,21
	Jumlah Rupiah				790.195,20		802.486,87
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	3	1.554,19	3	13.254,44	6	14.808,63
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	1.585,98	1	0,62	2	1.586,60
IV	Administrasi	37	-	60	-	97	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	-	2	-	2	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5	-	12	-	17	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	9	-	11	-	20	-
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-	-	6	-	6	-
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	4	-	-	-	4	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah	8	-	14	-	22	-
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	8	-	3	-	11	-
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2	-	5	-	7	-
9	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1	-	-	-	1	-
10	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-	-	7	-	7	-
V	Ketidakhematan	5	489,28	13	4.280,35	18	4.769,63
1	Pemborosan keuangan negara/daerah atau kemahalan harga	5	489,28	13	4.280,35	18	4.769,63
VI	Ketidakefektifan	25	40.686,28	10	2.887,79	35	43.574,07
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2	-	-	-	2	-

Halaman 2 - Lampiran 32

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	4	5.320,47	1	-	5	5.320,47
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	10	35.365,81	4	2.795,60	14	38.161,41
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	-	1	-	4	-
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5	-	1	-	6	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	3	92,19	4	92,19
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		173	160.499,11	159	845.918,66	332	1.006.417,77
					USD 1,440.21		USD 1,440.21
Jumlah Rupiah		173	160.499,11	159	859.845,49	332	1.020.344,60

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 33

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan			
						Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
	Badan Layanan Umum																			
	BLU Rumah Sakit																			
	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum TA 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I Raden Said Sukanto di Jakarta	7	2	3	2	13	8.512,16	3	5.983,62	-	-	5	810,68	4	-	-	1	1.717,86	-	-
	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kediri di Kediri	5	3	1	1	7	1.678,77	2	268,51	-	-	1	1.410,26	1	-	-	3	-	-	-
	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Mappaoudang di Makassar	4	2	2	-	10	1.107,72	4	632,57	-	-	5	475,15	1	-	-	-	-	-	238,57
	Operasional RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto TA 2011 dan 2012 (Tw. III) di Mojokerto	4	2	2	-	4	343,71	1	181,86	1	13	1	148,68	1	-	-	-	-	-	-
	Operasional RSUD dr. Hardjono S Kab. Ponorogo TA 2011 dan 2012 (Tw. III)	8	2	4	2	2	48,27	1	48,27	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan					
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22			
6	Operasional RSUD Ulin Banjarmasin pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2011 dan Semester I TA 2012 di Banjarmasin	4	-	2	2	8	1.921,87	4	912,78	1	921,68	1	87,41	2	-	-	-	-	32,00	-			
7	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bitung TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kota Bitung di Bitung	7	2	4	1	13	2.924,61	2	90,00	-	-	2	96,33	5	-	-	4	2.738,28	-	-			
8	Pendapatan dan Belanja RSUD Mimika TA 2011 dan 2012 (Semester I)	2	-	2	-	6	2.167,36	2	160,85	-	-	3	1.276,41	-	-	-	1	730,10	-	-			
9	Pendapatan dan Belanja RSUD Panai TA 2011 dan 2012 (Semester I)	3	-	1	2	5	209,40	-	-	-	-	-	-	2	1	209,40	2	-	-	-			
																				-			
	BLU Pendidikan																			-			
10	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (S.d Semester I) dan Pengelolaan Aset Tetap pada Universitas Indonesia di Depok	4	1	3	-	38	113.323,00	16	43.180,39	6	33.672	6	8.182,07	8	-	-	2	28.288,13	-	891,50			
11	Pemeriksaan Lanjutan pada Universitas Indonesia di Depok	1	-	1	-	5	9.823,28	2	6.450,62	-	-	1	1.034,61	1	-	-	1	2.338,05	-	-			

Halaman 3 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktapatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Nilai			
						Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		Jml kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	Nilai	
12	Belanja Modal Universitas Sebelas Maret TA 2011 dan 2012 (%d Semester I) di Surakarta	1	-	-	1	4	2.942,99	-	-	-	-	-	-	1	1	68,22	2	2.874,77	-	-	
13	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (%d Semester I) dan Pengelolaan Aset Tetap pada Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta	11	3	6	2	30	12.714,94	12	6.279,48	2	553,94	11	5.781,52	4	1	100,00	-	-	172,98	103,63	
14	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada UIN Sunan Gunung Djati	1	-	-	1	10	399,15	2	106,41	2	176,81	1	73,02	3	1	42,91	1	-	-	-	
	BLU Lainnya																				
15	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur	5	-	1	4	9	1.993,46	-	-	-	-	1	64,12	1	1	68,75	6	1.860,59	-	-	
16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada BLU Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) dan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) TA 2011 dan Semester I 2012	1	-	1	-	6	355,43	2	167,97	-	-	1	48,96	1	-	-	2	138,50	142,51	38,87	

Halaman 4 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus			Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
17	Pengelolaan anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro (BBIA) Dan Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor Tahun Anggaran 2011 dan Semester I Tahun Anggaran 2012	7	-	2	5	3	32,99	2	32,99	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah Badan Layanan Umum	75	17	35	23	173	160.499,11	55	64.496,32	12	35.338,01	39	19.489,22	37	5	489,28	25	40.686,28	347,49	1.272,57
	Badan Lainnya																			
	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)																			
18	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Jakarta, Banjarmasin, Padang dan Bukit Tinggi	9	4	4	1	19	13.885,17	5	225,48	-	-	5	13.433,87	7	1	17,30	1	208,52	1,29	4,08
19	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Jakarta, Pekanbaru dan Samarinda	5	1	3	1	23	1.508,94	5	133,48	1	43,27	4	1.289,00	10	3	43,19	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
20	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012, pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Palembang, Stasiun Manado, Puslitbangdiklat dan SPI di Jakarta, Palembang dan Manado	2	-	1	1	2	185,93	1	185,93	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012, pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Jakarta, Surabaya, Cirebon dan Purwokerto	7	1	6	-	12	2.643,38	3	499,19	1	1.241,81	3	45,77	4	-	-	1	856,61	13,14	0,82
21	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012, pada LPP RRI Stasiun Denpasar, Malang, Madiun dan Jakarta, serta Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum dan Program dan Produksi di Jakarta, Denpasar, Malang dan Madiun	16	8	7	1	24	1.519,90	10	824,73	-	-	3	695,17	11	-	-	-	-	-	-
22																				

Halaman 6 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)																			
23	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Tiga Saterk Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Bali dan Jawa Tengah	5	1	2	2	14	1.441,63	3	761,67	2	329,29	2	350,67	7	-	-	-	-	-	43,34
24	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Pontianak, dan Makassar	7	3	2	2	22	6.808,95	5	563,54	2	442,66	4	1.311,30	5	4	3.590,83	2	900,62	-	-
25	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Manado dan Medan	9	4	4	1	24	2.699,11	5	1.055,20	2	234,15	1	13,60	10	4	474,12	2	922,04	-	6,75
26	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Padang dan Samarinda	11	3	3	5	10	42.710,74	3	1.004,43	1	40.610,46	1	940,94	4	1	154,91	-	-	-	-

Halaman 7 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidkpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidahaematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan		
						Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
	Otorita Asahan																				
	Pelaksanaan Kewajiban Penyetoran dan Penyaluran Annual Fee (Iuran Tetap dan Iuran Tambahan), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Environmental Fund, Development Fund, dan Biaya Operasional Tahun Anggaran 2010 s.d Triwulan I 2012. Serta Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Tahun 2003 pada Otoritas Asahan, PT Inalum, Kementerian Keuangan, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Sumatera Utara	5	-	2	3	9	772.514,91	-	-	-	-	4	772.514,91	1	-	-	4	-	-	-	
							USD 1.440,21						USD 1.440,21								
	Sub Jumlah Badan Lainnya	76	25	34	17	159	845.918,66	40	5.253,65	9	42.901,64	27	790.595,23	60	13	4.280,35	10	2.887,79	14,43	54,99	
							USD 1,440.21						USD 1,440.21								
	Jumlah Rupiah	76	25	34	17	159	859.845,49	40	5.253,65	9	42.901,64	27	804.522,06	60	13	4.280,35	10	2.887,79	14,43	54,99	
	Jumlah	151	42	69	40	332	1.006.417,77	95	69.749,97	21	78.239,65	66	810.084,45	97	18	4.769,63	35	43.574,07	361,92	1.327,56	
							USD 1,440.21						USD 1,440.21								
	Jumlah Rupiah	151	42	69	40	332	1.020.344,60	95	69.749,97	21	78.239,65	66	824.011,28	97	18	4.769,63	35	43.574,07	361,92	1.327,56	

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 34

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya**

No	Kelompok	Pusat	BUMN	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	4	1	3	9
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	-	3	-	2	5
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-	-	1	2
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	-	1	-	1
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	-	1	-	-	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	9	13	-	1	23
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	3	-	1	7
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	4	-	-	5
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	1	-	-	4
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	5	-	-	6
5	Lain-lain	1	-	-	-	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	19	15	-	2	36
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7	6	-	-	13
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	12	9	-	2	23
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		29	32	1	6	68

Halaman 1 - Lampiran 35

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

No	Kelompok	Pusat		BUMN		Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	8	1.599,70	2	5.532,69	17	490,89	5	161,04	32	7.784,32
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	-	-	-	-	1	1,67	-	-	1	1,67
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	268,73	1	3.270,94	-	-	3	50,88	5	3.590,55
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	992,47	1	2.261,75	3	65,79	-	-	6	3.320,01
4	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	-	-	-	-	-	-	1	109,02	1	109,02
5	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	-	-	5	140,59	-	-	5	140,59
6	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	326,95	-	-	2	25,55	-	-	3	352,50
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	11,55	-	-	5	219,22	1	1,14	8	231,91
8	Lain-lain	2	-	-	-	1	38,07	-	-	3	38,07
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	5	8.604,77	2	1.360,36	-	-	-	-	7	9.965,13
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	633,47	1	1.188,22	-	-	-	-	2	1.821,69
2	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	-	-	1	172,14	-	-	-	-	1	172
4	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lain-lain	3	7.971,30	-	-	-	-	-	-	3	7.971
III	Kekurangan Penerimaan	7	6.097,54	4	454,74	5	831,83	-	-	16	7.384,11
			USD 274,17								USD 274,17
	Jumlah rupiah		8.748,76		-				-		10.035,33
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	928,53	3	239,84	-	-	-	-	4	1.168,37
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	3	2.644,98	1	214,90	5	831,83	-	-	9	3.691,71
		-	USD 274,17								USD 274,17
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	1	61,64	-	-	-	-	-	-	1	61,64
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	100,18	-	-	-	-	-	-	1	100,18
5	Lain-lain	1	2.362	-	-	-	-	-	-	1	2.362
IV	Administrasi	27	-	10	-	13	-	10	-	60	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	1	-	7	-	5	-	13	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/ Daerah/Perusahaan	1	-	2	-	1	-	1	-	5	-
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	24	-	1	-	-	-	2	-	27	-
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
9	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
11	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
12	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Halaman 2 - Lampiran 35

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

No	Kelompok	Pusat		BUMN		Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
V	Ketidakhematan	1	4.465,90	-	-	2	769,75	1	3,91	4	5.239,56
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	1	4.465,90	-	-	2	769,75	1	3,91	4	5.239,56
VI	Ketidakefektifan	8	376.131,78	10	-	-	-	4	23.073,52	22	399.205,30
			USD 9.973,75								USD 9.973,75
	Jumlah rupiah		472.577,94								495.651,46
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-	-	3	-	-	-	1	115,61	4	115,61
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3	328.989,17	-	-	-	-	1	287,64	4	329.016,81
		-	USD 9.973,75			-	-	-	-	-	USD 9.973,75
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	-	-	2	22.930,27	1	-
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	47.142,61	6	-	-	-	-	-	11	70.072,88
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	56	396.899,69	28	7.347,79	37	2.092,47	20	23.238,47	141	429.578,42
			USD 10,247.92								USD 10,247.92
	Jumlah rupiah		495.997,07								528.675,80

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Pusat																				
	Program Swasembada Daging Sapi (Pengendalian Importasi Daging Sapi) Tahun 2010-2012 pada Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian keuangan di Jakarta	4	-	-	4	6	2.462,39	-	-	-	-	2	2.462,39	4	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Pertambangan Mineral TA 2009's d 2011 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Perusahaan Kontrak Karya (PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara) dan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (PT Aneka Tambang UPBE Pongkor) serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bogor, Gresik, Sumbawa dan Timika	1	-	1	-	6	2.367,30	-	-	-	-	2	2.367,30	4	-	-	-	-	-	-	
						-	USD 274,17					-	USD 274,17								
3	Proses Penetapan Status dan Penerbitan Sertifikat "Clear and Clean" Pemegang IUP Mineral dan Batubara Tahun 2011 dan 2012 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan Pembangkit dan Jaringan dan Program Listrik Perdesaan Tahun Anggaran (TA) 2010 s.d. TA 2011 Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN Unit Induk Pembangunan dan Jaringan (UIP KITRING) Sumatera, Aceh, Riau, UIP KITRING Kalimantan, UIP Kiring Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan UIP Kiring Sulawesi, Maluku, Papua Serta Listrik Perdesaan Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara	-	-	-	-	9	383.252,63	2	1.219,26	1	633,47	1	928,53	1	1	4.465,90	3	376.005,47	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 36

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan			
		Total SPI	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
5	Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi pada Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta (Pusat), Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur	2	-	-	2	16	3.453,58	3	326,95	2	2.787,31	2	339,32	9	-	-	-	-	-	-								
6	Pengelolaan Benda Berharga asal muatan kapal yang tenggelam pada Kementerian Kehutanan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya di Jakarta.	8	-	3	5	6	126,31	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	126,31	-	-								
						-	USD 9.973,75											USD 9.973,75										
7	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dan Migas pada Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-								
8	Penanganan Bank Gagal Lembaga Penjamin Simpanan	11	1	5	5	9	5.237,48	3	53,49	2	5.183,99	-	-	4	-	-	-	-	11,55	-								
	Sub Jumlah Pusat	29	1	9	19	56	396.899,69	8	1.599,70	5	8.604,77	7	6.097,54	27	1	4.465,90	8	376.131,78	11,55	-								
	Jumlah rupiah					-	USD 10.247,92						8.748,76					USD 9.973,75										
2	BUMN																	472.577,94										
9	Kelayakan Pemungutan Dan Pengelolaan Uang Jaminan Langanan (UJL) Pada PT. PLN Persero	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10	PKBL PT Antam (Persero) Tbk TA 2011 dan Semester I 2012	3	1	-	2	13	1,54	-	-	-	-	1	1,54	7	-	-	5	-	-	-								
11	Pelaksanaan PKBL PT. Timah TA 2011 dan Semester I 2012	6	-	2	4	4	172,14	-	-	1	172,14	-	-	-	-	-	3	-	-	-								
12	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) TA 2011 dan Semester 1 2012	9	1	5	3	5	174,05	-	-	-	-	1	174,05	2	-	-	2	-	-	-								
13	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero)	8	-	3	5	4	2.540,90	1	2.261,75	-	-	2	279,15	1	-	-	-	-	-	-								

Halaman 3 - Lampiran 36

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
14	Pemeriksaan Terinci Atas Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Singkong Kering (Cassava) pada PT Sarinah (Persero) TA 2011 dan 2012 semester I	1	-	1	-	2	4.459,16	1	3.270,94	1	1.188,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah BUMN	32	4	13	15	28	7.347,79	2	5.532,69	2	1.360,36	4	454,74	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Daerah																								
	Provinsi																								
15	Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2011 dan 2012	1	1	-	-	4	74,11	2	60,62	-	-	1	13,49	1	-	-	-	-	-	38,16	-	-	-	13,49	
	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilu/lembda Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilu/lembda Provinsi Banten di Serang	-	-	-	-	26	1.920,92	12	348,82	-	-	3	802,35	9	2	769,75	-	-	-	-	-	-	-	0,94	
	Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 pada KPUD Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya	-	-	-	-	7	97,44	3	81,45	-	-	1	15,99	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah Provinsi	1	1	-	-	37	2.092,47	17	490,89	-	-	5	831,83	13	2	769,75	-	-	-	38,16	-	-	-	14,43	
	Kabupaten/Kota																								
18	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS pada Pemda Kab. Bungo dan Instansi Terkait Lainnya	2	-	-	2	5	120,00	1	4,39	-	-	-	-	2	-	-	2	115,61	-	-	-	-	-	-	
19	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS TA 2011 dan Semester I TA 2012 kab. Muaro Jambi	2	1	1	-	8	23.111,59	2	149,77	-	-	-	-	3	1	3,91	2	22.957,91	-	23,47	-	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 36

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan										
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Kerugian Negara				Potensi Kerugian Negara				Kekurangan Penerimaan				Administrasi	Ketidakhormatan				Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
20	Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilukada KPUD Pemerintah Kabupaten Buton	2	2	-	-	7	6,88	2	6,88	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-										
	Sub Jumlah Kabupaten/Kota	6	3	1	2	20	23.238,47	5	161,04	-	-	-	-	10	1	3,91	4	23.073,52	23,47	-										
	Jumlah Daerah	7	4	1	2	57	25.330,94	22	651,93	-	-	5	831,83	23	3	773,66	4	23.073,52	61,63	14,43										
	Jumlah (Pusat+BUMN+Daerah)	68	9	23	36	141	429.578,42	32	7.784,32	7	9.965,13	16	7.384,11	60	4	5.239,56	22	399.205,30	73,18	14,43										
	Jumlah rupiah (Pusat+BUMN+Daerah)						USD 10.247,92						USD 274,17					USD 9,973,75												
							528.675,80						10.035,33					495.651,46												

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2012

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu				
I	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja			
	A	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan, dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai		
1	1	Kementerian Keuangan	1	Penerimaan Kepabeanan dan Cukai serta Penerimaan Negara Lainnya pada Kantor Pusat DJBC, KPUBC Tanjung Priok, KPPBC Tangerang, KPPBC Ngurah Rai dan KPPBC Palembang di Jakarta, Tangerang, Denpasar dan Palembang
	2		1	Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan BUMN Sektor Perkebunan TA 2010 dan 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga
	3	PT Perkebunan Nusantara III	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
	4	PT Perkebunan Nusantara IV	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
	5	PT Perkebunan Nusantara VI	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)
	6	PT Perkebunan Nusantara VII	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
	7	PT Perkebunan Nusantara VIII	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)
	8	PT Perkebunan Nusantara X	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
	9	PT Perkebunan Nusantara XII	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
	10	Kementerian Perdagangan	1	Kebijakan Anti Dumping TA 2012 pada Kantor Pusat Kementerian Perdagangan, Komite Anti Dumping (KADI), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Serta Instansi Vertikal Dibawahnya di Jakarta, Medan, Cilegon, Semarang, Surabaya
2	11	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pajak di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2011
	12		1	Pajak di Bendahara Pengeluaran Kabupaten Kolaka Utara
	13		1	Pajak di Bendahara Pengeluaran Kota Bau-Bau
			13	
B	Belanja dan Pendapatan			
1	14	Dewan Perwakilan Rakyat	1	Belanja TA 2011 dan 2012 (s.d. Oktober) pada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta
2	15	Kejaksaan Republik Indonesia	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan
	16		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Instansi Terkait di Semarang
	17		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
	18		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten di Serang
3	19	Kementerian Luar Negeri	1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok di Thailand
	20		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Konsulat Jenderal n Republik Indonesia Guangzhou di Republik Rakyat Tiongkok
	21		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hongkong di Republik Rakyat Tiongkok
	22		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Denmark
	23		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Stockholm di Swedia

Halaman 2 - Lampiran 37

No			Entitas	Jml	Daftar LHP
					Objek Pemeriksaan
	4	24		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia di Oslo
		25		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 Serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Baghdad di Irak
	5	26		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 Serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Doha di Qatar
		27		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Amman di Yordania
		28		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Houston di Amerika Serikat
		29		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles di Amerika Serikat
		30		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia di London
		31		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Cape Town di Afrika Selatan
		32		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Afrika Selatan
		33	Mabes TNI	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2010, 2011 dan 2012 pada Denma Mabes TNI
		34	TNI AD	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pengembangan Fasilitas dan Pemeliharaan Bangunan Tahun 2011 dan 2012 pada UO TNI AD
		35		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2011 dan 2012 pada Kodiklat TNI AD di Bandung
		36		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2011 dan 2012 pada Kodam IV/ Diponegoro di Semarang
		37		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2011 dan 2012 pada Kodam IX/Udayana di Bali
		38	TNI AL	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pada Kobangdiklat dan AAL Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Surabaya
		39		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2011 dan 2012 (s.d Triwulan III) pada Lantamal I Belawan Beserta Jajarannya di Belawan
		40		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2011 dan 2012 pada Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) serta Jajaran Terkait di Jakarta dan Surabaya
		41		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2011 dan 2012 pada Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut di Jakarta dan Surabaya
		42	TNI AU	1	Pelaksanaan anggaran dan kegiatan Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara TA 2011 dan 2012 di Jakarta
		43		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Dinas fasilitas dan konstruksi TNI Angkatan Udara (DISFASKONAU) serta jajaran terkait TA 2011 dan 2012 di Jakarta
		44		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Dinas Aeronautika TA 2011 dan 2012 di Jakarta
		45	Kementerian Hukum dan HAM	1	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh di Banda Aceh
		46		1	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru
		47		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Jambi
		48		1	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu di Bengkulu
		49		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Satker Terkait di Jakarta
		50		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta

Halaman 3 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
51		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan 2010 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta	
52		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta	
53		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta di Yogyakarta	
54		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten di Serang	
55		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan di Banjarmasin	
56		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012 (Semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah di Palu	
57		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012 (Semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara di Kendari	
58		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012 (Semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo di Gorontalo	
59		1	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku di Ambon	
60		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 s.d. 2012 (semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di Ternate	
61	Kementerian Keuangan	1	Pemeriksaan Belanja Modal Kementerian Keuangan TA 2012	
62	Kementerian Perhubungan	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2011 dan 2012 di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat	
63		1	Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2009, 2010 dan 2011 pada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta	
64		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Satker-satker Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Sulawesi Tengah	
65		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Satker-satker Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Sulawesi Tengah	
66	Kementerian Kesehatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana APBN TA 2011 pada Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam di Batam	
67		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan TA 2010 dan 2011 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	
68	Kementerian Agama	1	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama di Jakarta	
69	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Pendapatan dan Belanja) Tahun 2011 sampai dengan Triwulan III Tahun 2012 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta	
70		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Pendapatan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Triwulan III Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Bekasi dan Medan	
71	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengadaan Barang dan Jasa Kapal Perikanan Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat serta Instansi Terkait Lainnya	
72	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta	

Halaman 4 - Lampiran 37

No			Entitas	Jml	Daftar LHP
					Objek Pemeriksaan
		73	Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Legalisasi Aset Pertanahan Khususnya Proyek Operasi Nasional (Prona) Tahun 2010 dan 2011 pada Kantor BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Semarang, dan Surabaya
		74	Kepolisian Republik Indonesia	1	Pengelolaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009 Sampai Dengan 2011 pada Kepolisian Daerah Jambi di Jambi
		75	Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK)	1	Belanja Pada Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 September) di Jakarta
		76	Kementerian Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat
		77	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga
		78	Provinsi Aceh	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya TA 2012 di Calang
		79		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2012 di Kutacane
		80		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2012 di Sigli
		81		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2012 di Sinabung
		82		1	Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa TA 2012 di Langsa
		83	Provinsi Sumatera Utara	1	Belanja Modal TA 2012 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
		84		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Nias di Gunung Sitoli
		85		1	Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas di Sibuhan
		86		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya
		87		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
		88		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kota Sibolga
		89		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi
		90	Provinsi Sumatera Barat	1	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2012 di Padang
		91		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam TA 2012 di Lubuk Basung
		92		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 di Painan
		93		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan TA 2012 di Padang Aro
		94		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2012 di Bukittinggi
		95		1	Belanja Daerah Kota Padang TA 2012 di Padang
		96		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2012 di Sawahlunto
		97		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Solok TA 2012 di Solok
		98	Provinsi Riau	1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
		99		1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang
		100		1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
		101		1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Siak
		102	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
		103		1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
		104		1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
		105		1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
		106		1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Kota Jambi di Jambi
		107		1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
		108	Provinsi Sumatera Selatan	1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Instansi Terkait di Pangkalan Balai

Halaman 5 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
109		1	Belanja DPRD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang TA 2011 dan 2012 di Tebing Tinggi	
110		1	Belanja Anggaran 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Instansi Terkait di Martapura	
111		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Instansi Terkait di Lahat	
112		1	Belanja Anggaran 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Instansi Terkait di Muara Enim	
113		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Instansi Terkait di Muara Beliti	
114		1	Pendapatan Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang	
115		1	Belanja Anggaran 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Prabumulih Timur dan Instansi Terkait di Prabumulih	
116	Provinsi Bengkulu	1	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasilnya TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	
117		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna	
118		1	Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga TA 2011 dan 2012 Semester I pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi	
119		1	Belanja Modal TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait Lainnya di Tais	
120		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu TA 2012 di Bengkulu	
121		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Tersangka pada Pemerintah Kota Bengkulu TA 2011 dan Semester I 2012	
122	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2012 di Pangkalpinang	
123		1	Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2012 di Sungailiat	
124		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah TA 2012 di Koba	
125		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TA 2012 di Manggar	
126	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang	
127		1	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang Terkait dengan Konstruksi TA 2011 dan 2012 Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang	
128		1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bintan Buyu	
129		1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2011 dan 2012 di Tanjung Balai	
130		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau di Tarempa	
131		1	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal Barang dan Jasa Terkait Jasa Konstruksi Pada Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di Ranai	
132		1	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang Terkait Konstruksi TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Batam di Batam	
133		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau di Batam	
134	Provinsi DKI Jakarta	1	Belanja Daerah TA 2011 dan Semester I 2012 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
135		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
136		1	Belanja Daerah TA 2011 dan Semester I 2012 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
137		1	Belanja Daerah TA 2011 dan Semester I 2012 pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	

Halaman 6 - Lampiran 37

No			Entitas	Jml	Daftar LHP
					Objek Pemeriksaan
		138		1	Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta TA 2008 & 2009 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		139		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		140		1	Belanja dan Pendapatan TA 2011 dan 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		141		1	Belanja TA 2011 dan 2012 pada Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		142		1	Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta TA 2011 dan 2012 di Jakarta
		143		1	Belanja TA 2011 dan 2012 (Triwulan III) pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		144		1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Operasional TA 2011 dan 2012 s.d. Semester I pada Unit Pengelola Transjakarta Busway Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		145	Provinsi Jawa Barat	1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2012 (sampai dengan 31 Agustus 2012) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
		146		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
		147		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang
		148		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang
		149		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong
		150		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis di Ciamis
		151		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur di Cianjur
		152		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
		153		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
		154		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Kabupaten Indramayu di Indramayu
		155		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang
		156		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka di Majalengka
		157		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kota Bogor di Bogor
		158		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kota Cirebon di Cirebon
		159		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kota Cimahi di Cimahi
		160		1	Pendapatan Daerah Semester I 2012 pada Pemerintah Kota Sukabumi di Sukabumi
		161		1	Pendapatan Daerah Semester I 2012 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya
		162	Provinsi Jawa Tengah	1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Brebes di Brebes
		163		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Cilacap di Cilacap
		164		1	Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kabupaten Grobogan di Purwodadi
		165		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Kendal di Kendal
		166		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Klaten di Klaten
		167		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pati di Pati
		168		1	Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Purbalingga
		169		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tegal di Slawi
		170		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri di Wonogiri
		171		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Pekalongan di Pekalongan
		172	Provinsi DI Yogyakarta	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika TA 2012 pada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta di Yogyakarta
		173		1	Belanja Infrastruktur di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul

Halaman 7 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
174		1	Belanja Barang dan Jasa TA 2012 (s.d. 30 Juni) pada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta di Yogyakarta	
175		1	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2011 dan 2012 (s.d Juni) di Wonosari	
176		1	Belanja Daerah Non Infrastruktur TA 2012 (s.d. 31 Oktober) Kabupaten Kulon Progo di Wates	
177		1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman TA 2012 (s.d. 31 Oktober) di Sleman	
178		1	Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta TA 2012 (s.d. 30 September) dan Kantor Kesatuan Bangsa (TA 2011 dan 2012) di Yogyakarta	
179	Provinsi Jawa Timur	1	Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi	
180		1	Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA 2011 dan 2012 s.d. Triwulan III	
181		1	Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2012 pada Kabupaten Jember di Jember	
182		1	Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur dan Belanja Bantuan Sosial TA 2012 pada Kabupaten Probolinggo di Probolinggo	
183		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2012 di Tuban	
184		1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kota Blitar di Blitar	
185		1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kota Malang di Malang	
186	Provinsi Banten	1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Banten	
187		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	
188		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa	
189	Provinsi Bali	1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) TA 2012 (s.d. 31 Agustus 2012) Pada Pemerintah Provinsi Bali Di Denpasar	
190		1	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2010, 2011, dan 2012 (s.d. Semester I) Pemerintah Provinsi Bali	
191		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bangli	
192		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 (S.D. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	
193		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana	
194		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem	
195		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung	
196		1	Pengadaan Barang Dan Jasa TA 2010, 2011, dan 2012 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Tabanan	
197		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kota Denpasar	
198	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pelaksanaan APBD Khusus Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Instansi Kerja Lainnya TA 2012 (Semester I)	
199		1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu TA 2012 di Dompu	
200		1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara TA 2012 di Tanjung	
201		1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bima TA 2012 di Raba	
202		1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Mataram TA 2012 di Mataram	
203		1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur TA 2012 di Selong	
204	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang	
205		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 September 2011) Pemerintah Kabupaten Belu di Atambua	
206		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 Pemerintah Kabupaten Ende di Ende	
207		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Lembata di Lewoleba	
208		1	Belanja daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai di Ruteng	
209		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2012 pada pemerintah Kabupaten Sikka di Maumere	

Halaman 8 - Lampiran 37

No			Entitas	Jml	Daftar LHP
					Objek Pemeriksaan
		210		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul
		211		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
		212	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2012 (s.d. Juli 2012) Dengan Menggunakan E-Audit pada Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
		213		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober 2012) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
		214		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. Oktober 2012) pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
		215		1	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. Bulan Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ketapang
		216		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober 2012) pada Pemerintah Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh
		217		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober 2012) pada Pemerintah Kabupaten Sambas di Sambas
		218		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober 2012) pada Pemerintah Kabupaten Sekadau di Sekadau
		219		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober 2012) pada Pemerintah Kabupaten Singkawang di Singkawang
		220		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. Agustus 2012) pada Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang
		221	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas TA 2012 di Kuala Kurun
		222		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas TA 2012 di Kuala Kapuas
		223		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2012 di Pangkalan Bun
		224		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2012 di Sampit
		225		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau TA 2012 di Pulang Pisau
		226		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Palangka Raya TA 2012 di Palangka Raya
		227		1	Belanja Modal TA 2010, 2011 dan 2012 (s.d Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
		228	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 dan 2012
		229		1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Banjar TA 2011 dan 2012
		230		1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
		231		1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong TA 2011 dan 2012
		232		1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Tapin TA 2011 dan 2012
		233		1	Pendapatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2011 dan Semester I TA 2012 di Banjarmasin
		234	Provinsi Kalimantan Timur	1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2012 (s.d. Agustus) pada Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan Bontang
		235		1	Belanja Infrastruktur Daerah Kabupaten Berau Kalimantan Timur TA 2009, 2010, dan 2011 di Tanjung Redep
		236	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara TA 2012 (s.d. 31 Agustus) di Manado
		237		1	Belanja Infrastruktur TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak
		238		1	Belanja Daerah TA 2012 Kab Pemerintah Kab Bolaang Mongondow Timur
		239		1	Belanja Daerah TA 2012 Kab Pemerintah Kab Bolaang Mongondow Utara
		240		1	Belanja Daerah TA 2012 Kab Pemerintah Kab Minahasa Utara

Halaman 9 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
241	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 November 2012) pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi	
242		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 November 2012) pada Pemerintah Kabupaten Donggala di Banawa	
243		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 November 2012) pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku	
244		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 November 2012) pada Pemerintah Kabupaten Buol di Buol	
245	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pelaksanaan APBD Khusus Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	
246		1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	
247		1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d 30 September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Barru di Barru	
248		1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d 30 September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Bone di Watampone	
249		1	Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d 30 September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Enrekang	
250		1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d September) Pemerintah Kabupaten Wajo di Sengkang	
251	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara TA 2011 dan 2012	
252		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2011 dan 2012	
253		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe TA 2011 dan Semester I 2012	
254		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara TA 2011 dan 2012	
255		1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna	
256	Provinsi Gorontalo	1	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2012 (s.d. Agustus 2012) Dengan Menggunakan E-Audit pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo	
257		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2001 dan 2012 di Gorontalo	
258		1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2011 dan 2012 di Tilamuta	
259		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Operasi pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2011 dan 2012 di Suwawa	
260		1	Belanja Operasi Kabupaten Gorontalo TA 2001 dan 2012 di Limboto	
261		1	Belanja Operasi Kabupaten Gorontalo Utara TA 2011 dan 2012 di Kwandang	
262		1	Belanja Modal Kabupaten Gorontalo Utara TA 2011 dan 2012 di Kwandang	
263		1	Belanja Operasi Kabupaten Pohuwatu TA 2011 dan 2012 di Marisa	
264		1	Belanja Operasi Kota Gorontalo TA 2011 dan 2012 di Gorontalo	
265	Provinsi Sulawesi Barat	1	Belanja Bantuan Sosial Hibah dan Bantuan Keuangan TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa di Mamasa	
266		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju	
267		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali	
268	Provinsi Maluku	1	Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru TA 2011 dan 2012 di Dobo	
269		1	Belanja Modal Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2011 dan 2012 di Piru	
270		1	Belanja Modal Pemerintah Kota Ambon TA 2011 dan 2012 di Ambon	
271	Provinsi Maluku Utara	1	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011 dan Semester I tahun 2012 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara	
272		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo	
273		1	Belanja Barang dan Modal TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	
274		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	
275		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo	

Halaman 10 - Lampiran 37

No			Entitas	Jml	Daftar LHP
					Objek Pemeriksaan
		276		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan
		277		1	Belanja Daerah Yang Signifikan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
		278		1	Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kota Ternate
		279		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
		280		1	Belanja Daerah TA 2009 s.d 2011 untuk Kontrak Tahun Jamak (Multiyears) dan Kontrak Tahun Tunggal pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
		281	Provinsi Papua	1	Belanja Kabupaten Boven Digoel TA 2011 s.d. Semester I 2012
		282		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Wamena
		283		1	Belanja Kabupaten Keerom TA 2011 dan 2012 (s.d. Juni)
		284		1	Belanja Daerah Kabupaten Mappi TA 2011 dan 2012 (Samapai dengan Triwulan III) di Kapi
		285		1	Belanja Daerah Kabupaten Memberamo raya TA 2011-2012 (s.d. Mei)
		286		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2011 dan 2012 (s.d. Triwulan III) di Timika
		287		1	Belanja Daerah Kabupaten Nabire TA 2011 dan 2012 (Sampai Dengan Triwulan III) di Nabire
		288		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Supiori di Sorendiwari
		289		1	Belanja Pemerintah Kabupaten Waropen TA 2011 dan 2012 (s.d. September)
		290		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo TA 2011 dan 2012 di Sumohai
		291	Provinsi Papua Barat	1	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat TA 2011 dan 2012 di Manokwari
		292		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari TA 2011 dan 2012 di Manokwari
		293		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak TA 2011 dan 2012 di Fakfak
		294		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kaimana TA 2011 dan 2012 di Kaimana
		295		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maybrat TA 2011 dan 2012 di Maybrat
		296		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat TA 2011 dan 2012
		297		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong TA 2011 dan 2012 di Aimas
		298		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan TA 2011 dan 2012 di Teminabuan
		299		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrau TA 2011 dan 2012 (Triwulan III) di Sausapor
		300		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni TA 2011 dan 2012 di Bintuni
		301		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama TA 2011 dan 2012 di Rasiei
		302		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Sorong TA 2011 dan 2012 di Sorong
				289	
1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda				
	303	Kementerian Kesehatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda pada Kementerian Kesehatan, Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya TA 2010 s.d. Semester I TA 2012	
			1		
III	Manajemen Aset				
	304	Mahkamah Agung	1	Pengelolaan Aset dan Hibah Tahun Anggaran 2011 dan Semester I 2012 Pada Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA), Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklatkumdi) dan Badan Peradilan di Wilayah Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah	
	305	Kementerian Pertahanan	1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I 2011 pada Unit Organisasi Kementerian Pertahanan	
	306	Mabes TNI	1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I 2011 pada Unit Organisasi Mabes TNI	

Halaman 11 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
307	TNI AD	1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I 2011 pada Unit Organisasi TNI AD	
308	TNI AL	1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I 2011 pada Unit Organisasi TNI AL di Jakarta dan Surabaya	
309	TNI AU	1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I 2011 pada Unit Organisasi TNI AU	
310	Kementerian Keuangan	1	Pemeriksaan Manajemen Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Tahun 2012	
311	Provinsi Aceh	1	Kas Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2007 s.d. 2010	
312	Provinsi Riau	1	Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekanbaru di Pekanbaru	
313	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	
314	Provinsi Bengkulu	1	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Lebong TA 2011 dan Semester I 2012 di Tubei	
315	Provinsi Jawa Tengah	1	Manajemen Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara	
316		1	Manajemen Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Pemalang di Pemalang	
317		1	Manajemen Aset tetap Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo	
318	Provinsi DI Yogyakarta	1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2011 dan 2012 (Semester 1) di Wonosari	
319	Provinsi Jawa Timur	1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Oktober 2012	
320		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah per 30 Juni 2012 Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Malang di Malang	
321		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Agustus 2012	
322		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah per 30 Juni 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Pasuruan	
323		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo per 30 Juni 2012	
324		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pasuruan per 30 Juni 2012	
325	Provinsi Kalimantan Barat	1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	
326		1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (semester I) pada Pemerintah Kabupaten Landak	
327		1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (semester I) pada Pemerintah Kabupaten Pontianak	
328	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (s.d. Juni) pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang	
329		1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni) pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh	
330		1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni) pada Pemerintah Kabupaten Katingan di Kasongan	
331	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru TA 2008, 2009, 2010, 2011 dan Semester I TA 2012 di Banjarbaru	
332	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pengelolaan Aset (BMD) Posisi Per 30 Juni 2012 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado	
333	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	
334		1	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Banggai	
335		1	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Poso	
336	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng TA 2010, 2011 dan September 2012 (Per September 2012) di Bantaeng	
337	Provinsi Sulawesi Barat	1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju	
338	Provinsi Maluku	1	Penyertaan Modal, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon	
339	Provinsi Maluku Utara	1	Pengelolaan Kas dan Aset Tetap Untuk Periode Sampai Dengan Semester I Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda	

Halaman 12 - Lampiran 37

No			Entitas	Jml	Daftar LHP
					Objek Pemeriksaan
		340		1	Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011 dan 2012 (Semester I)
		341	Provinsi Papua	1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Biak
		342		1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
		343	PT Aneka Tambang (Persero)	1	Pengelolaan Aset pada PT Antam (Persero) TBK tahun 2011 dan Semester I 2012
		344	PT Timah (Persero)	1	Pengelolaan Aset (Asset Management) TA 2011 dan Semester I 2012 pada PT Timah (Persero) Tbk dan Instansi Terkait di Jakarta, Bandung, dan Pangkalpinang
		345	PT Pertamina (Persero)	1	Pengelolaan Aset PT Pertamina (Persero) tahun 2011 dan 2012 Semester I
				42	
IV	Kontraktor Kontrak Kerjasama				
		346		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Salawati Tahun 2011 pada KKKS JOB Pertamina Petrochina Salawati dan BP Migas Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Papua Barat
		347		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Cepu pada BP Migas dan KKKS Mobil Cepu Ltd Serta Instansi Terkait Lainnya
		348		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja Ogan Komering Ilir pada BP Migas dan KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering Serta Instansi Terkait Lainnya
		349		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja Eks Pertamina pada BP Migas dan KKKS PT Pertamina EP Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Barat
		350		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja <i>Offshore North West Java</i> (ONWJ) pada BP Migas dan KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Barat
		351		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja Coastal Plain Pekanbaru pada BPMigas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Pekanbaru
		352		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja Rimau pada BPMigas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Medco E&P Indonesia Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Sumatera Selatan
				7	
V	Operasional BUMN/BUMD				
	1	Operasional BUMN			
		353	PT Tugu Pratama Indonesia dan Tugu Insurance Company LTD	1	Pendapatan, biaya dan investasi pada PT Tugu Pratama Indonesia dan <i>Tugu Insurance Company LTD</i> Tahun 2010, 2011 Semester 1 2012
		354	PT Hutama Karya (Persero)	1	Pengelolaan pendapatan usaha dan pengendalian beban kontrak TB 2010 dan 2011 pada PT Hutama Karya (Persero)
		355	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ Bali Tourism Development Corporation (PT BTDC)	1	Pengelolaan deposito tahun 2011 dan 2012 pada PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ Bali Tourism Development Corporation (PT BTDC)
		356	PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa produksi serta investasi pengembangan galangan Lamongan pada PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) TB 2010 dan 2011 di Surabaya, Lamongan, Jambi dan Singapura.
		357	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan kegiatan pengadaan barang/jasa produksi dan investasi pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) TB 2010 dan 2011.
		358	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi dan Pengelolaan Biaya Pemeliharaan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian TA 2011 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jakarta, Bandung, Cirebon dan Surabaya
		359	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	1	Pembentukan Holding BUMN Perkebunan dan Pelaksanaan Penjualan Komoditas Perkebunan Tahun 2009, 2010 dan 2011 pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan BUMN Terkait di Jakarta, Bandung, Semarang, Lampung dan Medan
		360	Perum Perhutani	1	Kegiatan Trading Hutan Rakyat, Pengelolaan Biaya Produksi, dan Kegiatan Investasi pada Perum Perhutani TB 2011 dan 2012 (Semester I)
		361	PT Inhutani III (Persero)	1	Kegiatan Produksi dan Penjualan pada PT Inhutani III (Persero) di Jakarta, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan TB 2011 dan 2012 (semester I)
		362	PT Mega Eltra	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan dan Pengendalian Biaya TB 2010, 2011 dan 2012 (smt I) pada PT Mega Eltra di Jakarta, Medan dan Surabaya

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
363	PT Asabri	1	Penyelenggaraan Program Santunan dan Tabungan Hari Tua, Dana Pensiun Biaya Operasional dan Belanja Modal, Serta PKBL PT Asabri (Persero) Tahun 2011 dan 2012 (Semester I) di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Denpasar
364	PT Askes	1	Pelaksanaan Program Pengelolaan Barang/jasa, Biaya Operasional dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL TB 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) pada PT Asuransi Kesehatan (Persero)
365	PT Bank Rakyat Indonesia	1	Pengelolaan Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. TB 2011 dan Triwulan I 2012 di Jakarta, Medan, Surabaya dan Bandung
366	PT Bank Tabungan Negara	1	Pengelolaan Kredit TB 2011 dan Triwulan I 2012 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. di Batam, Makassar, Jakarta Harmoni dan Jakarta Kuningan
367	PT Sucofindo	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi dan Pengelolaan PKBL Tahun 2011 dan 2012 9s.d. Semester I) pada PT Sucofindo (Persero) di Jakarta, Tarakan, Samarinda dan Cibitung
		15	
2	Operasional BUMD, RSUD, PDAM, Bank Pembangunan Daerah		
368	Provinsi Sumatera Utara	1	Operasional PT Bank Sumut TB 2011 dan Semester I 2012
369	Provinsi Sumatera Barat	1	Operasional PDAM Tirta Sanjung Buana TB 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
370		1	Operasional Perusahaan Daerah Kinantan TB 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
371	Provinsi Riau	1	Operasional PT Bank Riau Kepri Tahun 2010, 2011, dan TW I 2012 di Pekanbaru
372	Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional Perusahaan Daerah TB 2011 dan 2012 pada PT Petromuba di Sekayu
373		1	Operasional Perusahaan Daerah TB 2011 dan 2012 pada PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) di Palembang
374		1	Operasional Bank TB 2011 dan 2012 pada Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan di Palembang
375		1	Operasional Perusahaan Daerah TB 2011 dan 2012 pada PD Pasar Palembang Jaya di Palembang
376	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kegiatan Operasional PD BPR Bestari Tanjungpinang Tahun Buku 2011 dan 2012 di Tanjungpinang
377		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri TB 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) di Tanjungpinang
378		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Perusahaan Daerah Karimun TB 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) di Tanjung Balai Karimun
379	Provinsi DKI Jakarta	1	Pendapatan dan Biaya pada PD PAL Jaya TB 2010 dan 2011 di Jakarta
380		1	Pendapatan dan Biaya pada PT Bank DKI Tahun Buku 2010 dan 2011 di Jakarta
381	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Kredit dan Kegiatan Investasi Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada PT BPD Jabar dan Banten, Tbk di Bandung
382		1	Pendapatan dan Biaya TB 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada PD Pasar Bermartabat Kota Bandung di Bandung
383		1	Pendapatan, Belanja, dan Investasi Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada PT Jasa Sarana di Bandung
384	Provinsi Jawa Tengah	1	Operasional PD BPR Bank Pasar Rembang Tahun 2011 dan 2012
385		1	Operasional PD BPR Bank Bapas 69 Magelang Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d. 30 juni)
386		1	Operasional PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni)
387		1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012
388		1	Operasional pada BPR Bank Salatiga Tahun Buku 2011 dan 2012
389		1	Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) tahun Buku 2011 dan 2012 di Semarang
390	Provinsi Jawa Timur	1	Kegiatan Operasional PT Jatim Investment Management (PT JIM) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2011 dan 2012
391		1	Operasional PD Rumah Potong Hewan Kota Surabaya Tahun 2011 dan 2012
392		1	Kegiatan Operasional PD PT Jatim Marga Utama Tahun 2011 dan 2012
393		1	Operasional RSUD RA Basoeni Mojokerto Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (s.d. Triwulan III) di Mojokerto

Halaman 14 - Lampiran 37

No			Entitas	Jml	Daftar LHP
					Objek Pemeriksaan
		394	Provinsi Bali	1	Operasional Tahun Buku 2011 Dan 2012 (s.d. Semester I) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali
		395		1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun 2011 Dan 2012
		396		1	Operasional PD BPR Bank Buleleng 45 Tahun Buku 2011 Dan 2012 (Semester I) Di Singaraja
		397		1	Operasional PDAM Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Dan 2012 (s.d. Juni 2012)
		398	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Operasional PD BPR NTB Bima Tahun Buku 2010, 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni)
		399		1	Operasional PD BPR NTB Lombok Tengah Tahun Buku 2010, 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni 2012)
		400	Provinsi Kalimantan Barat	1	Operasional RSUD Dr. Soedarso TA 2011 dan 2012 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
		401	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kegiatan Operasional PD Banama Tingang Makmur TB 2011 dan Semester I 2012 di Palangka Raya
		402	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo TB 2011 dan 2012 (s.d 30 September 2012)
		403	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton Tahun 2011 dan 2012 (Semester I)
				36	
	C	Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya			
		404	Kementerian Perindustrian	1	Anggaran Dan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik dan Balai Besar Logam dan Mesin pada Kementerian Perindustrian Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Bandung
		405		1	Pengelolaan Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro (BBIA) Dan Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor Tahun Anggaran 2011 dan Semester I Tahun Anggaran 2011
		406	Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kediri	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kediri di Kediri
		407	Rumah Sakit BHayangkara TK Raden Said Sukanto	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK Raden Said Sukanto
		408	Rumah Sakit Bhayangkara TK II Mappaoudang	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Mappaoudang di Makassar
		409	Universitas Indonesia	1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d Semester I) dan Pengelolaan Aset Tetap pada Universitas Indonesia di Depok
		410		1	Pemeriksaan Lanjutan pada Universitas Indonesia di Depok
		411	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Kementerian Agama RI TA 2010, 2011 dan Semester I 2012 pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati di Bandung
		412	Universitas Sebelas Maret	1	Belanja Modal Universitas Sebelas Maret TA 2011 dan 2012 (s.d Semester I) di Surakarta
		413	Universitas Gajah Mada	1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d Semester I) dan pengelolaan aset tetap pada Universitas Gajah Mada
		414	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia di Jakarta, Denpasar, Malang, dan Madiun
		415		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia di Jakarta, Banjarmasin, Padang, dan Bukittinggi
		416		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia di Jakarta, Pekanbaru, dan Samarinda
		417		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia di Jakarta, Palembang, dan Manado
		418		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia di Jakarta, Surabaya, Cirebon, dan Purwokerto
		419	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Denpasar dan Semarang

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
	420	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Makassar dan Pontianak	
	421	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Manado dan Medan	
	422	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Padang dan Samarinda	
	423	1	Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP)	
		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur	
	424	1	Otorita Asahan	
		1	Pelaksanaan kewajiban penyeteroran dan penyaluran <i>Annual fee</i> (Iuran Tetap dan Iuran Tambahan), pengelolaan dan pertanggungjawaban <i>Environmental Fund</i> , <i>Development Fund</i> , dan biaya Operasional TA 2010 s.d. TW I 2012 serta TL Rekomendasi BPK RI atas HP Tahun 2003 pada Otorita Asahan, PT Inalum, Kementerian Keuangan, dan Instansi terkait lainnya di Jakarta dan Sumatera Utara	
	425	1	Provinsi Jawa Timur	
		1	Operasional RSUD Prof. DR. Soekandar Mojokerto Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Triwulan III)	
	426	1	Operasional RSUD dr. Hardjono S. Kabupaten Ponorogo TA 2011-2012	
	427	1	Provinsi Kalimantan Selatan	
		1	Operasional RSUD Ulin Banjarmasin pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2011 dan Semester I 2012 di Banjarmasin	
	428	1	Provinsi Sulawesi Utara	
		1	Operasional RSUD Bitung TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kota Bitung di Bitung	
	429	1	Provinsi Papua	
		1	Pendapatan dan Belanja RSUD Mimika TA 2011 dan 2012 (Semester I)	
	430	1	Pendapatan dan Belanja RSUD Paniai TA 2011 dan 2012 (Semester I)	
		27		
VI	PDDT Lainnya			
	431	1	Lembaga Penjamin Simpanan	
		1	PDDT Penanganan Bank Gagal Lembaga Penjamin Simpanan di Jakarta	
	432	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		1	Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) pada Kementerian Kehutanan dan Perikanan, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
	433	1	Kementerian Lingkungan Hidup	
		1	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dan Migas pada Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur	
	434	1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
		1	Proses Penetapan Status dan Penerbitan Sertifikat " <i>Clear and Clean</i> " Pemegang IUP Mineral dan Batubara Tahun 2011 s.d 2012 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta	
	435	1		
		1	Pengelolaan Pertambangan Mineral TA 2009 s.d 2011 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Perusahaan Kontrak Karya (PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara) dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (PT Aneka Tambang UPBE Pongkor) serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bogor, Gresik, Sumbawa dan Timika	
	436	1		
		1	Pembangunan Pembangkit dan Jaringan dan Program Listrik Perdesaan Tahun Anggaran (TA) 2010 s.d. TA 2011 Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN Unit Induk Pembangkitan dan Jaringan (UIP KITRING) Sumatera, Aceh, Riau, UIP KITRING Kalimantan, UIP Kitring Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan UIP Kitring Sulawesi, Maluku, Papua Serta Listrik Perdesaan Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara	
	437	1	Kementerian Pertanian	
		1	Program Swasembada Daging Sapi (Pengendalian Importasi Daging Sapi) Tahun 2010-2012 pada Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta	
	438	1	Kementerian Kehutanan	
		1	Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi pada Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta (Pusat), Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur	
	439	1	Provinsi Jambi	
		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2011 dan Semester I TA 2012 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait Lainnya di Muaro Bungo	
	440	1		
		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2011 dan Semester I TA 2012 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Sengeti	
	441	1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2011 dan 2012 di Pangkalpinang	

Halaman 16 - Lampiran 37

No			Entitas	Jml	Daftar LHP
					Objek Pemeriksaan
		442	Provinsi Banten	1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2011 pada KPU dan Panitia Pengawas Pemilu pada Provinsi Banten di Serang
		443	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilu pada TA 2011 pada Komisi Umum Pemilihan Daerah (KPU) Kabupaten Buton di Pasarwajo
		444	Provinsi Gorontalo	1	Belanja Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Gorontalo TA 2011 pada KPU dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
		445	PT Timah	1	Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada PT Timah (Persero) Tbk. Dan Instansi Terkait di Jakarta, Bandung, dan Pangkalpinang
		446	PT Antam	1	Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Antam (Persero) Tbk Tahun 2011 dan Semester I 2012 di Jakarta, Pomalaa, Pongkor, dan Tanjungpinang
		447	PT Pertamina (Persero)	1	Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Pertamina (Persero) Tahun 2011 dan Semester I 2012 di Jakarta, Palembang, Bandung, Surabaya dan Balikpapan
		448		1	Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Pertamina (Persero) tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Jakarta, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Balikpapan
		449	PT PLN (Persero)	1	Kelayakan pemungutan dan pengelolaan Uang Jaminan Langgan pada PT PLN (Persero)
		450	PT Sarinah	1	Pengadaan dan penjualan singkong kering (cassava) pada PT Sarinah (Persero) TA 2011 dan 2012 Semester I
				20	
			Jumlah LHP PDDT	450	

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id

